



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJMD Tahun 2014 - 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	W

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>H.</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	hr

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

**BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2**

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 adalah RKPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2009 - 2028 yang di dalamnya memuat tahapan RPJM Tahap ke II yaitu Tahun 2014-2019.

Pasal 3

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>W.</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas.

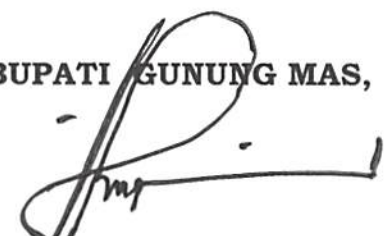
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan kesepakatan seluruh stakeholder di daerah yang dihasilkan melalui Forum Gabungan PD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Mas Tanggal 19-20 Maret 2018 di Kuala Kurun.

Dokumen RKPD adalah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah sebagai Acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing PD (Perangkat Daerah) pedoman utama penyusunan APBD khususnya. Oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, untuk itu seluruh PD Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah pada tahun 2019 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Bab VII : Penutup.

Pasal 5







Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.4. Maksud dan tujuan	6
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	7
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	12
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	12
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	48
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	65
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	75
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	75
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	84
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	121
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	127
4.2. Landasan Kebijakan RPJMD dan Substansi Penyusunan RKPD 2019	129
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019...	132
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	142
5.1. Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2019	155
5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2019	160
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	161
BAB. VII PENUTUP	162
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Di Kabupaten Gunung Mas	13
Tabel 2.2.	Tinggi Rata-rata Dari Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016	14
Tabel 2.3.	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2015.....	14
Tabel 2.4.	Luas Areal IUPHHK/HPH/HTI dan Produksi Tahun 2015...	15
Tabel 2.5.	Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015	16
Tabel 2.6.	Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2016	18
Tabel 2.7.	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	19
Tabel 2.8.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2016 (jutaan rupiah).....	20
Tabel 2.9.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2016 (Jutaan Rupiah)	22
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015	23
Tabel 2.11.	Kondisi Pendidikan berdasarkan Aspek Kesejahteraan Sosial	25
Tabel 2.12.	Kondisi Kesehatan berdasarkan Aspek Kesejahteraan Sosial	26
Tabel 2.13.	Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	27
Tabel 2.14.	Cakupan pelayanan Pendidikan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	28
Tabel 2.15.	Cakupan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	29
Tabel 2.16.	Cakupan pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	29
Tabel 2.17.	Cakupan pelayanan Tenaga Kerja berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	32

Tabel 2.18. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	33
Tabel 2.19. Cakupan pelayanan Pertanahan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	34
Tabel 2.20. Cakupan pelayanan Lingkungan Hidup berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	34
Tabel 2.21. Cakupan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	35
Tabel 2.22. Cakupan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB Aspek Pelayanan Umum	36
Tabel 2.23. Cakupan pelayanan Perhubungan Aspek Pelayanan Umum	37
Tabel 2.24. Cakupan pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aspek Pelayanan Umum	37
Tabel 2.25. Cakupan pelayanan Penanaman Modal berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	38
Tabel 2.26. Cakupan pelayanan Kebudayaan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	39
Tabel 2.27. Cakupan pelayanan Perpustakaan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	39
Tabel 2.28. Cakupan pelayanan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	41
Tabel 2.29. Cakupan pelayanan Pariwisata berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	42
Tabel 2.30. Cakupan pelayanan Pertanian berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	43
Tabel 2.31. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.....	64
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kabupaten Gunung Mas	81
Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008-2018	114
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020...	115
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020...	117

Tabel 3.5.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020...	119
Tabel 4.1.	Kesinambungan Prioritas Pembangunan, Visi Misi dan Sasaran pada RPJMD	133
Tabel 5.1.	Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2019	150
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Rencana Kerja RKPD Tahun 2019	160
Tabel 6.1.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2016	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencana Lainnya	6
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas....	13
Gambar 2.2.	Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017	18
Gambar 2.3.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas Per Kecamatan Tahun 2017	18
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010-2016 (persen)	22
Gambar 4.1.	Pengelompokan Isu Strategis.....	130
Gambar 4.2.	Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2019...	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 yang disusun ini merupakan pelaksanaan Tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan Pedoman bagi PD untuk menyempurnakan Rencana Kerja PD (Renja-PD) dan untuk menyusun RKA PD Tahun 2019.

Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah mendatang setiap PD di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD harus dapat menjabarkan visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci program dan kegiatan ke dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

- Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tanggal 4 Pebruari 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 382);

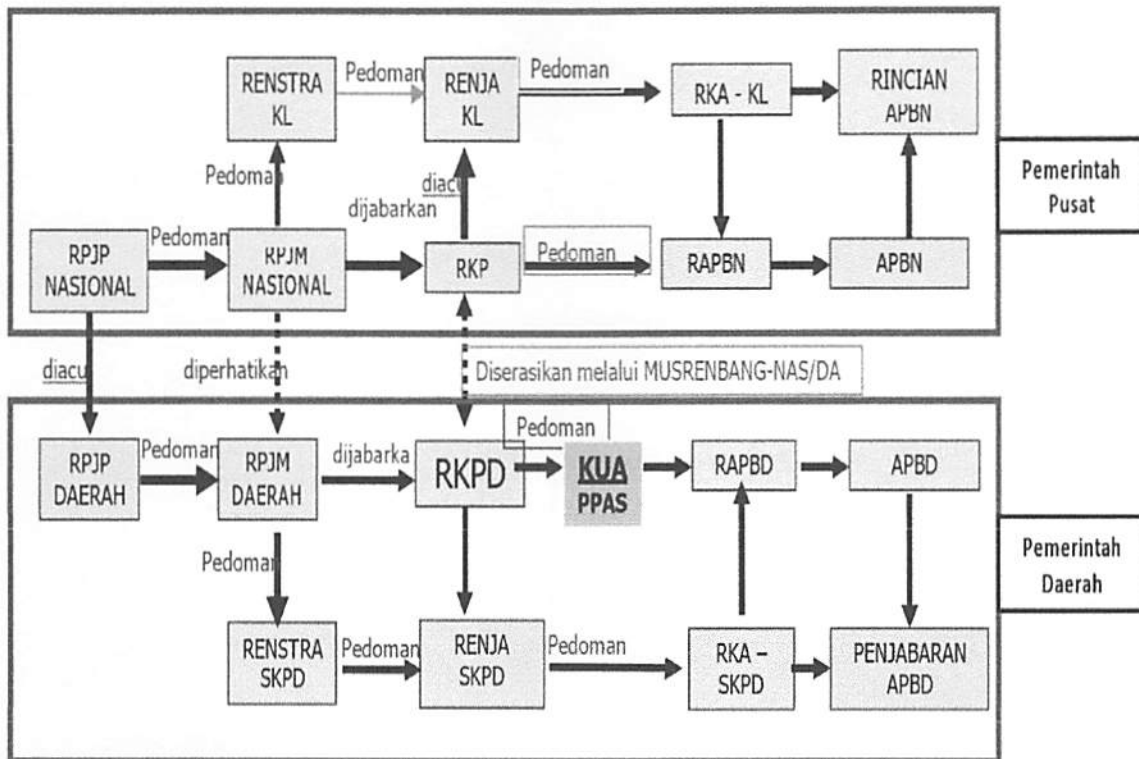
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD. Di samping itu RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap PD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019, dimaksudkan untuk dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD 2009-2028 dan merupakan RPJMD fase kelima 2014-2019 Kabupaten Gunung Mas.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019;
2. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2019;
3. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2019;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang

diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu tahun 2019 menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD tahun 2019, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

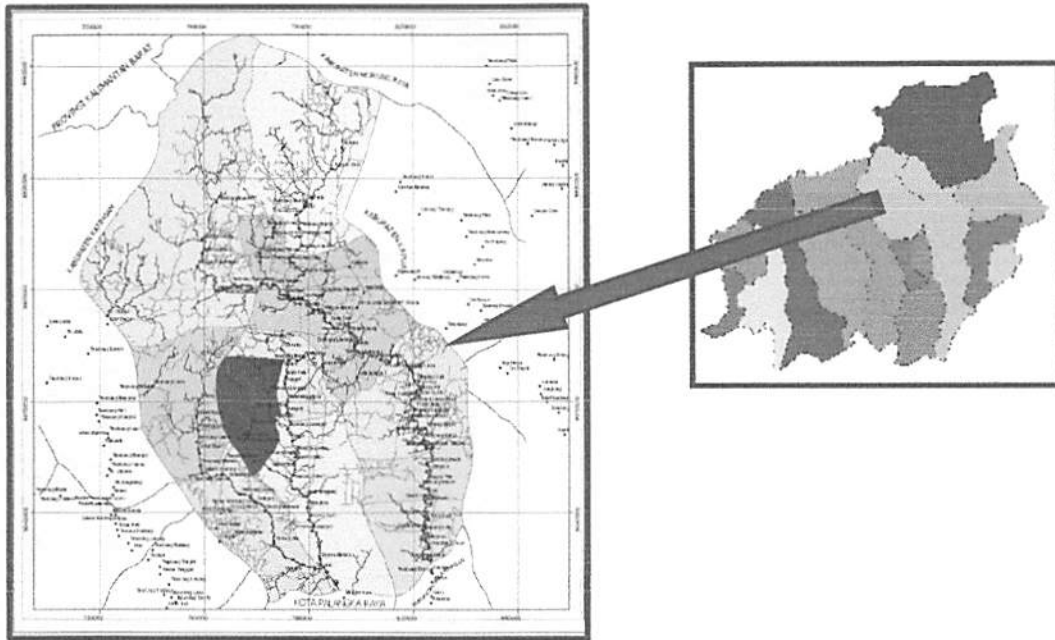
Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi $\pm 0^{\circ} - 18^{\circ}00$ Lintang Selatan sampai dengan $01^{\circ}40^{\circ}30''$ lintang selatan dan $\pm 113^{\circ}01^{\circ}00''$ bujur timur sampai dengan $114^{\circ}01^{\circ}00''$ bujur timur dengan luas wilayah 10.804 Km^2 (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara $\pm 200 - 500$ meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan $\pm 8^{\circ} - 15^{\circ}$ dan perbukitan tingkat kemiringan $\pm 15^{\circ} - 25^{\circ}$ dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.

Secara administrasi, Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar).

Berdasarkan luas Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai luasan 10.804 Km^2 , jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.564 Km^2 , luas Kabupaten Gunung Mas sebesar 7,04 % dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas



Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Gunung Mas

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)
		Kelurahan	Desa	
Manuhing	Tumbang Talaken	1	11	1.113
Manuhing Raya	Tehang	1	5	601
Rungan	Jakatan Raya	1	13	710
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	1	8	738
Sepang	Sepang Simin	1	6	397
Mihing Raya	Kampuri	1	5	343
Kurun	Kuala Kurun	2	13	876
Tewah	Tewah	1	15	1.079
Kah. Hulu Utara	Tumbang Miri	1	11	1.589
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1	7	1.425
Miri Manasa	Tumbang Napoi	1	10	1.542
Rungan Barat	Rabambang	1	10	391
Jumlah		13	114	10.804

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

2. Kondisi Topografi

Secara Topografi, daerah utara Kabupaten Gunung Mas merupakan perbukitan dengan ketinggian antara ± 100–500 meter dari permukaan air laut. Selain itu, daerah ini mempunyai tingkat kemiringan antara ± 8–15 derajat, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15-250. Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut.

Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan.

Selain itu, daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan sungai. Ada empat jalur sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu :

1. Sungai Manuhing dengan panjang sekitar ± 28,75 Km.
2. Sungai Rungan dengan panjang sekitar ± 86,25 Km.
3. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar ± 600 Km.
4. Sungai Miri dengan panjang sekitar ± 20 Km.

3. Keadaan Iklim

Kabupaten Gunung Mas beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 27,1°C – 28,2°C. Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2014 hampir merata. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 604,7 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan kisaran curah hujan 41,0 mm (*Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017*).

Tabel 2.2. Tinggi Rata-rata dari Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Air Laut (Meter)				
	0-25	25-50	50-100	100-500	500 Keatas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manuhing			V		
Manuhing Raya				V	
Rungan			V		
Rungan Hulu			V		
Rungan Barat			V		
Sepang			V		
Mihing Raya			V		
Kurun				V	
Tewah				V	
Kah. Hulu Utara					V
Damang Batu					V
Miri Manasa					V

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2016

Bulan	Tahun					
	2014		2015		2016	
	HH	MM	HH	MM	HH	MM
Januari	11	138,3	17	357,0	17	357,0
Februari	10	149,4	14	425,0	14	425,0
Maret	19	294,8	8	161,0	8	161,0
April	19	575,9	10	230,0	10	230,0
Mei	13	223,2	11	411,0	11	411,0
Juni	14	207,7	9	253,0	9	253,0
Juli	5	41,0	0	0,0	0	0,0
Agustus	10	62,3	0	0,0	0	0,0

September	2	121,0	1	32,0	1	32,0
Oktober	6	123,0	5	174,0	5	174,0
Nopember	14	312,3	13	470,0	13	470,0
Desember	21	604,7	11	209,0	11	209,0

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

4. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jaran g, pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan luasan total 1.081.033,64 Ha meliputi Hutan Lindung (HL) 59.136,64 Ha, Hutan Produksi (HP) 375.965,50 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 275.375,00 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 263.468,75 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 107.087,75 Ha. Sedangkan luas lahan penghijauan yaitu 400 Ha. (Sumber : Dinas Kehutanan, 2016).

Sedangkan pada pemanfaatan hutan, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) alam sebanyak 11 (sebelas) unit dengan luas areal 510.531 Ha.

Tabel 2.4. Luas Areal IUPHHK/HA/HTI Tahun 2015

Jenis Izin <i>Kind Of License</i>	Di Gunung Mas Luas (Ha) /Area	Di Kabupaten lain Luas (Ha) /Area	Luas total Total Area (Ha)	Target Produksi Target Of Production (M ³)	Realisasi Produksi Realisation Of Production (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IUPHHK - HA	370.416	-	37.0416	235.000	225.696,81
IUPHHK - HTI	2.355	-	2.355	68442	34.714,07
Gunung Mas	372.771	-	372.771	303.442	260.410,88

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar,

bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.5. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional di Wilayah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	2	3
1	PT. Agrolestari Sentosa	Kec. Manuhing dan Rungan
2	PT. Archipelago Timur Abadi	Kec. Kurun
3	PT. Flora Nusa Perdana	Kec. Rungan
4	PT. Kalimantan Hampan Sawit	Kec. Manuhing Raya, Manuhing
5	PT. Mulia Sawit Agro Lestari	Kec. Rungan, Manuhing
6	PT. Tantahan Panduhup Asi	Kec. Manuhing Raya, Manuhing
7	PT. Berkala Maju Bersama I	Kec. Kurun, Tewah
8	PT. Berkala Maju Bersama II	Kec. Manuhing
9	PT. Kahayan Agro Plantation	Kec. Damang Batu, Kahayan Hulu Utara, Tewah

Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Gunung Mas Tahun 2015

Untuk bidang pertanian, secara khusus di wilayah Kabupaten Gunung Mas para petani lebih banyak menanam padi ladang daripada padi sawah. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat dan pengetahuan bercocok tanam lebih mengerti bertanam padi ladang dari pada padi sawah dan sebab lainnya adalah terbatasnya saluran irigasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan untuk tanaman bahan makanan lainnya, sebagian besar petani dan masyarakat cenderung menanam dan memproduksi komoditi padi, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai.

Untuk tanaman perkebunan, tanaman karet masih menjadi tanaman yang paling banyak berproduksi. Hal ini terlihat dari jumlah produksi karet pada tahun 2016 sebesar 20.405 ton dengan luas tanam seluas 118.772 Ha. Sedangkan komoditi kelapa hanya berproduksi sebesar 60,53 ton dengan luas tanam 432 Ha dan luas tanam kelapa sawit adalah 3.330 Ha akan tetapi belum menghasilkan karena usia tanam yang masih baru (*Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017*).

Dari 2 (dua) potensi pengembangan wilayah tersebut terpetakan juga potensi bencana longsor/erosi menurut type kerawanan per kecamatan pada tahun 2014. Untuk type relatif aman ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Manuhing, Rungan dan Sepang. Type agak rawan

meliputi semua kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Type cukup rawan ada 5 (lima) kecamatan yaitu Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa sedangkan untuk type rawan ada 5 (lima) kecamatan yaitu Manuhing Raya, Rungan Hulu, Tewah, padiDamang Batu dan Miri Manasa dan untuk type sangat rawan ada 2 (dua) kecamatan yaitu Damang Batu dan Miri Manasa (*Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017*).

7. Demografi

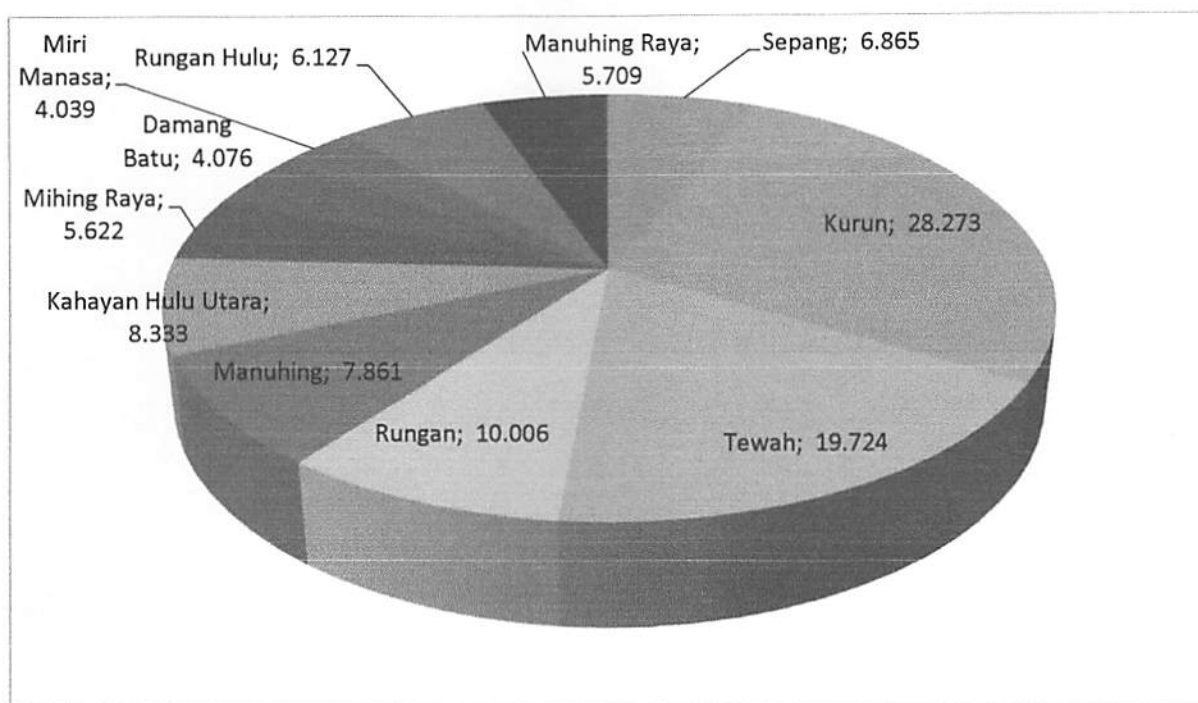
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2016 berjumlah 112.484, yang terdiri atas 59.803 laki-laki dan 52.681 perempuan. Dari hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tercatat penyebaran penduduk Gunung Mas terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Kurun. dengan tingkat kepadatan penduduk per Km² adalah 33 jiwa.

Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Rungan adalah tiga kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 28.273 jiwa, 19.724 jiwa dan 10.006 jiwa.

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data sex ratio penduduk Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas



Tabel 2.6. Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
Sepang	3.655	3.210	6.865	114
Kurun	15.011	13.262	28.273	113
Tewah	10.490	9.234	19.724	114

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
Kahayan Hulu Utara	4.390	3.943	8.333	111
Rungan	5.317	4.689	10.006	113
Manuhing	4.263	3.598	7.861	118
Mihing Raya	3.003	2.619	5.622	115
Damang Batu	2.197	1.879	4.076	117
Miri Manasa	2.119	1.920	4.039	110
Rungan Hulu	3.262	2.865	6.127	114
Manuhing Raya	3.016	2.693	5.709	112
Rungan Barat	3.080	2.769	5.849	111
Jumlah	59.803	52.681	112.484	114

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Gunung Mas, ditinjau dari sisi kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakupi masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, produktivitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan dan gambaran sektor.

a. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017, maka keadaan ekonomi Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut, angka PDRB Kabupaten Gunung Mas atas dasar harga berlaku dalam kurun tiga tahun terakhir masing-masing adalah Rp. 2.982.610,5 (2013), Rp. 3.378.383,2 (2014*) dan Rp. 3.776.970,5 (2015**), Rp. 4.231.787,5 (2016*) (semua dalam juta rupiah).

Tabel 2.7. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2016 (%)

No	Sektor	2014	2015*)	2016**)
1	Pertanian	34,68	33,30	32,93
2	Pertambangan/Penggalian	13,52	12,36	11,67
3	Industri Pengolahan	8,83	8,88	8,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02

No	Sektor	2014	2015*)	2016**)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	10,75	11,56	11,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,49	8,87	9,20
8	Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,68	1,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,76
10	Informasi dan Komunikasi	1,26	1,21	1,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,58	0,55
12	Real Estate	2,55	2,74	2,81
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	5,61	6,09	6,41
15	Jasa Pendidikan	7,20	7,49	7,67
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,88	3,12	3,09
17	Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31

Sumber : Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas 2012-2016

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2017 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (32,93 persen), diikuti sektor pertambangan dan penggalian (11,67 persen) dan sektor konstruksi (11,79 persen). Sedangkan peranan terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,02 persen.

Gambar 2.8. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2014-2016

Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,68	33,30	32,93
	31,42	29,92	29,61
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,54	0,69	0,48
a. Tanaman Pangan	0,15	0,15	0,15
b. Tanaman Hortikultural	27,98	26,22	26,16
c. Perkebunan	2,10	2,17	2,13
d. Peternakan	0,65	0,69	0,69
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,35	1,61	1,55
	1,61	1,77	1,77
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu			
3. Perikanan			
Pertambangan dan Penggalian	13,52	12,36	11,67
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,03	0,03	0,02
	12,95	11,76	11,07
3. Pertambangan Bijih Logam	0,54	0,57	0,57

4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya			
Industri Pengolahan	8,83	8,88	8,86
Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02
1. Ketenagaanlistrikan	0,01	0,02	0,02
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	10,75	11,56	11,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,49	8,87	9,20
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,68	1,67
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Darat	1,09	1,16	1,17
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angkutan sungai Danau dan Penyebrangan	0,47	0,47	0,46
5. Angkutan Udara	0,01	0,01	0,00
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,05	0,05	0,05
Penyediaan dan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,76
1. Penyediaan Akomodasi	0,11	0,12	0,12
2. Penyediaan Makan Minum	1,53	1,59	1,64
Informasi dan Komunikasi	1,26	1,21	1,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,58	0,55
1. Jasa Perantara Keuangan	0,11	0,10	0,10
2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,44	0,44	0,42
3. Jasa Keuangan Lainnya	0,04	0,04	0,04
4. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00
Real Estate	2,55	2,74	2,81
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,61	6,09	6,41
Jasa Pendidikan	7,20	7,49	7,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	3,12	3,09
Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas Selama empat tahun terakhir berturut-turut sebesar 5,99% (2010), 6,57% (2011), 6,29% (2012), 6,87% (2013), 6,37% (2014) dan 6,96% (2015), 7,00% (2016). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2016 (Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
	1	2	3	4
1	2010	1.944.386,5	1.944.386,5	5,99
2	2011	2.272.733,9	2.072.078,5	6,57
3	2012	2.590.120,2	2.202.328,7	6,29
4	2013	2.982.610,5	2.353.541,9	6,87
5	2014	3.378.383,2	2.504.469,5	6,41
6	2015*)	3.776.970,5	2.678.816,1	6,96
7	2016**)	4.231.787,5	2.866.408,3	7,00

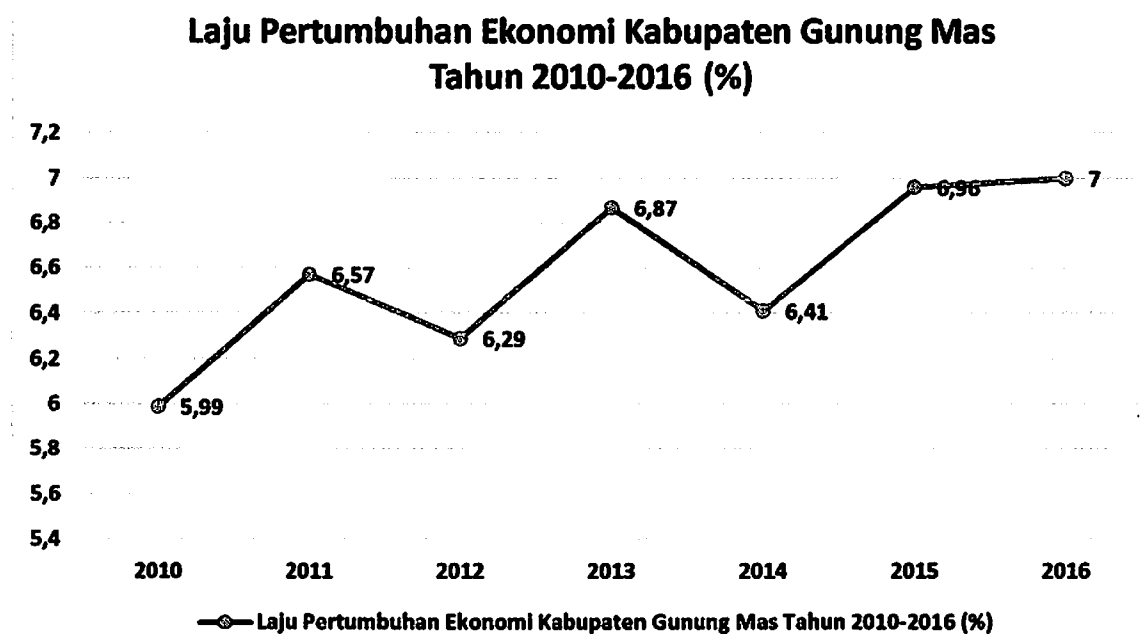
Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2014 perekonomian Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan sebesar 6,41% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,96%. Pada Tahun 2016 Perekonomian Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan sebesar 7,00%. Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas harga konstan yang terlihat semakin besar dari tahun ke tahun, maka hal tersebut menandakan bahwa angka inflasi ternyata semakin tinggi pula. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010-2016 (%)



c. Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belum Pernah/Belum Tamat SD	5.558	266	5.824	2.494
Sekolah Dasar	19.924	318	20.242	4.939
Sekolah Menengah Pertama	18.243	213	18.456	6.905
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	986	-	986	-
Diploma I/II/III/Akademi/Universitas/Diploma I/II/III	3.287	106	3.393	31
Jumlah/Total	56.786	1.575	58.361	17.005

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

d. Penduduk Miskin

Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil pendataan dengan metode SUSENAS, Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 6.670 jiwa (5,83%) dari total jumlah penduduk 139.760 jiwa dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 630 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan perluasan dan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan infrastruktur jalan untuk pemicu pergerakan ekonomi rakyat.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan

baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan;
- 2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup;
- 3) Kesinambungan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang;
- 4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arah kehidupan mereka dan berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan

keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

a) Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah.

Tabel 2.11
Kondisi Pendidikan

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.1	Angka melek huruf (%)	99,73	99,53	99,95
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	-	-	8,94
1.3	Angka Partisipasi Kasar			
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	120,48	120,19	116,41
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	90,8	89,17	100,99
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	49,33	67,29	61,15
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,34	103,3	95,84
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,35	66,64	65,64
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	47,26	47,69	36,49

b) Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.12
Kondisi Kesehatan

No	Uraian	Tahun	
		2015	2016
1.	Rasio tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk (1000:1)	1:4.984	1:5.770
2.	Rasio dokter per satuan penduduk	28:107.500	30:109.949
3.	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	508:107.500	864:109.949
4.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	125 (35,51%)	198 (57,56%)
5.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,86	86,86
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97	127
7.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%
8.	Cakupan Kunjungan Bayi	91,3%	92%
9.	Angka Kematian Bayi / 1000 Kelahiran Hidup	10	7
10.	Angka Kematian Ibu / 100.000 Kelahiran Hidup	159	223
11.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	86,86	92
12.	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72	72
13.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	3	3

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau swasta yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

1) Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

a) Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (human resources), pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam

memilih dalam mebina hidup yang baik untuk pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Sudah menjadi rasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur dilihat dari kualitas pendidikannya.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Angka melek huruf (%)	99,8
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	116,93
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	97,29
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	96,21
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	63,22
6	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	1 : 10
7	Angka Partisipasi Sekolah (%)	110,67
8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	133
9	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	1 : 11
10	Angka Partisipasi Sekolah (%)	102,54
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	92,3
12	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	20,13
13	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	25,48
14	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	30,49
15	Angka Harapan Lama Sekolah	11,74
16	Rata-rata Lama Sekolah	8,94
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,73
18	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,31
19	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,17
20	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,06
21	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,81
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,08

b) Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak mungkin terselenggara baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat

berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Angka Kelangsungan hidup Bayi	93,79
2	Angka Usia Harapan Hidup	72
3	Angka Gizi Buruk (%)	3
4	Angka kematian ibu	103/100,000 KLH
5	Angka Kematian Bayi	8/100 KLH
6	Rasio Posyandu per satuan balita	140 : 9.975
7	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	89 : 112.484
8	Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	35: 112.484
9	Rasio Dokter per satuan penduduk	35: 112.484
10	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	592 : 112.484
11	Cakupan Puskesmas	100
12	Cakupan Pembantu Puskesmas	0,69
13	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	90
14	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	60,95
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,73
16	Cakupan Ibu Nifas	90,03
17	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	52,23
18	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80,31
19	Cakupan pelayanan anak balita	80,26
20	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100
21	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	99,4
22	Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	101,95
23	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	0
24	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	0,21
25	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	
26	Penderita DBD yang ditangani	140,46
27	Penemuan Penderita Diare	1152
28	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0
29	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	8 Dokter spesialis
30	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	61%
31	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	98%
32	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas	Type D

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci pemicu peningkatan pelayanan bagi masyarakat maupun untuk pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Gunung

Mas. Adapun bagian dari pekerjaan umum adalah pembangunan sistem jaringan jalan, jembatan, sumber daya air maupun tata ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian dari struktur ruang wilayah dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala provinsi maupun nasional.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565
2	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20
3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7450
4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	24,510%
5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	78%
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	39%
7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	10,63%
8	Persentase penanganan sampah (%)	12,21%
9	Rasio Rumah Layak Huni	23,328%
10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	6,909
11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935
12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	24,510%
13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	4,4%
14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 Desa
15	% Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 Desa
16	% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	12,42%
17	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	0,81%
18	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,98%
19	% Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15%

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	14844
2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39%
3	Rumah Layak Huni (unit)	26241
4	% Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	23,328%

e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos kamling.

Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

f) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi sosial kesejahteraan masyarakat dindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial)

secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi penanggulangan kemsikinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas. Jumlah rumah tangga dan jumlah individu pertahapan keluarga di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2015 berdasarkan PBDT 2015 yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Status Kesejahteraan
 - Desil 1 : 21
 - Desil 2 : 295
 - Desil 3 : 716
 - Desil 4 : 411
- Jumlah Individu berdasarkan Status Kesejahteraan
 - Desil 1 : 186
 - Desil 2 : 1965
 - Desil 3 : 3588
 - Desil 4 : 1687

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 penduduk Kabupaten Gunung Mas masuk dalam kategori Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 1.443 RTS atau 7.426 jiwa.

2) Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

a) Tenaga Kerja

Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan sarana dan

prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

No	Indikator/ Tingkat Pendidikan Pencari Kerja	Kondisi Tahun 2015
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	77,44%
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,70%
3	SD/setingkat	0
4	SLTP/setingkat	1
5	SLTA/setingkat	16
6	Diploma I/II/III/setingkat	18
7	Diploma IV/Sarjana	18

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana, konsep pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunung Mas terus ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera (PKK) dengan melibatkan berbagai kegiatan pemberdayaan, Kader Pos Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa, selain itu juga terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan. Di Kabupaten Gunung Mas terlepas dari program pemberdayaan perempuan masih terjadi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2015
1	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)	2143
2	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta (orang)	-
3	Jumlah KDRT (orang)	1
4	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (kasus)	-
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	3
6	Jumlah Balita Ikt Posyandu (anak)	-

c) Pangan

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan

terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pada tahun 2017, untuk Ketersediaan Pangan Utama mencapai 15,7 % dimana dapat digunakan apabila ada keadaan darurat.

d) **Pertanahan**

Menyelenggarakan Administrasi Urusan pemerintah bidang pertanahan dengan indikator sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun	9
2	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	0
3	% Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	57,14%

e) **Lingkungan Hidup**

Peningkatan usaha pembangunan, diikuti pula dengan peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan dalam penggunaannya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem. Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu melalui kajian-kajian teknis.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, salah satu upaya untuk mengerangi kerusakan lingkungan diantaranya dengan pemakaian dan penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan sumur resapan air, sarana IPAL UKM , dsb.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Pencemaran status mutu air	35%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	79%
3	Penegakan Hukum Lingkungan	100%

4	% Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	73, 3%
5	% Standar Baku Mutu Udara	73, 3%

f) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta bagi dirinya karena akta ini sangatlah penting diperlukan dikemudian hari.

g) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peranan yang strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan yang dirancang pemerintah mengakomodir pemberdayaan masyarakat desa dalam program kerjanya tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	114
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	72
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	373
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	4

h) Pengendalian Penduduk dan KB

Pertumbuhan penduduk merupakan isu yang cukup strategis, hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi satu wilayah dimasa yang akan datang.

ambaran umum kinerja pemerintah urusan keluarga berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%)	2,729
2	Rasio Akseptor KB (orang)	1500
3	Cakupan Peserta KB Aktif (orang)	17.595
4	Jumlah PLKB Aktif (orang)	18
5	Terpadunya Program Kerja KB (Program)	2
6	Tersedianya Alokasi KB di Klinik (buah)	65
7	Jumlah Sarana dan Prasarana KB (unit)	8
8	Keluarga Pra Sejahtera I	-
9	Tingkat Ketahanan Ekonomi Keluarga (kelompok)	-
10	Jumlah Kelompok Tribina (Kelompok)	250 yang aktif Cuma 36
11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/Organisasi Kepemudaan	134 yang aktif cuma 10
12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	1

i) Perhubungan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di Kabupaten Gunung Mas dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah maupun dan penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mendukung hal tersebut, perkembangan dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, Trafic cones, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas menurun dari tahun sebelumnya menjadi 33 %.

j) Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot, media informasi dan radio komunikasi.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Website milik pemerintah daerah (buah)	33
2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	54
3	Jumlah Radio/TV lokal	1
4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	0,000
5	Jumlah Kantor Pos (Unit)	6
6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	2
7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	9
8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	7
9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	14
10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	2
11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	624
12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	0
13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24
14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	2
15	Jumlah Badan Publik PPID	28
16	Pameran / expo	1
17	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	85,8
18	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	14
19	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	17
20	% Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	49,16%

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha perseorangan dan merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap namun ingin memiliki simpanan dan mendapat kemudahan dalaam sisi jasa pembiayaan barang hingga jasa. Koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat pengusaha kecil yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Koperasi Aktif (%)	52%
2	Jumlah UMKM	2,943
3	Jumlah Industri	-
4	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	4
5	% Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	27%
6	% UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	40,90%

l) Penanaman Modal

Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan penanaman modal. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Investor PMDN dan PMA	42
2	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
3	Lamanya hari proses perizinan	10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06
5	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100%

m) Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, pemuda memiliki potensi yang strategis dan berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI maupun Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan pernah lepas dari olahraga sehingga dengan olahraga pemuda dapat menghilangkan perilaku negative dan mereka bisa belajar menghargai orang lain.

n) Statistik

Statistik memuat data-data untuk memenuhi keperluan penyusunan rencana pembangunan perihal kondisi umum suatu daerah, pemerintahan, kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pertanian, dsb.

o) Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunung Mas tidak terlepas dari penyelenggaraan festival seni budaya dan pengembangan pariwisata daerah.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	25

p) Perpustakaan

Gambaran umum pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2017 memiliki 1 buah perpustakaan pemerintah daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Gunung Mas pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah perpustakaan	1
	a. Jumlah Perpustakaan umum	40
	b. Jumlah perpustakaan sekolah :	
	- . SD/MI	166
	- . SMP/MTs	56
	- . SMA/MA	13
	c. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	50
	d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0
	e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	0
2	Jumlah anggota	1.478
3	Jumlah pengunjung	4.028
4	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	30.130

q) Kearsipan

Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan juga kegiatan penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah

ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, menyatakan bahwa arsip ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain arsip sebagai hasil endapan informasi pelaksanaan kegiatan instansi yang tercipta karena fungsi instansi berjalan dan disimpan untuk dipergunakan.

3) Fokus Urusan Pilihan.

a) Energi dan sumberdaya mineral

Sumberdaya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya, sumberdaya energi dan mineral terdiri atas sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.

Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang yang cukup penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah dan mutu yang memadai merupakan upaya yang senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan.

b) Kehutanan

Data luas hutan di Kabupaten Gunung Mas didasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 seluas 980.763,79Ha. Kawasan hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi/hutan produksi terbatas/hutan lindung seluas 737.557,80 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 243.205,99Ha. Luas hutan yang sudah dieksplorasi untuk HP/HPT/HL adalah seluas 11.482,43 Ha

dan untuk HPK seluas 88.070 Ha. Hutan di wilayah kabupaten Gunung Mas tidak luput pula dari aksi perusakan dan penjarahan. Total luasan kerusakan dan penjarahan hutan adalah 81.007,02 Ha. Persentase luas hutan lindung dibanding total luas hutan adalah 6,03% dan luas rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas seluas 1.500 Ha.

c) Kelautan dan perikanan

Perikanan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan jenis budidayanya dibagi dalam 2 jenis yaitu kolam (fresh water pond) dan keramba (Cage). Luas perairan perikanan darat pada tahun 2016 untuk jenis kolam seluas 79,60 Ha dan untuk jenis keramba sebanyak 334 unit. Sedangkan produksi perikanan darat menurut jenisnya pada tahun 2016, untuk kolam sebesar 2922,32 ton dan untuk keramba sebesar 440,74 ton. Untuk jenis komoditas perikanan tangkap yang dipasarkan komoditinya adalah ikan patin (301,10 ton), lais (31,90 ton), baung (15,10 ton), belida (8,70 ton), betok (7,50 ton), gabus (7,80 ton), gurame (4,80 ton), jelawat (4,70 ton), toman (6,20 ton) dan udang (2 ton). Sedangkan untuk perikanan kolam komoditinya adalah nila (142,93 ton), patin (301,10 ton), mas (60,62 ton), lele (73,33 ton) dan betok (7,50 ton). Potensi perikanan di Kabupaten Gunung Mas masih sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan kesesuaian kultur budaya yang terbiasa makan ikan dari kecil sehingga daya serap pasar akan komoditas ikan cukup tinggi.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	3.701,82
2	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	260,60
3	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	39
4	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	207,88
5	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	27,84

d) Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat

dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan promosi sehingga mampu menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu :

- Objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes
- Objek wisata alam Sungai Hamputung
- Objek wisata alam air terjun Batu Mahasur
- Objek wisata alam Bukit Amai Rawang
- Objek wisata budaya Betang Tumbang Korik
- Objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi
- Objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Kunjungan Wisata	9457
2	Jumlah objek wisata daerah	1
3	PDRB Sektor Pariwisata	70%

e) Pertanian

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, meskipun dapat dikatakan merupakan suatu “sumbangsih nisbi” (relative contribution) sektor pertanian dalam perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto tahun

demikian tahun kian mengecil. Hal itu bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menandalkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting, sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2016
1	Pertanian	
	% PDRB Sektor Pertanian	7,58
2	Luas Panen Tanaman Pangan	
	Padi sawah (Ha)	939
	Padi ladang (Ha)	2.228
	Jagung (Ha)	59
3	Produksi Tanaman Pangan	
	Padi sawah (Ton)	2133
	Padi ladang (Ton)	4395
	Jagung (Ton)	150

f) **Perdagangan**

Empat sektor utama berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor jasa-jasa serta sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,85% terhadap nilai PDRB tahun 2016.

g) **Perindustrian**

Komoditas industri yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain industri agro dan hasil hutan meliputi industri meubel/kusen/moulding, industri tahu/tempe, industri anyaman rotan, industri kripik pisang/singkong, industri gilingan beras, industri kue basah, industri roti, industri batu bata/batako. Cabang industri lainnya adalah industri elektronika aneka dan industri logam mesin kimia meliputi industri penempaan logam, industri bodi kapal/klotok, industri bengkel, dan industri pembuatan teralis/pagar.

Data tahun 2016 terlihat bahwa usaha perdagangan yang memiliki SIUP di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 2.262 buah yang terdiri dari perdagangan besar, dan kecil/eceran. Berdasarkan banyaknya bentuk perusahaan yang memiliki SIUP adalah perusahaan perorangan sebanyak 210 buah.

h) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain :

- (1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan potensi daerah tujuan;
- (2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara ekstensifikasi lahan;
- (3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (4) Pemerataan penyebaran penduduk;
- (5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional;
- (6) Meningkatkan taraf hidup penduduk.

Ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi pada tahun 2017 sebanyak 93,22 %.

4) Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a) Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap struktur perekonomian pada PDRB. Kontribusi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada PDRG atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebanyak 6,41% pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya dari 6,09 %.

b) Perencanaan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 2014–2019 secara makro yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis

perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan tugas perencanaan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah selama periode 2010 -2016 anatara lain:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2009–2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 serta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
- 2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas, Laporan Kegiatan Triwulan kegiatan;
- 3) Tersedianya dokumen data /statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 4) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
- 7) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Prasarana dan sarana penunjang yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain :

- ✚ Perhubungan Udara, dimana Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki Lapangan Udara yaitu Bandara Sangkalemu yang hanya dapat disinggahi oleh pesawat perintis. Kegiatan lalu lintas udara Bandar Udara Sangkalemu dimulai pada tahun 2007. Penerbangan

ketika itu dilakukan hanya sebanyak 37 kali kedatangan dan 37 kali keberangkatan. Untuk tahun 2008 tidak ada penerbangan dan untuk tahun 2009 telah mulai dilakukan penerbangan pada awal bulan Maret bekerjasama dengan Perusahaan Penerbangan Avia-Star dengan jadwal penerbangan rabu dan jum'at setiap minggunya. Tahun 2010 penerbangan dilakukan tiap hari senin dan jum'at. Jumlah penerbangan tahun 2010 sebanyak 105 kedatangan dan keberangkatan, dengan jumlah penumpang datang sebanyak 589 penumpang, yang berangkat 692 penumpang. Untuk tahun 2011 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang berkurang yaitu 99 kali kedatangan dan keberangkatan sedangkan jumlah penumpang yang datang sebanyak 415 penumpang dan 544 penumpang untuk keberangkatan. Tahun 2012 terjadi peningkatan penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan yaitu 161 kali dan untuk penumpang datang sebanyak 384 penumpang dan 522 penumpang untuk keberangkatan. Sedangkan untuk tahun 2013 terjadi penurunan baik untuk kedatangan/keberangkatan maupun jumlah penumpang ataupun barang. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada tahun 2013 sebanyak 41 kali dan untuk jumlah penumpang datang sebanyak 107 orang dan keberangkatan sebanyak 120 orang. Pada tahun 2014, terjadi kenaikan untuk kedatangan/keberangkatan pesawat berjumlah 83 kali, sedangkan jumlah penumpang datang sebanyak 184 orang dan penumpang berangkat 255 orang. Selain penerbangan komersial yang merupakan kerjasama Pemerintah propinsi dan kabupaten, juga ada penerbangan perintis oleh MAF (pesawat type capung) yang juga melayani hal yang bersifat sosial. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada tahun 2014 sebanyak 166 kali dan untuk jumlah penumpang datang sebanyak 184 orang dan keberangkatan sebanyak 255 orang. Pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun keberangkatan dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang berkurang yaitu 64 kali kedatangan dan keberangkatan sedangkan jumlah penumpang yang datang 134 orang dan penumpang yang berangkat 142 orang. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun

keberangkatan yang berkurang yaitu 3 kali kedatangan dan 3 kali keberangkatan dengan jumlah penumpang yaitu 8 orang yang datang dan 14 orang yang berangkat.

- ✦ Perhubungan darat yaitu infrastruktur jalan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas tahun 2014 yang terdiri atas ruas jalan negara 308,173 Km, ruas jalan provinsi 110,460 km, ruas jalan Kabupaten pada Tahun 2016 adalah 738,992 km. Tahun 2016 panjang ruas jalan kabupaten 738,992 Km. Jenis permukaan jalan beraspal pada Tahun 2016 meningkat menjadi 154,841 Km dibandingkan pada Tahun 2015 yaitu 113,662 Km.
- ✦ Telekomunikasi berupa 1 unit Stasiun Telkom di Kuala Kurun yang dapat melayani hubungan SLJJ dan SLI. Kemudian juga didukung pula dengan aktifnya stasiun transmisi untuk telepon selular yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi melalui handphone yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat.
- ✦ Pada tahun 2016, jumlah produksi listrik sampai dengan bulan desember 2016 di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencapai 29.877.041 Kwh dengan jumlah dijual 26.877.651 Kwh, dipakai sendiri 151.570 Kwh dan susut/hilang sebesar 3.148967 Kwh. PLN wilayah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2016 mampu melayani 11.300 pelanggan.
- ✦ Air bersih dari PDAM masih terbatas hanya di Ibukota Kabupaten, dan beberapa Ibukota Kecamatan. Berdasarkan data dari PDAM, jumlah pelanggan untuk tahun 2016 sebanyak 11.300 pelanggan. Jumlah ini meningkat 7,94% persen terhadap jumlah pelanggan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.721 pelanggan. Jumlah air bersih yang disalurkan untuk melayani kebutuhan pelanggan di wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 sebesar 671.549 m³.
- ✦ Berdasarkan data Kantor Pos Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 berjumlah sebanyak 6 Unit dengan status Kantor Pos Cabang dan 1 Unit dengan status loket Ekstensi.
- ✦ Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian. Sampai tahun 2017, sudah terdapat 4 buah bank yaitu BRI, Mandiri, BNI dan Bank Kalteng, baik berupa cabang

pembantu, unit maupun kantor kas yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan tersebar di Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Rungan.

- ✦ Untuk menunjang pariwisata maupun kegiatan bisnis di Kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa sarana akomodasi yang layak dan memadai berupa hotel dan losmen. Sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas terdapat 18 buah hotel dan losmen dengan total jumlah kamar sebanyak 325 kamar dan terbagi atas kamar dengan fasilitas AC sebanyak 98 kamar dan Non AC sebanyak 225 kamar.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 ini memuat beberapa hal pokok, yaitu :

- a. Jumlah program dan kegiatan pada RKPD perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD perubahan Tahun 2017.
- b. Jumlah Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan Tahun 2017 yang tidak direalisasikan pelaksanaannya dalam APBD perubahan Tahun 2017.
- c. Jumlah Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan Tahun 2017 namun masuk pelaksanaannya dalam APBD Tahun 2017.
- d. Jumlah presentase Program dan Kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Tahun 2017.
- e. Jumlah Persentase Program dan Kegiatan yang tidak termuat atau tidak terangkum dalam RKPD perubahan Tahun 2017 namun pelaksanaannya dalam APBD Perubahan Tahun 2017.
- f. Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

Evaluasi RKPD Perubahan Tahun 2017 ini berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 122 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 101 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 11 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Tahun 2017 adalah 10 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 90,98 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,20 %.

2. DINAS KESEHATAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 69 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD perubahan Tahun 2017 adalah 10 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah presentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 85,51 % dan jumlah Presentase kegiatan di luar RKPD Perubahan 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1,45 %.

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,70 %.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 212 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 165 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 24 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 89,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 11,32 %.

5. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 62 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 98,39 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,84 %.

6. DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 29 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 29 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah

100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

9. DINAS SOSIAL

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD

Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,11 %.

10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,94 %.

11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 48 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 44 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,83 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,17 %.

12. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 31 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 91,89 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,11 %.

13. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 26 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 96,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7,69 %.

15. SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 129 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Tahun Perubahan 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 20 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 15 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 84,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 11,63 %.

16. SEKRETARIAT DPRD

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 38 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

17. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 46 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,65 % dan

jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,17 %.

18. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 87 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 77 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 91,95 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3,45 %.

19. INSPEKTORAT KABUPATEN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 30 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 9,09 %.

20. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3,92 %.

21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,70 %.

22. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,26 %.

23. KECAMATAN SEPANG

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 52 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 92,31 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0,00 %.

24. KECAMATAN TEWAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 96,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,00 %.

25. KECAMATAN MANUHING

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94,44 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5,56 %.

26. KECAMATAN RUNGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 39 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,76 %.

27. KECAMATAN MIHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2016 adalah 98,04 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1,96 %.

28. KECAMATAN RUNGAN HULU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 98,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan

Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 9,26 %.

29. KECAMATAN DAMANG BATU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 32 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,06 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,94 %.

30. KECAMATAN MANUHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,38 %.

31. KECAMATAN MIRI MANASA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 90,70 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,33 %.

32. KECAMATAN KURUN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 79 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 75 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,47 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,53 %.

33. KECAMATAN RUNGAN BARAT

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,35 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 16,28 %.

34. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 78 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 71 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan

Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 93,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,56 %.

35. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 96,08 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5,88 %.

36. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,22 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 5,56 %.

- 37. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,26 %.
- 38. DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 97,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 7,50 %.
- 39. DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN**
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 39 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 94,87 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan

Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,56 %.

40. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 6 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 92,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 12,00 %.

41. DINAS PERIKANAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 41 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,12 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 4,88 %.

42. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2017 adalah 4 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,51 %.

Tabel Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Beberapa permasalahan makro yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan pembangunan daerah antara lain adalah :

1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (Governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan).
2. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat besar;
3. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
4. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
5. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
6. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
7. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
8. Proses desentralisasi masih belum berjalan.
9. Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.
10. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya alam.
11. Masalah Stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Adapun tanda-tanda Stunting adalah :
 - Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya;

- Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya;
 - Berat badan rendah untuk anak seusianya;
 - Pertumbuhan tulang tertunda;
- Pada tahun 2016 angka Stunting di Kabupaten Gunung Mas masih tinggi. Angka stunting di Gunung Mas berada di urutan ke-6 di Kalimantan Tengah yaitu 32,6%.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- 1) Urusan Pendidikan
 - a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 8,9 Tahun
 - b) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri
 - c) Tidak meratanya pendistribusian Guru
 - d) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar
 - e) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi

- 2) Urusan Kesehatan
 - a. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional
 - b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat.
 - c) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat
 - d) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
 - e) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya
 - f) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif
 - g) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B

- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
 - b) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru

- c) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
 - d) Lemahnya perlindungan sumber mata air
 - e) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesantitasian
 - f) Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
 - g) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - i) Belum adanya TPS di tiap kecamatan
 - j) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang
 - k) Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik hanya 24,51 % Tahun 2017
 - l) Rendahnya kualitas jalan perdesaan
 - m) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun
 - n) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan
 - b) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat
 - b) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
 - c) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
 - d) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS
- 6) Sosial
- a) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
 - b) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
 - c) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah

- 7) Tenaga Kerja
 - a) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha
 - b) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru

- 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - b. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan
 - c. Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak
 - d. Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

- 9) Pertanahan
 - a. Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 - b. Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
 - c. Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan

- 10) Lingkungan Hidup
 - a) Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan lahan (terutama karena penambangan liar)
 - b) Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah
 - c) Lemahnya fungsi pengendalian
 - d) Masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

- 11) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil
 - b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil

- 12) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa
 - b) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
 - c) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
 - d) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa
 - e) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
 - f) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
 - g) Belum ditetapkannya target PADes

- 13) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
 - b) Rendahnya usia perkawinan pertama
 - c) Lemahnya institusi KB
 - d) Terbatasnya pembinaan ketahanan keluarga
 - e) Lemahnya data kependudukan

- 14) Perhubungan
 - a) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan
 - b) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten

- 15) Komunikasi dan Informatika
 - a) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel

- b) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel
 - c) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
 - d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan E Government
- 16) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi
 - b) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
 - c) Masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi
 - d) Terbatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainnya
 - e) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan
 - f) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha
 - g) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM
 - h) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk
- 17) Penanaman Modal
- a) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang mendukung
 - b) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu
 - c) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
 - d) Lemahnya data dan informasi penanaman modal
 - e) Rendahnya promosi investasi penanaman modal
- 18) Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet
 - b) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjangkaran, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

- d) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional

19) Statistik

- a) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
- b) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah

20) Kebudayaan

- a) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global
- b) Belum optimalnya proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah
- c) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif
- d) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan

21) Perpustakaan

- a) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
- c) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)

22) Kearsipan

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan
- b) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)

23) Kehutanan

- a) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya
- b) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah

24) Kelautan dan Perikanan

- a) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut

- b) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan

25) Pariwisata

- a) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal
- b) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
- c) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata
- d) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

26) Pertanian

- a) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian
- b) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun
- c) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier
- d) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha
- e) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas
- f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- g) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan
- h) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- i) Kurangnya sumber daya penyuluh pertanian
- j) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian terpadu (Integrated farming System)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik
- k) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian
- l) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancer
- m) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan local

- n) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis)
- o) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik
- p) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah)
- q) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertanian organik

27) Perdagangan

- a) Belum terbentuknya lembaga kemetrolgian
- b) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
- c) Belum adanya pasar induk kabupaten
- d) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL

28) Perindustrian

- a) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sector ekonomi daerah
- b) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri
- c) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku
- d) Akses teknologi terbatas

29) Administrasi Pemerintahan

- a) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran
- b) Reformasi birokrasi belum optimal
- c) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja
- d) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja

30) Perencanaan

- a) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
- b) Lemahnya data dan informasi pembangunan
- c) Sistem Perencanaan belum terintegrasi dengan Sistem Penganggaran

- d) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

31) Keuangan

- a) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
- b) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan
- c) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi
- d) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal

32) Kepegawaian

- a) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- b) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional
- c) Masih rendahnya disiplin aparatur
- d) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur
- e) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun
- f) Kekurangan pegawai untuk formasi tertentu

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)(Triwulan I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)								(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																												
1.01	Bidang Pendidikan																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi sknd	26.317.856.700	19.789.828.247	3.912.173.054	267.593.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.593.934	8,84%	20.057.422.181	76,21%				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Penyediaan jasa surat menyurat				16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				281.618.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				34.534.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				57.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan alat tulis kantor				242.143.200	60.087.000	60.087.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				112.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan bahan logistik kantor				28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				480.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran				927.327.622	207.506.934	207.506.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)				625.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kurun *)				124.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Teguh *)				110.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Sepang *)				77.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara *)				65.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rungan *)				103.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhing *)				92.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Mihing Raya *)				67.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Damang Batu *)				89.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Miri Manasa *)				77.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rungan Hulu *)				73.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhing Raya *)				77.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rungan Barat *)				81.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	10.125.540.000	1.943.745.600	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.943.745.600	19,20%				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	1.635.000.000	721.141.409	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	721.141.409	44,11%				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	517.400.000	621.808.110	249.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	621.808.110	120,18%				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)				33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				

NO	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d RKPD tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir Pelaksanaan Tahun Pelaksanaan RKPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.			K	Rp.
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
(1)	Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						345.791.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						148.923.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						174.199.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						208.578.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						137.016.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						125.530.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						11.131.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						228.978.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						193.106.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						119.965.500											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						23.537.500											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						139.968.000											Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pemeliharaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas 1)						42.780.000											Dinas Kesehatan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.566.756.444	9.751.285.904											Dinas Kesehatan		
	Pemediaan jasa surat menyurat																	Dinas Kesehatan		
	Pemediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik																	Dinas Kesehatan		
	Pemediaan jasa administrasi keuangan																	Dinas Kesehatan		
	Pemediaan jasa kebersihan kantor																	Dinas Kesehatan		
	Pemediaan alat tulis kantor																	Dinas Kesehatan		
	Pemediaan barang cetakan dan pengandaian																	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penundang-undangan																	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan bahan logistik kantor																	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan makanan dan minuman																	Dinas Kesehatan		
	Rapat/koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis																	Dinas Kesehatan		
	Perkantoran																	Dinas Kesehatan		
	Rapat/rapat koordinasi ke dalam daerah 1)																	Dinas Kesehatan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparaturnya mendukung pelayanan kepada masyarakat				864.511.194	1.191.029.792											Dinas Kesehatan		
	Pencapaian keterbacaan rumah ibadah/dinas																	Dinas Kesehatan		
	Pencapaian peredaran gedung kantor																	Dinas Kesehatan		
	Pencapaian peralatan gedung kantor																	Dinas Kesehatan		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas																	Dinas Kesehatan		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil labatan																	Dinas Kesehatan		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																	Dinas Kesehatan		
	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan paksaan dinas PNS				13.200.000	39.046.355											Dinas Kesehatan		
	Pengadaan paksaan khusus hari-hari tertentu																	Dinas Kesehatan		

NO	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2018)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%Triwulan I)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			K			Rp.			K			Rp.			K					Rp.		
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi	1.836.000.000	708.277.792	473.400.000	65.650.035				65.650.035	13 = 127,110%	774.127.817	14 = 6 * 12	15 = 14,5 x 100 %	42,16%	RSUD						
	Pendidikan dan pelatihan formal																					
	Masana Studi Bimbingan/Kelas Sibatik Non Formal																					
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	78.738.000	154.941.419	153.400.000	65.650.035				65.650.035	0,00%	154.941.419		196,65%	RSUD							
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun																					
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)				49.975.000											RSUD						
	Pemutakhiran data aset, kepegawain dan keuangan				4.125.000											RSUD						
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)				3.550.000											RSUD						
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat dan perbekalan kesehatan	2.125.762.096	3.009.382.103	12.782.000											RSUD						
	Penaksanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan				130.270.900											RSUD						
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15.299.740.668	16.744.286.656	200.000.000											RSUD						
	Peningkatan kesehatan masyarakat				200.000.000											RSUD						
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	150.300.000	46.908.000	94.100.000											RSUD						
	Sosialisasi dan Promosi E-vent Kesehatan				94.100.000											RSUD						
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pertanahan pengembangan lingkungan sehat	3.437.200.000	61.683.155	15.324.000											RSUD						
	Penilaian pengembangan lingkungan sehat				15.324.000											RSUD						
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	tersedia dokumen standar pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan pada rsud kuala kurun dan penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	403.966.336	84.069.140	201.695.000											RSUD						
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan				11.608.900											RSUD						
	Pengujian dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan				201.695.000											RSUD						
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	tersedianya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan tersedia bahan-bahan logistik yang tersedia pada tiap unit pelayanan	32.446.328.234	15.828.118.287	5.380.019.999											RSUD						
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, naco, basin, laundry, ruang bucu dan lain-lain)				60.000.000											RSUD						
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *)				5.380.019.999											RSUD						
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan rumah sakit; pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit; pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rsud kuala kurun pada tiap unit pelayanan; dan pemeliharaan rutin/ berkala peringkasan penunjang rsud kuala kurun pada tiap unit pelayanan	2.687.646.000	820.363.130	150.923.034											RSUD						
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit				150.923.034											RSUD						
	Pemeliharaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan *)				3.613.000.000											RSUD						
	Pemeliharaan Dokumen Akreditasi *)				1.619.098.995											RSUD						
	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD *)				221.248.050											RSUD						
	Pelaksanaan dan pendataan pelayanan *)				82.100.000											RSUD						
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	160.000.000	696.725.080	40.400.000											RSUD						
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sejalan Sehat (USSH)				40.400.000											RSUD						
103	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.862.632.700	3.960.069.083	3.379.869.420	590.093.283										4.570.162.366	30,33%	DPU				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang direvisi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2018		Realisasi Kinerja s.d Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun Pelaksanaan (RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2018 (Triwulan I)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	Program peningkatan disiplin operator	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Meningkatnya disiplin kerja melalui peningkatan-pengabdian pakailah dinas PNS	346.000.000	22.175.550	21.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	22.175.550	6,41%	Kebangpoel			
	Peningkatan cakupan dinas beserta perenditaannya	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Peningkatan kapasitas & kualitas SOM melalui bimtek & sosialisasi	464.000.000	57.853.772	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	57.853.772	12,47%	Kebangpoel			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya pelatihan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	74.000.000	6.000.000	84.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	6.000.000	8,11%	Kebangpoel			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Tersempainya rencana aksi daerah penanganan gangguan keamanan serta kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	2.494.000.000	1.510.576.900	227.437.500	17.620.000	5.450.000	7.490.000	17.620.000	5.450.000	7.490.000	17.620.000	5.450.000	7.490.000	17.620.000	7,75%	1.528.196.900	61,27%	Kebangpoel			
	Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Peningkatan keamanan dengan aparat keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	39.800.000	38.100.000	39.800.000	5.450.000	38.100.000	39.800.000	5.450.000	38.100.000	39.800.000	5.450.000	38.100.000	39.800.000	5.450.000	16,42%	1.455.109.700	56,18%	Kebangpoel			
	Forum Komunikasi Kecamatan Dan Masyarakat (FKKM)	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat	482.000.000	1.477.306.900	181.301.600	4.710.000	33.040.000	7.650.000	4.710.000	33.040.000	7.650.000	4.710.000	33.040.000	7.650.000	4.710.000	20,48%	1.510.346.900	31,33%	Kebangpoel			
	Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi	2.560.000.000	1.179.764.230	133.492.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	33,60%	1.224.872.230	47,29%	Kebangpoel			
	Forum Pembinaan Kesehatan (FBK)	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi	54.377.000	45.115.000	54.377.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	45.115.000	16,42%	1.455.109.700	56,18%	Kebangpoel			
	Forum Bela Negara (FBN)	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi	2.990.000.000	1.399.349.730	339.492.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	55.760.000	18,48%	1.455.109.700	56,18%	Kebangpoel			
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi	53.710.000	46.690.000	53.710.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	46.690.000	8,68%	46.690.000	8,68%	Kebangpoel			
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi	55.210.000	8.900.000	55.210.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	16,12%	8.900.000	16,12%	Kebangpoel			
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi	53.295.000	123.747.000	53.295.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	123.747.000	23,27%	562.271.200	39,99%	Kebangpoel			
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Untuk Memperkukuh Ikrar Bertanah Airak Bangsa Tingkat Provinsi Karang	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	2.456.000.000	911.801.300	302.651.500	70.469.000	70.469.000	70.469.000	70.469.000	70.469.000	70.469.000	70.469.000	70.469.000	70.469.000	70.469.000	28,70%	911.801.300	37,13%	Kebangpoel			
	Penyusunan data base partai politik	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	25.701.500	2.600.000	25.701.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	10,12%	2.600.000	10,12%	Kebangpoel			
	Peningkatan Demokrasi	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	53.025.000	38.124.600	53.025.000	38.124.600	38.124.600	38.124.600	38.124.600	38.124.600	38.124.600	38.124.600	38.124.600	38.124.600	38.124.600	7,19%	38.124.600	7,19%	Kebangpoel			
	Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	121.500.000	26.690.000	121.500.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	26.690.000	22,06%	26.690.000	22,06%	Kebangpoel			
	Pelatihan Teknis dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Ormas dan Partai	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	51.125.000	3.055.000	51.125.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	6,00%	3.055.000	6,00%	Kebangpoel			
	Desk Piliada Kabupaten Gunung Mas	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	51.500.000	7.440.000	51.500.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	14,45%	7.440.000	14,45%	Kebangpoel			
	Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	119.989.900	5.600.000	119.989.900	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	4,67%	5.600.000	4,67%	Kebangpoel			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan Sosial Budaya	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	51.500.000	1.940.000	51.500.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	3,77%	1.940.000	3,77%	Kebangpoel			
	Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	2.352.522.000	633.333.950	51.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	633.333.950	26,92%	Kebangpoel			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan Sosial Budaya	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	51.500.000	820.911.335	51.500.000	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	15,92%	820.911.335	15,92%	Kebangpoel			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Terlaksananya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP tgg Ormas & LSM	4.565.542.900	3.510.125.710	4.078.362.766	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	820.911.335	18,20%	4.431.037.045	97,05%	Sampurip			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang divaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja yang divaluasi (2018)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Triwulan I)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator kinerja program (Output/Keluaran/Kegiatan)	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimbingan & sosialisasi	227.078.000	81.186.107	132.000.000	-	-	-	-	-	-	-	132.000.000	0,00%	81.186.107	35,75%	Desudicapai	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					132.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja		Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	74.480.528	20.199.800	18.945.000	-	-	-	-	-	-	-		0,00%	20.199.800	27,12%	Desudicapai	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD					6.105.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					6.660.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD					6.150.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Peningkatan pelayanan publik bagi kemajuan suatu daerah	1.083.887.523	2.699.984.436	1.401.480.000	50.579.000	50.579.000	50.579.000	50.579.000	50.579.000	50.579.000	50.579.000		3,61%	2.750.263.436	253,77%	Disudicapai	
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, update dan pemeliharaan)					174.100.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000						
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan					173.700.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000						
	Pengolahan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan					32.879.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000						
	Peleaksanaan kegiatan kependudukan					120.600.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Pelayanan Administrasi Kependudukan					900.201.000	18.748.000	18.748.000	18.748.000	18.748.000	18.748.000	18.748.000	18.748.000		0,65%	650.039.500	347,69%	Disudicapai	
	Program Pencetakan Sipil		Terlaksananya Pencetakan Sipil Berdasarkan Masalah	186.559.240	623.584.500	246.150.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000						
	Pendaftaran dan Pelayanan Pencetakan Sipil Perkawinan dan Perceraian					48.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Pendaftaran dan Pelajaran Aka Kekawinan					157.350.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000	24.455.000						
	Pelayanan Bidang Perubahan Status Anak					42.800.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Penyusunan dan Kerangka					38.000.000	-	-	-	-	-	-	-		0,00%	61.013.899	0,00%	Disudicapai	
	Program Pendaftaran Produk					38.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Pendaftaran Pelayanan Produk					38.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
2/07	Bidang Pembudayaan Masyarakat Desa																		
	Program Pelayanan Administrasi Perumahan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perumahan	7.149.210.200	1.641.179.864	1.842.334.000	341.216.410	341.216.410	341.216.410	341.216.410	341.216.410	341.216.410	341.216.410		18,52%	1.982.398.274	27,73%	DPMD	
	Benedikan jasa surat monevut					9.898.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000						
	Benedikan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					289.200.000	27.898.400	27.898.400	27.898.400	27.898.400	27.898.400	27.898.400	27.898.400						
	Benedikan jasa kebersihan kantor					6.485.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000						
	Benedikan alat tulis kantor					119.222.098	26.285.150	26.285.150	26.285.150	26.285.150	26.285.150	26.285.150	26.285.150						
	Benedikan barang cetakan dan pencetakan					69.960.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000						
	Benedikan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					2.000.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000						
	Benedikan peralatan dan perlengkapan kantor					71.000.199	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000						
	Benedikan bahan becaan dan perabot perundang-undangan					9.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Benedikan bahan logistik kantor					43.100.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000						
	Benedikan alat komunikasi dan koneksi ke luar daerah					300.000.000	24.453.000	24.453.000	24.453.000	24.453.000	24.453.000	24.453.000	24.453.000						
	Benedikan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis					699.659.312	169.416.890	169.416.890	169.416.890	169.416.890	169.416.890	169.416.890	169.416.890						
	Bekas-kantor					240.000.000	64.345.000	64.345.000	64.345.000	64.345.000	64.345.000	64.345.000	64.345.000						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana prasarana aparatr untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	3.003.100.000	513.636.000	79.400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		0,51%	514.036.000	17,12%	DPMD	
	Pengadaan peralatan gedung kantor					8.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Pembelajaran dan/berkala gedung kantor					6.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Pembelajaran dan/berkala mobil layanan					25.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Pembelajaran dan/berkala kendaraan dinas/operasional					30.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Pembelajaran dan/berkala peralatan gedung kantor					8.400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000						
	Program peningkatan disiplin aparatr		Meningkatnya disiplin kerja melalui pengisian-pengisian pakatan dinas PNS	285.500.000	24.000.000	64.200.000	-	-	-	-	-	-	-		0,00%	24.000.000	8,40%	DPMD	
	Pengadaan cakupan dana beasiswa perkembangannya					32.130.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Rehabilitasi kawasan khusus habitat lingkungan					32.130.000	-	-	-	-	-	-	-						
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja		Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	53.990.000	16.238.800	15.200.000	-	-	-	-	-	-	-		0,00%	16.238.800	17,28%	DPMD	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD					1.480.000	-	-	-	-	-	-	-						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lahir (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang direvisi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Realisasi Tahun Pelaksanaan RKPD		Target Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD s.d tahun 2018 (3xTriwulan I)		Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	1.150.000.000	61.792.600	112.000.000	23.648.100					23.648.100			23.648.100	21,11%	14 = 0 + 12	85.440.700	7,43%			Dishub		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan	Tertindakannya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan	210.000.000	67.394.000	112.000.000	23.648.100						23.648.100			23.648.100	0,00%	13 = 12,7 x 1,02					Dishub		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD		23.800.000		2.050.000																		Dishub	
	Penyusunan laporan keuangan sementara		2.050.000		2.500.000																		Dishub	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		2.500.000		12.250.000																		Dishub	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD		12.250.000		12.250.000																		Dishub	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPERA)		12.900.000		12.900.000																		Dishub	
	Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	peningkatan kelancaran arus transportasi	3.200.000.000	3.212.642.700	11.000.000	10.900.000					10.900.000			10.900.000	99,09%	3.223.542.700	100,74%			Dishub			
	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan		11.000.000		11.000.000																		Dishub	
	Demoa Sungai		10.900.000		10.900.000																		Dishub	
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan sarana prasarana angkutan	10.315.000.000	1.391.328.438	239.498.000	58.597.000						58.597.000			58.597.000	0,00%							Dishub	
	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan		82.269.000		82.269.000																		Dishub	
	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas		51.600.000		51.600.000																		Dishub	
	Pelatihan Petugas Parkir		12.265.000		12.265.000																		Dishub	
	Sosialisasi dan Pemertahan Simpatik Transportasi Sungai		43.302.000		43.302.000																		Dishub	
	Panorama dan Benda Cagar Budaya (LASIP)	Jumlah Fasilitas Peningkatan keselamatan lalu lintas	5.100.000.000	2.979.184.373	437.667.000	18.680.000						18.680.000			18.680.000	4,27%	2.997.864.373	58,78%					Dishub	
	Program pemeliharaan dan pengembangan lalu lintas				50.000.000																		Dishub	
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas				127.500.000																		Dishub	
	Pengadaan Marka Jalan (DNU)				200.000.000																		Dishub	
	Perawatan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan				49.000.000																		Dishub	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				95.187.000							18.680.000			18.680.000	19,14%	27.150.000	0,00%					Dishub	
	Program peningkatan keselamatan pemodobatan kendaraan bermotor				141.815.700							27.150.000			27.150.000								Dishub	
	Pengadaan Mekanis dan Administrasi Penguji Kendaraan Bermotor				57.785.700																		Dishub	
	Sosialisasi Penguji Kendaraan Bermotor				8.600.000																		Dishub	
	Pengadaan Perengkapan Peralatan Pendukung Penguji Kendaraan Bermotor				40.000.000																		Dishub	
2-10	Budaya Komunikasi dan Informatika																							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.263.226.298	1.045.078.340	227.750.612							227.750.612			227.750.612	21,79%	1.490.986.110	0,00%					Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian jasa surat menyurat			4.500.000			1.125.000					1.125.000			1.125.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			67.000.000			11.795.552					11.795.552			11.795.552								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian jasa kebersihan kantor			11.796.000			2.810.000					2.810.000			2.810.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian jasa perbaikan peralatan kerja			25.254.340			6.324.000					6.324.000			6.324.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian alat tulis kantor			56.577.112			35.346.112					35.346.112			35.346.112								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian barang ceakan dan penggantian			5.550.000			1.590.000					1.590.000			1.590.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			7.350.000			2.550.000					2.550.000			2.550.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian perbaikan dan perlengkapan kantor			58.820.000			15.390.000					15.390.000			15.390.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian bahan bacaan dan peraturan pendukung-undangan			28.400.000			4.755.000					4.755.000			4.755.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian bahan logistik kantor			57.150.000			8.200.000					8.200.000			8.200.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			120.000.000			37.660.000					37.660.000			37.660.000								Dikomininfo Statistik & Persandian	
	Penyelesaian jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis			548.640.888			90.625.148					90.625.148			90.625.148								Dikomininfo Statistik & Persandian	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)(Triwulan I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(12)=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		(16)	(17)				
		Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)						35.000.000		9.650.000						9.650.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					133.839.000	350.285.000		3.800.000						3.800.000		1,08%			137.639.000		0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pembangunan gedung kantor						300.000.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						7.765.000		1.800.000						1.800.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						42.500.000		2.000.000						2.000.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program peningkatan disiplin aparatur						23.000.000		22.500.000						22.500.000		97,83%			22.500.000		0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						23.000.000		22.500.000						22.500.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					127.318.800	84.000.000		7.520.000						7.520.000		8,95%			134.838.800		0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pendidikan dan pelatihan formal						84.000.000		7.520.000						7.520.000											Diskominfo Statistik & Persandian	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian					81.834.000	47.845.000		2.100.000						2.100.000		4,39%			83.934.000		0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						2.200.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						2.200.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)						22.845.000		2.100.000						2.100.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)						20.800.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					920.000.000	1.546.933.671		238.275.000						9.600.000		4,03%			1.556.533.671		169,19%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming (LPPL Radio Hamauh*)						30.000.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio Rekaman *)						165.075.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pendataan desa yang tidak bersignal *)						43.200.000		9.600.000						9.600.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program kerjasama informasi dengan mas media					550.000.000	209.181.800		35.000.000						-		0,00%			209.181.800		38,03%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat dan Peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi						35.000.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)					16.969.000.000	13.347.927.536		3.922.855.000						142.701.975		3,64%			13.490.629.511		79,50%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah *)						3.424.500.000		38.133.289						38.133.289										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pembinaan dan pengelolaan radio *)						460.500.000		99.213.688						99.213.688										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruang *)						37.855.000		5.355.000						5.355.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah*)					211.603.000	156.890.000		3.680.000						3.680.000		2,35%			215.283.000		0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pemenuhan SDM Sandi Daerah melalui Keikutsertaan dalam Diklat Teknis Persandian, Diklat Pembentukan Sandiman dan Diklat Fungsional Sandiman*)						86.000.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pengamanan informasi strategis *)						22.890.000		3.680.000						3.680.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Penyelenggaraan Persandian Daerah *)						48.000.000		-						-										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi *)						410.062.400		82.206.600						82.206.600		20,05%			82.206.600		0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
		Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *)						278.712.400		34.372.000						34.372.000										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pengendalian Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *)						112.900.000		37.834.600						37.834.600										Diskominfo Statistik & Persandian		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE *)						18.450.000		10.000.000						10.000.000										Diskominfo Statistik & Persandian		

NO	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang diawalkan (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja yang diawalkan (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD tahun 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Pelaksanaan (RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (K/Triwulan I)	(15)	(17)	
						I	II	III	IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik *)	Pengkajian dan Pengembangan Tatakelola E-Government *)		84.894.518	34.500.000	-	-	-	-	-	-	84.894.518	0,00%	0,00%	Dikomitmenkan Saran & Pendaan	
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)			31.109.280	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	12,13%	0,00%	Persiapan Saran & Pendaan	
	Program Aplikasi dan Informasi *)	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)			31.109.280	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	12,13%	0,00%	Dikomitmenkan Saran & Pendaan	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)		16.969.000.000	128.845.000	35.996.400	35.996.400	35.996.400	35.996.400	35.996.400	35.996.400	35.996.400	20,08%	0,00%	Dikomitmenkan Saran & Pendaan	
	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hilir *)	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hilir *)			84.596.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3,15%	101,33%	Dikomitmenkan Saran & Pendaan	
	Program Kerjasama Informasi dengan mas media	Program Kerjasama Informasi dengan mas media		85.000.000	270.000.000	-	-	-	-	-	-	85.000.000	0,00%	0,00%	Dikomitmenkan Saran & Pendaan	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Terpadu *)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Terpadu *)		6.000.000	1.490.000	-	-	-	-	-	-	1.490.000	0,00%	24,63%	Dikomitmenkan Saran & Pendaan	
	Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan rtdm alat/material teknologi komunikasi dan informasi *)	Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan rtdm alat/material teknologi komunikasi dan informasi *)			1.490.000	-	-	-	-	-	-	1.490.000	0,00%	0,00%	Dikomitmenkan Saran & Pendaan	
2-11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkeranan		989.689.749	1.198.753.104	220.648.611	220.648.611	220.648.611	220.648.611	220.648.611	220.648.611	220.648.611	18,41%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan jasa surat menyurat			3.300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	13,64%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			127.800.000	16.138.995	16.138.995	16.138.995	16.138.995	16.138.995	16.138.995	16.138.995	12,62%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan			1.800.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2,22%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor			8.125.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	27,93%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan alat tulis kantor			81.750.990	5.137.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000	6,28%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan barang cedakan dan pengadaan			30.825.140	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	2,60%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan			65.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1,23%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			11.000.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	17,05%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan bahan logistik kantor			30.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6,67%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Rak/rakel koordinat dan konsultasi ke luar daerah			316.000.000	67.015.800	67.015.800	67.015.800	67.015.800	67.015.800	67.015.800	67.015.800	21,24%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis			404.692.494	100.148.116	100.148.116	100.148.116	100.148.116	100.148.116	100.148.116	100.148.116	24,74%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Perkantoran			1.000.000.000	34.775.000	34.775.000	34.775.000	34.775.000	34.775.000	34.775.000	34.775.000	3,48%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Rak/rakel koordinat ke dalam daerah *)			1.000.000.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000	1,10%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		288.296.500	238.955.000	-	-	-	-	-	-	238.955.000	83,23%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat			238.955.000	-	-	-	-	-	-	238.955.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penataan lingkungan gedung kantor			78.500.000	-	-	-	-	-	-	78.500.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penataan peralatan gedung kantor			67.800.000	-	-	-	-	-	-	67.800.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Pemeliharaan mobil/bekas mobil gedung kantor			18.655.000	-	-	-	-	-	-	18.655.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Pemeliharaan mobil/bekas mobil labatan			25.000.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	27,48%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM		
		Pemeliharaan mobil/bekas kendaraan dinas/korporasi			30.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM		
		Pemeliharaan mobil/bekas kendaraan dinas/korporasi			23.000.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	16,83%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM		
		Program peningkatan disiplin aparatur			68.500.000	-	-	-	-	-	-	68.500.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Meningkatkan disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan paksaan dinas PNS			68.500.000	-	-	-	-	-	-	68.500.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		71.580.800	113.500.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	18,47%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi			113.500.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	18,47%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			113.500.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	20.966.000	18,47%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan		11.860.000	27.675.000	-	-	-	-	-	-	27.675.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	
		Penyusunan kebijakan keuangan sekretariat			2.900.000	-	-	-	-	-	-	2.900.000	100,00%	0,00%	Ditranstanskerop & UKM	

NO	Usuran/Bidang Ususan Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang direvisi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Pelaksanaan (RKPD)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (K/T Trwulan I)	(16)	(17)	
						I	II	III	IV							
																K
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Penyusunan delagasi keuangan akhir tahun				2.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Penyusunan laporan Renstra, Renja, RK4 dan DPA-Scop				6.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				2.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Penyusunan Delagasi Fiskal dan Keuangan-Scop				13.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Program pencapaian iklim usaha Kecil Mengengah yang k		977.237.730	926.518.098	436.750.000	44.433.000	-	-	-	44.433.000	-	10,18%	970.971.098	99,58%	Distrensakerpog & UKM	
	Ydk akur				54.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Penilaian dan Penguatan KSPUSP-Koperasi				46.000.000	9.530.000	-	-	-	9.530.000	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Bombongan Pengkajian Nilai tambah Produk Usaha kecil				35.400.000	1.810.000	-	-	-	1.810.000	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Menambah				66.000.000	12.600.000	-	-	-	12.600.000	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Penilaian dan Monitoring Kelembagaan Koperasi				42.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Rapatb Teknis Operator dabn Perenbt Jin Usaha Mikro Kecil dan Menengah				79.700.000	11.315.000	-	-	-	11.315.000	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Pembinaan Perjanjian Kerjasama Kemiraan/Plasma antar Kelompok Desa/Desubinaan Besar Kelapa sawit				18.400.000	2.750.000	-	-	-	2.750.000	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Pemanfaatan Pasar Rakyat				74.000.000	6.448.000	-	-	-	6.448.000	-	7,33%	1.087.357.800	47,00%	Distrensakerpog & UKM	
	Program Penguatan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha		2.313.644.000	1.078.716.000	117.895.000	8.642.800	-	-	-	8.642.800	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Monitoring Dana Baku/ur				36.000.000	7.057.600	-	-	-	7.057.600	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Penyelenggaraan Lomba Tangkas Terampil Tingkat SLTA				32.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Pendidian UKM				47.000.000	1.585.000	-	-	-	1.585.000	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		1.306.455.600	258.769.000	74.875.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	258.769.000	19,81%	Distrensakerpog & UKM	
	Perwakilan Jnda Bayar Ramadahan dan Bazat Nhai				36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Bombong Penugasan Nilai Tambah Produk Usaha Kecil				36.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Menambah dan Benhedian Alat Komsan Masnana				54.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
	Program pencapaian iklim usaha Kecil Mengengah yang k		480.000.000	275.337.500	54.550.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	275.337.500	57,36%	Distrensakerpog & UKM	
	Sosialisasi kebhiaan tentang Usaha Kecil Mengengah				54.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Distrensakerpog & UKM		
2.12	Bidang Pemukiman Masal				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pelayanan Administrasi Perumahan			1.103.761.125	1.000.766.322	164.630.332	-	-	-	164.630.332	-	18,45%	1.288.431.477	0,00%	DPMRTSP	
	Penyediaan jasa surt menurat				3.450.000	1.650.000	-	-	-	1.650.000	-	-	-	DPMRTSP		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				102.000.000	20.958.636	-	-	-	20.958.636	-	-	-	DPMRTSP		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				15.045.000	3.985.000	-	-	-	3.985.000	-	-	-	DPMRTSP		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				7.018.248	3.200.000	-	-	-	3.200.000	-	-	-	DPMRTSP		
	Penyediaan alat tulis kantor				66.810.110	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP		
	Penyediaan bahan cetak dan pencandaaan				75.100.000	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	DPMRTSP		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undaaan				6.300.000	1.575.000	-	-	-	1.575.000	-	-	-	DPMRTSP		
	Penyediaan bahan logistik kantor				26.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP		
	Rakot-nakil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				164.000.000	44.733.400	-	-	-	44.733.400	-	13,47%	259.633.000	0,00%	DPMRTSP	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis				400.642.464	99.973.116	-	-	-	99.973.116	-	-	-	DPMRTSP		
	Perkantoran				90.000.000	8.125.000	-	-	-	8.125.000	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Rakot-carakil koordinasi ke dalam daerah				2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP		
	Pemetaan Administrasi Keceawaaan			227.633.000	200.000	32.000.000	-	-	-	32.000.000	-	-	-	DPMRTSP		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				237.543.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembadaan perlengkapan gedung kantor				32.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Pembadaan peralatan gedung kantor				127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Pembelian rdn/benkala gedung kantor				10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Pembelian rdn/benkala mobil jabatan				25.000.000	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Pembelian rdn/benkala kendaraan dinas/operasional				20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Pengadaan Pagar dan Pematang Halaman				23.543.678	23.000.000	-	-	-	23.000.000	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Geduld/arsnaki/Rnrah				16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Program Peningkatan disiplin aparatur				16.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	37.200.000	0,00%	DPMRTSP	
	Pengadaan sarana rumah karitaki benentu				15.000.000	-	-	-	-	-	-	12,89%	121.064.300	0,00%	DPMRTSP	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			111.898.410	72.000.000	9.365.990	-	-	-	9.365.990	-	-	-	-	DPMRTSP	
	Maratna sidi/ ban/dukun/uruss/ smpat non formal				72.000.000	9.365.990	-	-	-	9.365.990	-	-	-	-	DPMRTSP	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang direvisi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir tahun 2018 (K/ATriwulan I)	Paragraf Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
						I	II	III	IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	2014 s.d 2019	RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang direvisi (2018)	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir tahun 2018 (K/ATriwulan I)	Paragraf Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD				1.650.000	978.000				978.000						
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun				1.150.000	1.021.000				1.021.000						
	Penyusunan Laporan Rencana Kerja SKPD				2.550.000	-				-						
	Penyusunan RAKAR/KA Perubahan-SKPD dan DPA/OPPA-SKPD				3.100.000	1.025.000				1.025.000						
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD				1.100.000	-				-						
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPPRA)				18.900.000	-				-						
	Penyusunan Standar Pelaporan Minimal (SPM) SKPD				1.400.000	-				-						
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				592.500.000	27.693.000				27.693.000	4,67%	1.220.218.969	113,45%	DPM/RTSP		
	Pencapaian dan pengembangan decaration modal				72.500.000	4.873.000				4.873.000				DPM/RTSP		
	Pengumpulan dan Updatang Data Investasi Penanaman Modal				147.000.000	22.790.000				22.790.000				DPM/RTSP		
	Program Pengabdian Pelaksanaan Investasi				329.140.000	47.650.000				47.650.000	15,41%	833.748.739	0,00%	DPM/RTSP		
	Pemerataan, pembantu pengawasan pelaksanaan				182.540.000	31.110.000				31.110.000				DPM/RTSP		
	Salah satu modal				126.600.000	10.540.000				10.540.000				DPM/RTSP		
	Penelitian dan analisis investasi				369.975.000	18.741.000				18.741.000				DPM/RTSP		
	Penelitian dan analisis investasi				18.900.000	2.238.000				2.238.000				DPM/RTSP		
	Sosialisasi peraturan pelitiran				11.850.000	-				-				DPM/RTSP		
	Pelayanan terpadu di Kecamatan				107.800.000	-				-				DPM/RTSP		
	Penyusunan Pelayanan Perizinan Online Aplikasi Standar				64.900.000	-				-				DPM/RTSP		
	Bimbingan teknis Aplikasi Standar				45.828.000	2.695.000				2.695.000				DPM/RTSP		
	Pencapaian Pelaksanaan Berusaha Kabupaten/Gurung Mas				38.000.000	13.898.000				13.898.000				DPM/RTSP		
	Pendataan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan				61.000.000	-				-				DPM/RTSP		
	Pelayanan Perizinan MB				2.300.000	-				-				DPM/RTSP		
2-13	Bidang Kependudukan dan Olah Raga															
	Program Pembinaan dan Pemasrykatan Olah Raga															
	Pembinaan dan pengembangan olah raga melalui Bakti PU				21.992.522	-				-	0,00%	893.694.800	316,06%	Diserpora		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				21.992.522	-				-				Diserpora		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.525.796.590	379.449.611				379.449.611	24,87%	1.896.311.098	18,45%	Diserpora		
	Penyediaan jasa surat menyurat				12.800.000	3.375.000				3.375.000				Diserpora		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya a.t dan listrik				64.200.000	13.921.708				13.921.708				Diserpora		
	Penyediaan jasa keprawatan kantor				7.365.000	1.470.000				1.470.000				Diserpora		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				36.080.000	-				-				Diserpora		
	Penyediaan alat tulis kantor				72.458.480	18.113.980				18.113.980				Diserpora		
	Penyediaan barang jabatan dan pengabdian				38.375.000	-				-				Diserpora		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan				8.500.000	-				-				Diserpora		
	Penyediaan bahan dan perlengkapan kantor				93.000.000	-				-				Diserpora		
	Penyediaan bahan bahan dan peralatan pendang-				6.420.000	-				-				Diserpora		
	Penyediaan bahan listrik kantor				42.480.000	-				-				Diserpora		
	Rabat/craet koordinasi dan kontrol ke luar daerah				312.000.000	143.873.900				143.873.900				Diserpora		
	Perencanaan				634.010.100	157.745.026				157.745.026				Diserpora		
	Rabat/craet koordinasi ke dalam daerah				200.000.000	40.950.000				40.950.000				Diserpora		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				93.000.000	-				-	0,00%	118.800.000	2,55%	Diserpora		
	Jumlah sarana prasarana													Diserpora		
	aparatr untuk mendukung													Diserpora		
	pelayanan kepada masyarakat													Diserpora		
	Pemeliharaan dan/berkala gedung kantor				15.000.000	-				-				Diserpora		
	Pemeliharaan dan/berkala kendaraan dinas/operasional				80.000.000	-				-	0,00%	50.678.000	10,28%	Diserpora		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				493.155.000	-				-				Diserpora		
	Peningkatan kapasitas & kualitas													Diserpora		
	SOM melalui bimtek & sosialisasi				84.000.000	-				-				Diserpora		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan pendang-				84.000.000	-				-				Diserpora		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (AKhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)(Triwulan I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(12)=8+9+10+11	13 = 12/7 x 100	14 = 8 + 12	15 = 14/5 x 100 %	(16)	(17)				
	Sosialisasi Statistik Sektoral *)						42.260.000															Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan dan Pengumpulan Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik *)						90.107.000		10.751.000						10.751.000							Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program pengembangan data/informasi *)						67.600.000		-						-	0,00%			0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas *)						67.600.000		-						-							Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah				31.920.000	36.900.000		-						-	0,00%	31.920.000		0,00%			Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Penkanan *)						36.900.000		-						-							Diskominfo Statistik & Persandian		
2:16	Bidang Kebudayaan																							
	Program Pengembangan Nilai Budaya				249.900.000	7.000.000									-	0,00%	249.900.000		0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pendidikan Karakter Budaya Anti Bullying *)					7.000.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	terawat dan terjaganya potensi objek kekayaan budaya kab. Gunung mas	2.519.490.147	479.076.000	336.820.000										-	0,00%	479.076.000		19,01%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala					130.000.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya *)					206.820.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	terlaksananya kegiatan penyelenggaraan festival budaya mihing maanasa se-kab. Gummas	9.821.789.740	4.524.375.500	615.387.000										-	0,00%	4.524.375.500		46,06%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)					615.387.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*)					800.221.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*)					800.221.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Budaya*)	terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah	358.200.000	186.935.000	199.275.000										-	0,00%	186.935.000		52,19%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Festival/Malam Budaya/Kesenian Akhir Tahun*)					199.275.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *)	terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah	391.800.000	19.925.000	19.925.000										-	0,00%	19.925.000		5,09%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *)					19.925.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *)	Terlaksana festival budaya daerah	402.050.000	159.750.000	160.750.000										-	0,00%	159.750.000		39,73%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *)					160.750.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					72.085.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival budaya daerah					72.085.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					81.275.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival budaya daerah					81.275.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					105.000.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)					80.000.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Daerah *)					25.000.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					85.850.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)					85.850.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					76.115.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)					76.115.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					48.640.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)					48.640.000									-							Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					50.290.000									-	0,00%			0,00%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan		

NO	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kelembagaan/Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Anggaran yang direvisi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (akhir pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (%/Trwulan I)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kelembagaan			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.							K	Rp.	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
	Program Pengelolaan festival budaya daerah					50.290.000	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					88.345.000	-																
	Program Pengelolaan kerukunan Festival Miting Manasa ?					88.345.000	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					55.340.000	-																
	Program Pengelolaan festival budaya daerah					55.340.000	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					79.095.000	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					79.095.000	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					79.095.000	-																
	Program Pengelolaan festival budaya daerah					50.725.000	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					50.725.000	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					65.860.960	-																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					65.860.960	-																
	Program Pengelolaan kerukunan Festival Miting Manasa ?					65.860.960	-																
2-17	Bidang Perpusakaan																						
	Program Pelayanan Administrasi Perantoran					2.797.731.200	1.181.598.116					1.329.547.484	317.118.118				317.118.118	23,85%	1.498.716.234	53,57%	Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan jasa surat menyurat					8.100.000	-					8.100.000	2.025.000				2.025.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik					44.540.000	-					44.540.000	3.414.300				3.414.300				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor					50.571.000	-					50.571.000	12.641.000				12.641.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan alat tulis kantor					86.217.000	-					86.217.000	23.375.000				23.375.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian					11.570.000	-					11.570.000	-				-				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					25.905.000	-					25.905.000	6.494.000				6.494.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					168.500.000	-					168.500.000	-				-				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					6.960.000	-					6.960.000	1.275.000				1.275.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan bahan logistik kantor					29.870.000	-					29.870.000	6.600.000				6.600.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					296.000.000	-					296.000.000	110.670.000				110.670.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis					508.814.464	-					508.814.464	109.618.818				109.618.818				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Rapat/rapat koordinasi ke dalam daerah ?					92.500.000	-					92.500.000	41.015.000				41.015.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur					332.352.516	328.230.000					332.352.516	18.350.000				18.350.000	5,53%	346.610.000	81,89%	Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					18.500.000	-					18.500.000	-				-				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Pemeliharaan nundberskala gedung kantor					46.413.275	-					46.413.275	-				-				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Pemeliharaan nundberskala kendaraan dinas/operasional					42.000.000	-					42.000.000	11.900.000				11.900.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Pemeliharaan nundberskala peralatan gedung kantor					13.821.781	-					13.821.781	6.460.000				6.460.000				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					211.817.460	-					211.817.460	-				-				Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Program peningkatan disiplin aparatur					22.050.000	38.500.000					22.050.000	-				38.500.000	0,00%	38.500.000	43,54%	Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Pengadaan pakaian khusus nasional tertentu					22.050.000	-					22.050.000	-				-					Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					312.000.000	174.500.000					312.000.000	20.280.000				20.280.000	15,39%	194.780.000	62,43%	Dinas Perpustakaan, Asip dan Dokumentasi		

NO	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kejadian) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di revisi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di revisi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d akhir pelaksanaan (RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (3 Trwulan I)	Peningkat Daerah Peningkat Jember	Keterangan	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV							K
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tertindakannya pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	16.000.000	18.600.000	132.000.000	20.250.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	20.250.000	2.100.000	2.100.000	9,69%	20.700.000	138,00%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja				21.225.000													Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD				8.400.000		2.100.000				2.100.000							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Penyusunan laporan realisasi anggaran (TEPRA) ?				12.825.000		-				-							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Program Pengembangan Sumber Daya Perpusakaan ?				38.075.000		-				-				0,00%	39.290.000	0,00%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Peatihan Pengelolaan Perpusakaan ?				38.075.000		-				-				0,00%	20.400.000	0,00%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Program Pelelyan Perpusakaan ?				7.500.000		-				-				0,00%	443.085.000	43,80%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Lomba Perpusakaan Desa ?				7.500.000		-				-				0,00%			Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpusakaan	Tertindakannya layanan perpusakaan, lomba bercerita, pelatihan pengelola perpusakaan, pembuatan leaflet, buletin dan koordinasi dalam	1.011.818.400	443.085.000	142.700.000		-				2.400.000	2.400.000	2.400.000	24,90%	14.890.000	133,02%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Pemasaran minat dan keabsahan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar				26.000.000		-				-							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Pengembangan minat dan budaya baca				37.700.000		-				-							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpusakaan umum, perpusakaan khusus, perpusakaan sekolah dan perpusakaan masyarakat				42.500.000		-				-							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				37.500.000		-				-							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
2-18	Bidang Kelembagaan																		
	Program pembinaan rubrikberkala sarana dan prasarana keasip	Tertindakannya pemeliharaan sarana dan prasarana Keasip	9.600.000	12.200.000	10.000.000	2.490.000	2.490.000				2.490.000	2.490.000	2.490.000	24,90%	14.890.000	133,02%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi		
	Pemeliharaan rubrikberkala asip daerah				10.000.000		2.490.000				2.490.000				0,00%	39.300.000	0,00%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Program Pengembangan Sumber Daya Asip ?				94.950.000		-				-				0,00%	89.320.100	0,00%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Workshop Pengelolaan Keasip ?				43.600.000		2.700.100				2.700.100				6,19%		0,00%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Rencana Asip				16.100.000		2.700.100				2.700.100				0,00%		0,00%	Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Subsistansi SCOP ?				27.500.000		-				-							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data ?						-				-							Dinas Perpusakaan, Asip dan Dokumentasi	
3	Urusan Pilihan																		
	Bidang Kelembagaan																		
3-02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.887.000.000	961.343.638	1.270.151.250	271.891.632	271.891.632				271.891.632	271.891.632	271.891.632	21,40%	1.233.205.270	13,88%			
	Pemediaan jasa surat menyurat				1.350.000		1.350.000				1.350.000							Dibutuhkan	
	Pemediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik				69.600.000		3.797.214				3.797.214							Dibutuhkan	
	Pemediaan jasa kebersihan kantor				5.361.620		-				-							Dibutuhkan	
	Pemediaan jasa perbaikan peralatan kerja				55.100.000		7.900.000				7.900.000							Dibutuhkan	
	Pemediaan alat tulis kantor				67.518.000		18.381.000				18.381.000							Dibutuhkan	
	Pemediaan barang cibaan dan pengadaan				36.000.000		6.897.000				6.897.000							Dibutuhkan	
	Pemediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				7.973.670		-				-							Dibutuhkan	
	Pemediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan				14.620.000		330.000				330.000							Dibutuhkan	
	Pemediaan bahan kostik kantor				86.400.000		10.780.000				10.780.000							Dibutuhkan	
	Rab/cara/cak koordinasi dan komunikasi ke luar daerah				290.000.000		97.032.600				97.032.600							Dibutuhkan	
	Pelayanan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / teknis				515.998.088		111.898.818				111.898.818							Dibutuhkan	
	Perkantoran																		
	Rencanakan koordinasi ke dalam daerah ?				110.000.000		14.395.000				14.395.000							Dibutuhkan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparaturnya mendukung pelayanan kepada masyarakat	2.555.000.000	125.120.000	143.207.750	17.020.500	14.395.000				14.395.000	17.020.500	14.395.000	11,89%	142.140.500	5,56%			

NO	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019	Realisasi Kinerja Pinda Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPD yang divaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPD tahun 2018	Realisasi Kinerja s.d Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RPKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Triwulan I)	Pencapaian Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
				I	II	III	IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung objek pariwisata unggulan kab Gunung	6.012.607.800		2.402.478.800	1.633.342.400	-	-	-	-	13 = 127 x 100 0,00%	14 = 6 x 12 2.402.478.800	15 = 145 x 100 % 39,96%	Disperpora		
	Pengembangan Statistik Kepariwisata/Pengumpulan dan Pencatatan Data Keekonomian ¹⁾				80.000.000	80.000.000	-	-	-	-				Disperpora		
	Masteryan Kawasan Wisata Sekota Juri dan Batu Sui ¹⁾				390.000.000	390.000.000	-	-	-	-				Disperpora		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata DAM Sekota Juri ¹⁾				699.650.400	699.650.400	-	-	-	-				Disperpora		
305	Bidang Pertanian															
	Program Pelayan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	6.713.766.690		2.112.529.314	2.054.709.004	382.914.604		382.914.604		18,64%	2.495.444.918	37,17%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa surat menyurat					10.500.000	2.625.000		2.625.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					140.400.000	12.828.472		12.828.472					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan					300.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor					13.575.000	3.565.000		3.565.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					27.961.104	18.475.000		18.475.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan alat tulis kantor					103.380.910	30.000.000		30.000.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian					63.469.200	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan bahan barasan dan peralatan pendukung-undangan					6.120.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan bahan logistik kantor					51.000.000	8.500.000		8.500.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					624.000.000	101.522.400		101.522.400					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis					984.011.790	198.993.732		198.993.732					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah ¹⁾					30.000.000	6.425.000		6.425.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	989.792.700		231.792.000	563.000.000	-		-		0,00%	231.792.000	23,42%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pembangunan gedung kantor					322.000.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengadaan peralatan gedung kantor					161.000.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemeliharaan nontarif kendaraan dinas/operasional					100.000.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	2.232.690.000		238.549.200	184.000.000	-		-		0,00%	238.549.200	10,68%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pendidikan dan pelatihan formal					180.000.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					24.000.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	143.700.000		64.897.172	64.440.000	-		-		0,00%	64.897.172	45,13%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					8.540.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset ¹⁾					60.000.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRVA ¹⁾)					15.900.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja ¹⁾					212.875.000	90.000.000		90.000.000		42,28%	90.000.000	0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan RKAR/KAP dan GP/AGPPA ¹⁾					8.200.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ¹⁾					146.000.000	90.000.000		90.000.000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Pengukuran Kinerja OPD ¹⁾					8.675.000	-		-					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)(Triwulan I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(12)=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		(16)	(17)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *)						50.000.000																Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penilaian terbaik tenaga fungsional petani, pelatihan petani dan petugas, penghargaan ketahanan pangan		1.290.670.000		645.483.500	497.992.900		2.950.000							2.950.000	0,59%		648.433.500			50,24%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Perlindungan tanaman padi dan palawija *)						112.000.000		2.950.000							2.950.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan *)						84.000.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembinaan dan Pengawasan Corporate Social Responsibility (CSR)*)						98.800.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemutakhiran Data Kelembagaan Petani *)						60.000.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pelatihan Lapangan Petani Jahe Merah *)						68.722.900		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sosialisasi Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan*)						74.470.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan dan perkebunan melalui penyediaan dan penetapan sarana produksi pangan daerah		3.630.093.000		16.480.999.227	2.171.870.000		20.425.000							20.425.000	0,94%		16.501.424.227			454,57%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penanganan daerah rawan pangan						16.400.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan						18.550.000		2.515.000							2.515.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan						40.600.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija						1.271.000.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan perbenihan/perbibitan						340.380.000		2.950.000							2.950.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan						42.395.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						60.000.000		14.980.000							14.980.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi *)						56.760.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pameran dan Lomba dalam rangka kegiatan rangka HPS Tingkat Provinsi *)						68.475.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten *)						66.490.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) *)						55.500.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan Sistem Informasi Pasar (PIP) *)						66.000.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengembangan kawasan mandiri pangan *)						49.320.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	meningkatnya SDM dalam hal penerapan teknologi pertanian/perkebunan		1.285.099.000		1.061.896.480	87.990.000		8.700.000							8.700.000	9,89%		1.070.598.480			83,31%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna						8.700.000		8.700.000							8.700.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna						79.290.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan kuantitas hasil pertanian daerah		35.936.834.160		18.925.426.935	3.334.660.000		129.630.000							129.630.000	3,89%		19.055.056.935			53,02%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						100.500.000		7.200.000							7.200.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan *)						500.000.000		4.100.000							4.100.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pendampingan kegiatan APBN dan kegiatan APBD *)						245.280.000		40.325.000							40.325.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Refreshing Pengolahan data statistik dan informasi pertanian/perkebunan						82.000.000		17.390.000							17.390.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembinaan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha						96.000.000		12.660.000							12.660.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembinaan kawasan produksi perkebunan *)						74.000.000		13.500.000							13.500.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembangunan Batang Bawah Karet *)						95.280.000		-							-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) komoditas perkebunan *)						45.500.000		2.820.000							2.820.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

NO	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang diavalusi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang diavalusi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Triwulan I)	Peningkat Daerah Peninggung Jawab	Keterangan
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV						
									Rp.	Rp.	Rp.	Rp.						
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan *)	Dokumen pemantauan dan peta rawan pangan dan jumlah desa mandul/bahaya	211.250.000	27.605.900	16.000.000	-	-	-	-	-	-	13 ± 127 x 100 0,00%	14 ± 8 ± 12 27.605.900	15 ± 145 x 100 % 13,07%	(18)	(19)		
	Analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (SSVA) *)				16.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian *)	jumlah terapan teknologi pertanian	370.000.000	65.965.000	107.785.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	65.965.000	17,72%				
	Peatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian keat gula *)				107.785.000	-	-	-	-	-	-							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)				3.437.375.000	60.285.000	28.725.000	4.400.000	29.725.000	60.285.000	1,75%	60.285.000	0,00%					
	Pengembangan Ekstensifikasi Lahan Pertanian *)				60.000.000	28.725.000	4.400.000	12.600.000	4.400.000	29.725.000								
	Pendampingan Penyakitan Pupuk Bembusid *)				98.500.000	28.725.000	4.400.000	12.600.000	4.400.000	29.725.000								
	Pengadaan dan Pendistribusian Alat dan Mesin Pertanian *)				484.873.000	12.600.000			12.600.000									
	Pemafatan dan Rehabilitasi Jangam Irigasi *)				93.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Pengembangan Jalan Usaha Tani (OAU) *)				630.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Pengembangan Jalan Usaha Tan (OAU) *)				30.500.000	3.750.000			3.750.000									
	Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (OAU) *)				1.980.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (OAU) *)				69.500.000	-	-	-	-	-	-							
	Inventarisasi dan Pendaftaran Kios Saproti dan Pengecer Pupuk *)				20.000.000	9.600.000			9.600.000									
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)				19.880.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemafatan pekarangan untuk pengembangan pangan				10.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Pemafatan pekarangan untuk pengembangan pangan				6.180.000	-	-	-	-	-	-							
	Pemafatan pekarangan untuk pengembangan pangan				3.800.000	-	-	-	-	-	-							
	Pemafatan pekarangan untuk pengembangan pangan				10.060.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemafatan pekarangan untuk pengembangan pangan				6.050.000	-	-	-	-	-	-							
	Pemafatan pekarangan untuk pengembangan pangan				4.000.000	-	-	-	-	-	-							
	3.06 Bidang Perkebunan																	
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				45.214.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				45.214.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							
	Program peningkatan efisiensi perdasanaan dalam negeri				25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%				
	Pemeran Pembenunan *)				25.000.000	-	-	-	-	-	-							

NO	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Jumlah/Kegiatan) (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Laju (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang diwawahi (2018)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang diwawahi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Pelaksanaan RPKD dan Triwulan I)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Keuangan									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
3.07	Bidang Perindustrian	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Tingkat Peran Perempuan di Pedesaan	4.690.000.000	3.690.032.862			1.012.251.300		117.740.000	6.400.000				117.740.000					117.740.000								Dispendag			
		Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekowisata Produk				64.895.000		997.396.300		111.340.000					111.340.000					111.340.000								Dispendag			
		Pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)						1.190.492.500		312.495.283					312.495.283					312.495.283								Dispendag			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.304.331.025	1.104.130.660																							Dispendag			
		Penyediaan jasa surat menyurat				3.600.000				600.000					600.000					600.000								Dispendag			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				77.700.212				7.448.837					7.448.837					7.448.837								Dispendag			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor				0.150.000				1.542.000					1.542.000					1.542.000								Dispendag			
		Penyediaan alat tulis kantor				64.612.400				14.519.950					14.519.950					14.519.950								Dispendag			
		Penyediaan barang cadangan dan pendanaan				44.356.900				-					-					-								Dispendag			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				11.400.000				-					-					-								Dispendag			
		Penyediaan bahan bacaan dan perawatan pendukung-undangan				9.490.000				-					-					-								Dispendag			
		Penyediaan bahan logistik kantor				53.000.000				8.599.679					8.599.679					8.599.679								Dispendag			
		Ralat-cara/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				290.000.000				108.519.359					108.519.359					108.519.359								Dispendag			
		Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran				597.690.886				140.630.156					140.630.156					140.630.156								Dispendag			
		Ralat-cara/ koordinasi ke dalam daerah				102.500.000				32.395.000					32.395.000					32.395.000								Dispendag			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	3.199.821.980	112.511.940																							Dispendag			
		Pemadaan pendanaan gedung kantor				9.660.000				3.690.000					3.690.000					3.690.000								Dispendag			
		Pemediaan peralatan gedung kantor				26.000.000				-					-					-								Dispendag			
		Pembelajaran keterampilan kepada pegawai kantor				19.821.890				-					-					-								Dispendag			
		Pembelajaran keterampilan modul layanan				29.000.000				-					-					-								Dispendag			
		Pembelajaran keterampilan kemahasiswaan/dinascoporal				90.000.000				14.790.000					14.790.000					14.790.000								Dispendag			
		Pembelajaran keterampilan pelayanan kepada pegawai kantor				16.600.000				-					-					-								Dispendag			
		Pembelajaran kuisia pelayanan kepada pegawai kantor				29.000.000				-					-					-								Dispendag			
		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakalan dinas PNS	167.695.500	4.875.000																							Dispendag			
		Pengadaan cakupan dinas begerak pertumbuhannya				42.640.000				2.420.000					2.420.000					2.420.000								Dispendag			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	477.705.750	43.316.000																							Dispendag			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				139.000.000				-					-					-								Dispendag			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	80.704.000	18.654.000																							Dispendag			
		Penyusunan laporan keuangan semesteran				1.910.000				-					-					-								Dispendag			
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun				1.910.000				-					-					-								Dispendag			
		Penyusunan Laporan Rencana, Rerija, RKA dan DPA-SKPD				8.000.000				-					-					-								Dispendag			
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKNIP)				1.910.000				-					-					-								Dispendag			
		Penyusunan Pelaporan Fiskal dan Keuangan SKPD				11.400.000				-					-					-								Dispendag			
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kontribusi Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri - Pertumbuhan Industri - cakupan bina kelompok	4.122.897.115	5.116.395.798																							Dispendag			
		Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah				97.450.000				16.655.000					16.655.000					16.655.000								Dispendag			
		Penelitian dan inovasi produk IKM Daerah				46.575.000				-					-					-								Dispendag			
		Pendataan/binaan IKM sektor industri				46.800.000				-					-					-								Dispendag			
		Pembinaan IKM mengikut parlemen dalam daerah dan luar daerah				72.800.000				-					-					-								Dispendag			
		Peningkatan Pelayanan dan Pembiayaan Organisasi Dekatada Kabupaten/Gunodilats				172.471.000				34.525.000					34.525.000					34.525.000								Dispendag			
		Pembinaan Pembiayaan Industri (Caman)				38.800.000				-					-					-								Dispendag			
3.08	Bidang Transmigrasi	Program pengembangan wilayah transmigrasi	adanya pengembangan wilayah transmigrasi	3.151.239.656	1.490.474.440																								Dispendag		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)(Triwulan I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(12)=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		(16)	(17)
	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS		1.254.000.000		211.100.000		384.220.000		-								0,00%		211.100.000		16,83%	Setwan	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						304.610.000		-														Setwan	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						79.610.000		-														Setwan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bintek & sosialisasi		3.361.000.000		1.129.789.600		528.000.000		109.138.000					109.138.000		20,67%		1.238.927.600		36,86%	Setwan		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						264.000.000		36.674.000						36.674.000								Setwan	
	Pertemuan Nasional ASDEKSI *)						264.000.000		72.454.000						72.454.000								Setwan	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	Tertelaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan		1.680.400.000		15.091.500		44.205.000		-					-		0,00%		15.091.500		0,90%	Setwan		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						20.725.000		-						-								Setwan	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)						2.300.000		-						-								Setwan	
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)						8.030.000		-						-								Setwan	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)						13.150.000		-						-								Setwan	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan SDM bagi anggota DPRD		17.718.750.000		23.931.985.583		7.418.839.000		688.052.300					688.052.300		11,97%		24.820.037.883		140,08%	Setwan		
	Pembahasan rancangan peraturan daerah						203.385.000		-						-								Setwan	
	Kegiatan Reses						904.204.000		296.854.000						296.854.000								Setwan	
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD						1.508.000.000		262.294.000						262.294.000								Setwan	
	Pertemuan Nasional/Regional dan Rapat Kerja *)						2.101.000.000		242.014.300						242.014.300								Setwan	
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah *)						2.140.000.000		66.690.000						66.690.000								Setwan	
	Rapat-rapat paripurna dan pelantikan *)						124.750.000		-						-								Setwan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD *)						437.500.000		-						-								Setwan	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Inventarisasi dan penataan aset SKPD *)				2.119.500		4.500.000		-					-		0,00%		2.119.500		0,00%	Setwan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		10.515.118.100		835.591.268		897.587.508		138.707.353					138.707.353		15,45%		974.298.621		9,27%	Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa surat menyurat						7.920.000		1.980.000						1.980.000								Kec. Kurun	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						31.330.960		8.588.301						8.588.301								Kec. Kurun	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor						9.802.694		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan alat tulis kantor						40.248.290		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						16.324.100		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						6.480.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan bahan logistik kantor						36.840.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan makanan dan minuman						54.560.000		11.400.000						11.400.000								Kec. Kurun	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						112.000.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran						325.683.252		75.694.212						75.694.212								Kec. Kurun	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)						157.500.000		40.420.000						40.420.000								Kec. Kurun	
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tampang*)						2.025.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tampang*)						7.200.000		320.540						320.540								Kec. Kurun	
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Tampang*)						1.700.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tampang*)						11.712.642		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tampang*)						4.950.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Tampang*)						3.960.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tampang*)						5.360.000		-						-								Kec. Kurun	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Tampang*)						4.000.000		-						-								Kec. Kurun	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Tampang*)						10.000.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tampang*)						2.198.550		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kurun*)						1.350.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kurun*)						6.800.000		308.300						308.300								Kec. Kurun	
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Kurun*)						1.320.000		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kurun*)						10.338.620		-						-								Kec. Kurun	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kurun*)						1.542.300		-						-								Kec. Kurun	

NO	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang di evaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi RKPd tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Pelaksanaan RKPd	Tingkat Capaian Realisasi RPJMD (s.d tahun 2018 (3xTriwulan I))	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakialan dinas PMS		107.000.000	29.400.000	22.050.000	-	-	-	-	12.093.202	0,00%	29.400.000	27,48%		
	Pendataan cakupan khusus hari-hari tertentu					15.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pendataan cakupan khusus hari-hari tertentu Kelurahan ¹⁾					6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi		77.000.000	4.500.000	8.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	4.500.000	5,64%		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Tertakutnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan			6.630.000	20.280.000	952.800	-	-	-	-	4,70%	7.582.800	0,00%		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD					17.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran					210.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun					450.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA SKPD ¹⁾					2.100.000	952.800	-	-	-	-	10,59%	89.125.000	81,79%		
	Program Pembinaan Daerah Bawah ¹⁾	pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya pemberian niras pdi dan operasional retribusi sesuai perbub. Terselenggaranya pelatihan anggota BPD sekec.		108.970.000	80.615.000	80.368.000	8.510.000	-	-	-	8.510.000	35,39%	110.371.000	18,24%		
	Rapat kerja camat, kadewiluh dan demang/kepala adat ¹⁾					18.280.000	8.510.000	-	-	-	-	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Rapat kerja Lurah, RT/RW dan LK/Asel Kelurahan ¹⁾					2.108.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penggiatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan ¹⁾					60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan ¹⁾	terselenggaranya kegiatan keagamaan bagi masyarakat diwilayah kec. Kurun		604.950.000	87.508.000	64.610.000	22.865.000	-	-	-	22.865.000	3,59%	110.371.000	18,24%		
	Pembinaan kepada kegiatan kesamaan ¹⁾					31.400.000	17.200.000	-	-	-	17.200.000	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan ¹⁾					18.650.000	5.695.000	-	-	-	5.695.000	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Pemertoran kegiatan kemasyarakatan ¹⁾					8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemertoran kegiatan sodora/orca Kelurahan ¹⁾					6.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik ¹⁾					2.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (D'A-TEN) ¹⁾					2.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					534.310.000	129.258.404	-	-	-	129.258.404	24,19%	597.350.086	7,49%		
	Pemediaan jasa surat menyurat					1.650.000	750.000	-	-	-	750.000	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Pemediaan jasa komunikasi, surver daya ar dan listrik					7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan jasa administrasi keuangan					53.288	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan jasa kesehatan kantor					2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan alat tulis kantor					35.000.000	17.500.000	-	-	-	17.500.000	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Pemediaan barang instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					6.360.000	1.860.000	-	-	-	1.860.000	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Pemediaan peralatan dan perlengkapan kantor					39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan bahan logistik kantor					18.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan makanan dan minuman					10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rab/cra/cab koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis					50.072.608	12.473.202	-	-	-	12.473.202	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Rab/cra/cab koordinasi ke dalam daerah ¹⁾					230.000.000	80.205.000	-	-	-	80.205.000	0,00%	597.350.086	7,49%		
	Pemediaan jasa surat menyurat Kelurahan ¹⁾					640.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan jasa komunikasi, surver daya ar dan listrik Kelurahan ¹⁾					2.363.998	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan jasa kesehatan kantor Kelurahan ¹⁾					1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan alat tulis kantor Kelurahan ¹⁾					8.977.800	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan barang cetakan dan pengendalian Kelurahan ¹⁾					4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan bahan logistik kantor Kelurahan ¹⁾					2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rab/cra/cab koordinasi ke dalam daerah Kelurahan ¹⁾					37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan ¹⁾					47.942.808	12.093.202	-	-	-	12.093.202	0,00%	597.350.086	7,49%		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output))	Target RPJMD pada tahun 2014 s.d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Akhir Tahun Pelaksanaan (%)(Triwulan I)		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K Rp.		K Rp.		K Rp.			K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.					
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
(1)	Penyelesaian Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Kantor			150.338.424															Kec. Miri Manasa	(17)	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)			152.400.000					44.100.000										Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan jasa surat menyurat Kelurahan *)			900.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)			688.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan alat tulis kantor Kelurahan *)			3.410.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)			830.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan bahan logistik kantor Kelurahan *)			14.500.000															Kec. Miri Manasa		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)			30.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Kantor Kelurahan *)			75.529.212															Kec. Miri Manasa		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	1.219.921.900	182.929.000			1.145.000									0,46%	184.074.000	15,09%	Kec. Miri Manasa	(17)	
	Pencapaian peralatan gedung kantor																		Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan Pagar dan Pemeliharaan Halaman Gedung Aparatur (Rumah *)			17.500.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil labahan			24.220.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			19.868.353															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			26.550.000					1.145.000										Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan pengalangan dan peralatan Gedung Pertemuan (Ruang *)			19.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Umum *)			105.125.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan *)			5.832.788															Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan *)			5.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Rehabilitasi Sumur Gali dan Pompa *)			5.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	77.000.000	29.050.000												0,00%	29.050.000	37,73%	Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan *)			8.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan *)			4.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	138.000.000	32.998.800												0,00%	32.998.800	23,91%	Kec. Miri Manasa		
	Masang studi banding/kunjara singkat non formal *)			36.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Program Pembinaan Daerah Bawah *)	pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terselenggaranya penerbitan mira peti dan operasional retribusi sesuai perubuk. Terselenggaranya pelantikan anggota BPD sekec.	137.023.000	16.200.000												0,00%	16.200.000	11,82%	Kec. Miri Manasa		
	Rapat kerja cemat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)			7.300.000															Kec. Miri Manasa		
	Pemilihan perangkat desa *)			14.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Pengukuran, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)			12.000.000															Kec. Miri Manasa		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Terkuatnya kecamatan tujuan kegiatan keagamaan di Kab Gumas dan tersumanya data lembaga keagamaan penerima bantuan pemerintah	314.744.000	43.350.000												0,00%	43.350.000	13,77%	Kec. Miri Manasa		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)			22.600.000															Kec. Miri Manasa		
	Program peningkatan peran serta Asopmudaan Pembinaan Pasirjora *)			22.600.000												0,00%	22.730.000	0,00%	Kec. Miri Manasa		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	money dari pelayanan perjalanan		1.200.000												0,00%	5.640.000	0,00%	Kec. Miri Manasa		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.055.450.000	668.965.595			186.407.012									26,94%	655.372.807	9,45%	Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan jasa surat menyurat			4.500.000															Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan jasa administrasi keuangan			360.000															Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan alat tulis kantor			28.630.000															Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan barang cetakan dan penggandaan			10.750.000															Kec. Rungan Barat		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)(Triwulan I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(12)=8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		(18)	(17)		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						16.000.000		4.500.000						4.500.000									BPKAD		
	Penyediaan bahan logistik kantor						126.000.000		1.280.000						1.280.000										BPKAD	
	Penyediaan makanan dan minuman						16.736.000		-						-										BPKAD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						568.000.000		67.810.438						67.810.438										BPKAD	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran						595.038.060		166.804.917						166.804.917										BPKAD	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)						45.000.000		1.425.000						1.425.000										BPKAD	
	Penyediaan jasa kebersihan gedung pertemuan umum *)						56.845.000		-						-										BPKAD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik GPU *)						96.000.000		19.193.988						19.193.988										BPKAD	
	Penataan Administrasi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah *)						15.000.000		3.229.000						3.229.000										BPKAD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat		52.414.761.848		3.717.730.731		2.970.391.000		86.051.200					86.051.200		2,90%			3.603.781.931			7,26%		BPKAD	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional **)						1.584.443.000		-						-										BPKAD	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						38.000.000		-						-										BPKAD	
	Pengadaan peralatan gedung kantor						74.500.000		-						-										BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas						20.000.000		-						-										BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						15.000.000		-						-										BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil labatan						25.000.000		5.435.000						5.435.000										BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						154.600.000		17.285.000						17.285.000										BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						56.400.000		7.405.000						7.405.000										BPKAD	
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional						486.000.000		-						-										BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD *)						202.950.000		40.926.200						40.926.200										BPKAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum *)						178.498.000		15.000.000						15.000.000										BPKAD	
	Pemeliharaan perlengkapan gedung pertemuan umum *)						77.000.000		-						-										BPKAD	
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan Umum *)						80.000.000		-						-										BPKAD	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					87.600.000		-						-		0,00%						0,00%		BPKAD	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						87.600.000		-						-										BPKAD	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi		2.876.869.674		124.544.700		200.000.000		8.312.600					8.312.600		4,16%			132.857.300			4,62%		BPKAD	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						200.000.000		8.312.600						8.312.600										BPKAD	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan		1.007.341.487		229.302.132		208.060.000		2.175.900					2.175.900		1,05%			231.478.032			22,98%		BPKAD	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						10.040.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						9.760.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						9.680.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)						10.100.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)						23.500.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Triwulanan Kabupaten Gunung Mas *)						86.000.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Gunung Mas *)						25.620.000		-						-										BPKAD	
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)						12.960.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)						17.400.000		2.175.900						2.175.900										BPKAD	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui perda pajak daerah dan retribusi daerah		26.235.719.817		13.987.816.425		4.629.673.894		771.488.722					771.488.722		16,66%			14.759.305.147			56,26%		BPKAD	
	Penyusunan standar satuan harga						89.400.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD						128.520.000		50.684.200						50.684.200										BPKAD	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD						66.520.000		29.370.000						29.370.000										BPKAD	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD						114.520.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD						66.520.000		-						-										BPKAD	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						173.200.000		14.995.000						14.995.000										BPKAD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)(Triwulan I)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)		(10)	(12)=8+9+10+11	13 = 12/7 x 100	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100 %	(16)	(17)	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						59.000.000	-								-					BPKAD	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah						210.527.000	82.997.000								82.997.000					BPKAD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi manajemen penggajian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas *)						57.260.000	4.416.000								4.416.000					BPKAD	
	Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah *)						172.800.000	31.220.000								31.220.000					BPKAD	
	Penyusunan RKB dan RKPBU *)						14.400.000	-								-					BPKAD	
	Penyusunan laporan semester aset/barang daerah *)						73.800.000	-								-					BPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah *)						52.800.000	14.280.500								14.280.500					BPKAD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas *)						96.000.000	11.760.000								11.760.000					BPKAD	
	Pelayanan Penerbitan SP2D Pelaksanaan APBD *)						30.200.000	7.442.500								7.442.500					BPKAD	
	Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kasda Kabupaten Gunung Mas *)						57.800.000	14.435.000								14.435.000					BPKAD	
	Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS *)						23.800.000	-								-					BPKAD	
	Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan PPAS Perubahan *)						23.800.000	-								-					BPKAD	
	Pelayanan Verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung Mas Pelaksanaan APBD *)						50.500.000	12.185.000								12.185.000					BPKAD	
	Pengelolaan Kas Daerah *)						194.000.000	24.315.000								24.315.000					BPKAD	
	Pengelolaan Gaji PNS *)						114.500.000	7.508.000								7.508.000					BPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *)						85.500.000	7.697.500								7.697.500					BPKAD	
	Peningkatan operasional, pemeliharaan jaringan dan perangkat Simda Kabupaten Gunung Mas *)						85.092.000	22.546.182								22.546.182					BPKAD	
	Peningkatan kualitas perangkat/pengadaan Server dan Jaringan Aplikasi Simda Kabupaten Gunung Mas *)						363.300.000	84.000.000								84.000.000					BPKAD	
	Rekonsiliasi realisasi pembayaran gaji PNS *)						37.000.000	-								-					BPKAD	
	Peningkatan pelayanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) *)						95.550.000	9.080.000								9.080.000					BPKAD	
	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) *)						161.300.000	55.821.693								55.821.693					BPKAD	
	Rekonsiliasi Realisasi Setoran PFK serta Penyusunan Rekapitulasi Rincian dan Komposisi PNS untuk penyalokan DAU *)						58.710.000	15.831.201								15.831.201					BPKAD	
	Penyusunan Laporan Bulanan dan Rekapitulasi Perhitungan Pihak Ketiga atas Realisasi Pembayaran Gaji PNS se Kabupaten Gunung Mas *)						54.200.000	28.031.000								28.031.000					BPKAD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan Simda Keuangan *)						200.500.000	99.441.500								99.441.500					BPKAD	
	Penharpusan Barang Milik Daerah *)						124.600.000	7.700.000								7.700.000					BPKAD	
	Penilaian Barang Milik Daerah *)						150.500.000	4.040.000								4.040.000					BPKAD	
	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah *)						137.770.000	87.739.000								87.739.000					BPKAD	
	Peningkatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Persediaan Kabupaten Gunung Mas *)						130.400.000	-								-					BPKAD	
	Peningkatan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Penyelenggaraan SKPD *)						81.200.000	-								-					BPKAD	
	Penyelenggaraan Pelaksanaan Tim Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)						71.100.000	-								-					BPKAD	
	Intensifikasi Penatausahaan BMD *)						81.000.000	-								-					BPKAD	
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan *)						136.600.000	36.454.446								36.454.446					BPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas *)						23.500.000	-								-					BPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Investasi Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas *)						24.400.000	-								-					BPKAD	
	Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pembayaan *)						35.000.000	3.940.000								3.940.000					BPKAD	
	Penyusunan Laporan Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh Badan Pengelola Keuangan dan Aset *)						38.900.000	1.590.000								1.590.000					BPKAD	
	Rekonsiliasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten *)						21.500.000	4.000.000								4.000.000					BPKAD	
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Se-Kab. Gunung Mas *)						21.500.000	-								-					BPKAD	
	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) *)						168.200.000	-								-					BPKAD	
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat SIMDA BMD dan SIPDA *)						110.000.000	-								-					BPKAD	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)						101.000.000	-								-					BPKAD	
	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan BMD Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD *)						117.000.000	-								-					BPKAD	
	Pembuatan Website Aplikasi Simda Kabupaten Gunung Mas *)						31.084.864	-								-					BPKAD	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2019 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gunung Mas berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2014 - 2019. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2019. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2019 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional :

- 1) Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana, dengan cara :
 - a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan;

- b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan;
 - c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan.
- 2) Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi, dengan cara :
- a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;
 - b. Perbaikan Struktur Industri;
 - c. Peningkatan Daya Saing Industri;
 - d. Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik.
- 3) Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan, dengan cara :
- a. Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2 KEK Pariwisata;
 - b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif;
 - c. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
 - d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - e. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan.
- 4) Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan, dengan cara :
- a. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha;
 - b. Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi;
 - c. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi;
 - d. Peningkatan Keterampilan Wirausaha.
- 5) Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek,

pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier, dengan cara :

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas;
- b. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas;
- c. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa);
- d. Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi :

- 1) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dengan kebijakan :
 - a. menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis;
 - b. pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin;
 - c. peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
 - d. peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah;
 - e. pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah.
- 2) Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten, dengan kebijakan :
 - a. peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor pertanian;
 - b. perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintah dan swasta;
 - c. pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu;
 - d. pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah :

- 1) Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan berbasis potensi lokal serta UMKM; Pengembangan aktivitas usaha tersebut dalam rangka mendorong masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan di bidang pertanian, perkebunanm perikanan dan peternakan

dengan bantuan stimulan seperti bibit tanaman, padi dan ternak/ikan;

- 2) Meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan bagi kelompok tani dan perkebunan serta pelaku UMKM;

Peningkatan kemampuan ini meliputi sarana dan prasarana pertanian, seperti alat-alat pertanian, sarana irigasi serta kelengkapan infrastruktur lainnya. Selain itu juga kemampuan dan pengembangan sumberdaya manusia bagi petani maupun kelompok tani dalam pengembangan kemampuannya sehingga meningkatkan perekonomian dalam UMKM.

- 3) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian dan perkebunan serta UMKM;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan untuk usaha.

- 4) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian dan perkebunan serta UMKM;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan untuk usaha.

- 5) Meningkatkan akses pasar dan pengolahan hasil pertanian;

Peningkatan akses pasar dilakukan dengan melakukan kerjasama dalam hal dukungan dalam pemasaran hasil pertanian, artinya dukungan ini berupa harga yang terjangkau dan memadai dalam mengakomodir hasil pertanian yang dijual di pasar sehingga pendapatan petani dapat meningkat.

- 6) Revitalisasi dan pengembangan pasar – pasar desa;

Peningkatan dan pembukaan pasar – pasar desa diharapkan akan meningkatkan gairah petani maupun masyarakat dalam

memasarkan hasil pertanian atau ladangnya dan diharapkan dapat melayani kebutuhan pokok yang ada di sekitar pasar – pasar desa tersebut sebagai pusat sentra perekonomian masyarakat.

- 7) Peningkatan akses permodalan bagi budidaya pertanian, perkebunan dan UMKM;

Perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk pengembangan dan perluasan UMKM yang ada di pedesaan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam juta rupiah sebesar Rp.1.634.260,14 menjadi Rp.1.836.827,47 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 2.190.600,44, sedangkan proyeksi untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 diperkirakan naik menjadi 26,78%, 27,98% dan 29,12%.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK 2000) dalam juta rupiah pada tahun 2012 sebesar Rp.768.543,55 menjadi Rp. 820.424,81 pada tahun 2013, sedangkan perkiraan pada tahun 2014 sebesar Rp.978.438,63.

Empat lapangan usaha pendukung utama perekonomian di Kabupaten Gunung Mas adalah pertanian, perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6,22% dan pada tahun 2013 menguat menjadi 6,75%. Penguatan ini karena kinerja sektor ekonomi terutama seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mulai meningkat. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,9%, dan diproyeksikan pada tahun 2015 , 2016 dan 2017 sebesar 7%, 7,15% dan 7,2%.

b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.958.013,28 menjadi Rp. 17.510.271,40 pada tahun 2013, sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) tahun 2012 sebesar Rp. 7.504.575,24 menjadi Rp. 7.821.018,21 pada tahun 2013. Diperkirakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019, kenaikan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah 26,78%, 27,98% dan 29,12%.

c. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2013 sebesar 8,4% dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 7,8%. Sedangkan pada tahun 2015, laju inflasi diproyeksikan sebesar 6,9%, pada tahun 2016 sebesar 6,4%, tahun 2017 sebesar 5,1% dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 0,37 % per bulan maret 2018

d. Investasi

Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dinamika perekonomian daerah. Disamping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada tahun 2013, nilai Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.835,3 Triliun, menurun pada tahun 2014 menjadi Rp. 980,4 Milyar, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar

adalah Rp. 1.270,1 Triliun, meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.179,1 Triliun dan menurun pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.037,8 Triliun.

f. Penduduk dan Angkatan Kerja

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

Berdasarkan data dari *Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017* jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebesar 112.484 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 59.803 jiwa dan perempuan sebesar 52.681 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 12,060 jiwa per Km². Jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk sebesar 49.378 orang, Kepala Keluarga (KK) sebesar 33.843. Untuk angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 58.361 orang, bukan angkatan kerja (BAK) sebesar 17.005 orang, jumlah tenaga kerja sebesar 75.366 orang, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 77,44 persen.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017*	Target Tahun 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi :					
	a. Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,96	7,00	7,15	7,25
	b. PDRB atas harga konstan	Juta Rp	978.438,63	1.240.464,50	1.587.546,46	
2.	PDRB Per Kapita	Juta Rp	9.327.346,32	11.825.209,66	15.133.903,32	

3.	Laju Inflasi	%	6,9	6,4	5,1	4,5
4.	Angka Kemiskinan	%	6,17	5,85	5,83	5,16
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8	7	5	3
6.	Indeks Pembangunan Manusia		74,42	74,89	74,99	75,25

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 – 2016, perekonomian Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan

prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.

4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018-2019

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2016 dan perkiraan tahun 2018 dan 2019 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha – usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. **Kedua**, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. **Ketiga**, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. **Keempat**, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. **Kelima**, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. **Keenam**, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2014-2019 di tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume rancangan APBD tahun 2019. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD, Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Penerimaan Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya untuk Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun didasarkan pada prinsip anggaran surplus dan defisit dan dinamis dengan kemungkinan dibentuknya dana cadangan. Pengertian Surplus adalah bahwa tercapainya tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk belanja modal, sementara defisit terjadinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sehingga mendorong pemerintah untuk bekerja secara terencana dan efisien. Perkiraan surplus dan defisit mengharuskan adanya perubahan setiap pertengahan tahun anggaran berjalan (APBD)

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp20,45 triliun atau 18,07%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp 13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,98 triliun atau 21,38%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan

retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
- g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- h) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 ditetapkan atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 2) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian

pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Untuk DAU dan DAK diasumsikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2018;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gunung Mas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa kelompok belanja daerah yang termasuk dalam pengeluaran atau

belanja tidak langsung adalah antara lain ; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, diarahkan untuk mendukung kelancaran jalannya roda pemerintahan secara optimal dan memperbesar terhimpunnya tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, maka pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung akan dilaksanakan secara terarah dan terkendali agar alokasi anggaran belanja tidak langsung dapat tepat sasaran dan tepat manfaat guna mendukung operasionalisme kegiatan pemerintahan. Karena itu kebijakan di bidang pengeluaran belanja tidak langsung diuraikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Belanja Pegawai

Salah satu komponen dari belanja tidak langsung adalah biaya gaji dan pensiun. Pengendalian biaya ini akan ditempuh dengan menyetarakan laju pertumbuhan pegawai negeri dengan kebutuhan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Pertambahan pegawai negeri ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan, alokasi penempatan dan peningkatan kemampuan aparatur. Kebijakan ini merupakan upaya meningkatkan mutu, produktifitas dan sekaligus kesejahteraan pegawai negeri. Perbaikan penghasilan pegawai senantiasa diupayakan antara lain melalui perbaikan tunjangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perekonomian masyarakat pada umumnya.

2. Mengendalikan Belanja Barang

Kebijakan pengeluaran belanja barang diarahkan pada pengendalian pengeluaran sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan pemerintahan. Alokasi pengeluaran belanja barang diprioritaskan pada upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi pengusaha kecil menengah dan pengusaha daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan belanja pemeliharaan diarahkan pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah

dan hasil-hasil pembangunan sebelumnya agar dapat berfungsi dengan baik.

3. Mengoptimalkan Belanja Subsidi

Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan daya guna alokasi sumber-sumber keuangan daerah secara optimal, maka alokasi belanja bagi subsidi perlu dilakukan secara cermat dan kalkulatif agar tidak mengakibatkan berbagai distorsi ekonomi khususnya dibidang produksi dan konsumsi masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi sedapat mungkin tidak mengurangi atau menghambat pemupukan tabungan pemerintahan.

4. Mengoptimalkan Belanja Hibah

Belanja hibah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat dengan arahan bahwa dana hibah tersebut dapat meningkatkan produktifitas output riil daerah.

5. Alokasi Belanja untuk Bantuan Sosial.

Belanja untuk bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk pemberian bantuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja ini tidak diberikan secara terus-menerus akan tetapi diberikan hanya dan jika peruntukannya jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c)

pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (1) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korclasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- 4) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah

kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.

b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD

dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serla besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada PD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal

sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- i) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - j) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- k) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat ,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
 - l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 4) Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2016 Rp248,38 triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp 89,92 triliun atau 24,42%. Secara Nasional pada Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 203,9 triliun.

- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk- produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16

Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 5) Surplus/Defisit APBD
- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
 - b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
 - c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2018 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk kebijakan Belanja Langsung, titik berat pembangunan di Kabupaten Gunung Mas adalah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi dalam arti luas yang dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proiritas ini juga diarahkan dan didorong agar dapat saling memperkuat, saling terkait dan saling terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal tersebut akan dikembangkan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan peningkatan daya dukung infrastruktur wilayah guna menunjang mobilitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan menjadi salah satu perhatian penting oleh pemerintah daerah dalam alokasi pengeluaran pembangunan daerah. Selain itu peningkatan kemampuan sarana air bersih, listrik, telekomunikasi akan ditingkatkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan kebutuhan pembangunan pada umumnya.
2. Pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia akan ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kualitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Upaya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada para guru untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikannya akan terus dilakukan. Selain itu, guna percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka upaya pemberian beasiswa kepada putra putri gunung mas yang berprestasi akan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Pemberian beasiswa ini akan senantiasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu sektor pendidikan diupayakan mendapat alokasi anggaran pembangunan yang memadai guna mendukung percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Pembangunan pertanian, dan perikanan akan ditempuh melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan daerah. Selain itu usaha penataan dan pembinaan kelembagaan usaha tani dan nelayan agar mampu mengakses berbagai informasi pasar dan jaringan pemasaran termasuk sumber pembiayaan akan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Upaya peningkatan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur pertanian dalam arti luas juga akan ditingkatkan guna mendukung program ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan daerah. Oleh karena itu sektor pertanian perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai agar tercapai pertumbuhan produksi,

produktifitas dan kualitas produksi sebagai bagian dari upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

4. Pembangunan industri khususnya industri-industri berbasis pertanian (agro industri) diarahkan pada usaha penciptaan landasan struktur industri yang kuat yang didukung oleh kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi industri yang terus meningkat, sehingga diharapkan bahwa setiap kecamatan dapat menjadi basis-basis agroindustri yang mampu memanfaatkan dan menghasilkan produk bermuatan lokal (*local content*) yang tinggi disamping memiliki aksesibilitas pemasaran yang luas ditingkat regional maupun nasional pada umumnya.
5. Pembangunan kecamatan sebagai upaya optimalisasi fungsi pusat/sub pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, diarahkan untuk mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah kecamatan. Disamping itu, pembangunan kecamatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mengahapus isolasi dan keterpencilan di beberapa wilayah, sehingga ketimpangan daya saing produksi dan pemasaran antar wilayah kecamatan semakin dapat diminimalisir. Selain itu kota kuala kurun sebagai ibukota kabupaten akan dibenahi menjadi kota yang memiliki daya dukung, daya tarik dan daya dorong bagi tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Karena itu, kota kuala kurun diarahkan selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan yang efektif.
6. Peningkatan peran serta masyarakat sejalan dengan upaya menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah, maka anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan untuk menunjang berkembangnya potensi masyarakat, termasuk dunia usaha. Hal ini mengingat keterbatasan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah, sehingga sasaran pembangunan hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai potensi investasi masyarakat dan dunia usaha pada khususnya. Karena itu pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah dan swasta diupayakan dan diarahkan

untuk dapat saling mengisi, saling melengkapi dan saling menunjang.

7. Efisiensi dan efektifitas pengeluaran biaya langsung akan diupayakan dengan lebih mempertajam alokasi pemanfaatan anggaran, menyempurnakan mekanisme penggunaan dan pengawasannya guna mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran penggunaan anggaran belanja langsung. Demikian pula penyertaan modal pemerintah pada BUMD akan dilakukan secara lebih selektif sebagai bagian dari upaya menjadikan perusahaan daerah sebagai badan usaha yang mandiri dan profesional.
8. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas juga diarahkan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan wilayah yang memadai bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aspek kegiatan pembangunan daerah dan wilayah. Dalam kaitan ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan akan dikembangkan melalui sosialisasi dan penegakan hukum. Di samping itu, kegiatan investasi, pemantauan, perlindungan dan perhitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pola tata ruang wilayah akan dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 – 2018

- a). Tahun 2008, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 378,1 milyar yang terdiri atas PAD sebesar Rp. 8,7 milyar, dana perimbangan Rp. 364,6 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 4,75 milyar.
- b). Tahun 2009, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 415,9 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 10,1 milyar,

dana perimbangan Rp. 400,7 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,05 milyar.

- c). Tahun 2010, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 478,3 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 12,3 milyar, dana perimbangan Rp. 460,5 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,47 milyar.
- d). Tahun 2011, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 573,9 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 16,8 milyar, dana perimbangan Rp. 551,03 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 6,14 milyar.
- e). Tahun 2012, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 550,3 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 21,47 milyar, dana perimbangan Rp. 506,6 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 22,27 milyar.
- f). Tahun 2013, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 685,48 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,55 milyar, dana perimbangan Rp. 601,95 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 46,98 milyar.
- g). Tahun 2014, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 732,78 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 26,17 milyar, dana perimbangan Rp. 643,48 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 63,12 milyar.
- h). Tahun 2015, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 810,15 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 32,94 milyar, dana perimbangan Rp. 680,62 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 96,59 milyar.
- i). Tahun 2016, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.028 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,83 milyar, dana perimbangan Rp. 900,4 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 90,97 milyar.
- j). Tahun 2017, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.060 Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61 milyar, dana perimbangan Rp. 908,4 milyar dan lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,10 milyar.
- k). Tahun 2018, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.174 Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61

milyar, dana perimbangan Rp. 984,8 milyar dan lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,05 milyar.

Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 - 2018

Tahun	APBD Per Tahun Anggaran (Rp Juta)		Persentase SILPA (%)
	Total Belanja	Jumlah SILPA	
	(A)	(B)	(B)/(A)
2008	438.192.239.937,80	57.834.926.830,98	13,20
2009	491.520.801.470,59	36.061.634.223,59	7,34
2010	483.814.782.012,00	55.839.488.727,00	11,54
2011	569.769.039.802,00	63.696.376.657,00	11,62
2012	574.310.527.288,05	33.970.320.811,05	5,91
2013	709.379.117.516,00	25.000.000.000,00	3,52
2014	748.674.657.448,00	26.651.190.773,77	3,56
2015	831.093.498.773,00	29.000.000.000,00	3,49
2016	1.048.280.811.494,00	56.314.000.000,00	5,37
2017	1.074.040.210.938,00	62.000.000.000,00	5,77
2018	1.174.939.364.639,10	10.000.000.000,00	0,85

Sumber : Bappeda, 2018

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37.403.228.843,07	36.722.792.241,00	38.613.899.007,00	38.613.899.007,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.950.761.891,80	10.215.293.034,00	5.802.725.000,00	5.802.725.000,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.811.782.245,00	2.236.299.650,00	2.325.850.000,00	2.323.350.000,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.313.040.885,32	6.425.582.111,00	6.434.000.000,00	6.434.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21.327.643.820,95	17.845.617.446,00	24.051.324.007,00	24.053.824.007,00	
1.2	Dana Perimbangan	824.244.037.834,00	863.775.454.453,00	984.862.135.237,10	984.862.135.237,10	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.533.552.619,00	64.466.675.953,00	99.390.833.237,10	99.390.833.237,10	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	564.028.300.000,00	559.898.689.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	119.474.468.065,00	174.696.316.551,00	197.615.887.000,00	197.615.887.000,00	
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik *)	53.207.717.150,00	64.713.772.949,00	87.855.415.000,00	87.855.415.000,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94.180.122.278,55	132.848.275.842,04	147.363.330.395,00	147.363.330.395,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	18.952.680.000,00	18.675.200.000,00	20.175.200.000,00	
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	22.036.093.558,55	24.213.229.842,04	22.731.161.395,00	22.731.161.395,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	17.250.000.000,00	17.250.000.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya **)	0	0	1.500.000.000,00	0	
1.3.6	Penerimaan Dana Desa *)	70.773.447.720,00	89.682.366.000,00	87.206.969.000,00	87.206.969.000,00	
1.3.7	Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	1.370.581.000,00	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	955.827.388.955,62	1.033.346.522.536,04	1.170.839.364.639,10	1.170.839.364.639,10	

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 S.D TAHUN 2019

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	TAHUN BERJALAN 2018	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2,1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	338.031.426.990,00	335.529.110.599,00	355.028.378.923,39	370.543.395.673,39	
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	16.771.500.000,00	25.043.101.500,00	29.473.816.750,00	13.958.800.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	459.797.970,00	451.801.430,00	1.596.010.000,00	1.596.010.000,00	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	137.841.620.066,88	153.473.190.366,88	158.121.052.323,71	158.121.052.323,71	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	56.500.000,00	213.336.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	493.160.845.026,88	514.710.539.895,88	544.719.257.997,10	544.719.257.997,10	
2,2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	33.602.662.483,56	40.996.276.937,00	53.107.004.139,00	53.107.004.139,00	

2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.892.912.186,00	199.177.038.790,42	211.974.767.113,00	213.474.767.113,00	
2.2.3	Belanja Modal	284.796.315.108,54	308.517.740.064,96	365.138.335.390,00	368.188.335.390,00	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	483.291.889.778,10	548.691.055.792,38	630.220.106.642,00	634.770.106.642,00	
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	976.452.734.804,98	1.063.401.595.688,26	1.174.939.364.639,10	1.179.489.364.639,10	

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2016 s.d Tahun 2019**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	77.303.954.364,54	46.974.898.434,34	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	19.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.303.954.364,54	46.993.898.434,34	10.150.000.000,00	10.150.000.000,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.550.000.000,00	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	1.500.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.550.000.000,00	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	1.500.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	69.753.954.364,54	40.943.898.434,34	4.100.000.000,00	8.650.000.000,00	

BAB IV **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Secara nasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengacu kepada RPJMN dimana RKP Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2019 adalah “*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkuali*”. Maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, sesuai dengan Rancangan RKP Nasional Tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 perse;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen; dan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. mempercepat pengurangan kemiskinan
 - 1) memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 2) memperkuat sistem jaminan sosial;
 - 3) memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
 - 4) memperkuat reforma agraria; dan
 - 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
 - b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 - 1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - 3) mencegah dan pengendalian penyakit
 - 4) mempercepat penurunan stunting; dan
 - 5) meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
 - c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - 1) menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
 - 2) menyediakan afirmasi pendidikan;
 - 3) memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
 - 4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
 - d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
 - 1) menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
 - 2) menyediakan akses infrastruktur dasar permukiman layak; dan;
 - 3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
 - e. meningkatkan tata kelola layanan dasar
 - 1) memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
 - 2) memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 3) mempercepat pencapaian SPM di daerah.
2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman Dalam rangka

mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan konektivitas
 - 1) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
 - 2) pengembangan transportasi perkotaan.
- b. mengembangkan telekomunikasi dan informatika
 - 1) pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
- c. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
 - 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
- d. melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
 - 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
- e. melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan
 - 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
- b. peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
- c. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
- d. optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- f. peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;

- g. peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
 - h. peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
 - i. peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.
3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
 - c. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
 - d. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
 - e. mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.
- Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional ketiga, antara lain:
- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
 - c. optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
 - d. peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
 - e. optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi energi primer;
- b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. meningkatkan aksesibilitas air;
- d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional keempat, antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi
Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.
- b. Pemenuhan kebutuhan pangan Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat.
- c. Pemantapan ketahanaan sumber daya air

- 1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan
 - 2) suplai air minum.
 - d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - e. Perencanaan pembangunan rendah karbon
Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu
- Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
 - 1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
 - 2) menyelesaikan konflik sosial;
 - 3) meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 - 4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan
 - 5) meningkatkan penanganan terorisme.
 - b. menjamin kesuksesan pemilu
 - 1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
 - 2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
 - 3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan
 - 4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
 - c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
 - 1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional;
 - 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara;
dan
 - 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
 - d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 - 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
 - 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;
 - 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional;
 - 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.

- e. memperkuat efektivitas diplomasi
 - 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
 - 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
 - 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan
 - 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
- 2) Pemerataan infrastruktur wilayah;
- 3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
- 4) Stabilitas ekonomi daerah;
- 5) Peningkatan pendapatan masyarakat;
- 6) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
- 7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- 8) Pengelolaan industri pariwisata;
- 9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
- 10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 maka hal ini merupakan dasar bagi arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun prioritas program dan kegiatan PD jangka menengah daerah. Adapun tema RKP Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas adalah ***“Lanjutkan dan Mantapkan pembangunan di berbagai sektor dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan ekonomi masyarakat serta aksesibilitas dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Gunung Mas”***.

Program strategis untuk tahun 2019 ada 10 agenda yaitu ;

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;

2. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penuaan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;
6. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.
10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

10 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 tujuannya, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

4.2. Landasan Kebijakan RPJMD 2014-2019 Dan Substansi Penyusunan RKPD 2019

Langkah 1. Membaca dan mengelompokkan Isu/Masalah Strategis yang terdapat dalam RPJMD tahun ke 2019.

- **Kelompok 1: Program terkait dengan perbaikan kualitas pemerintahan.** Isu-isu pada kelompok ini terkait dengan pembenahan internal kabupaten Gunung Mas . Pembenahan ini dilakukan di semua lini pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
- **Kelompok 2: Program terkait dengan penyediaan pelayanan umum dasar bagi masyarakat.** Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan pelaksanaan fungsi/peran pemerintah sebagai public servant (pelayan publik). Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, yang terkait langsung dengan tujuan pembangunan.
- **Kelompok 3: Program terkait dengan perbaikan kondisi fisik keruangan kabupaten.** Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan menurunnya daya dukung lingkungan dan sediaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dll)
- **Kelompok 4 : Program terkait dengan perbaikan aspek sosial.** Isu yang termasuk dalam kelompok ini terkait dengan modal sosial yang terancam oleh faktor eksternal, juga adanya kegagalan internal.

Maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

Kelompok 1 : Pemerintahan

1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (*Governance*) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan).
2. Proses desentralisasi masih belum berjalan.
3. Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.

Kelompok 2 : Pelayanan Dasar Untuk Warga

1. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat besar;
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan public.
3. Masalah penanganan Stunting.

Kelompok 3 : Infrastruktur Dasar Dan Tata Ruang

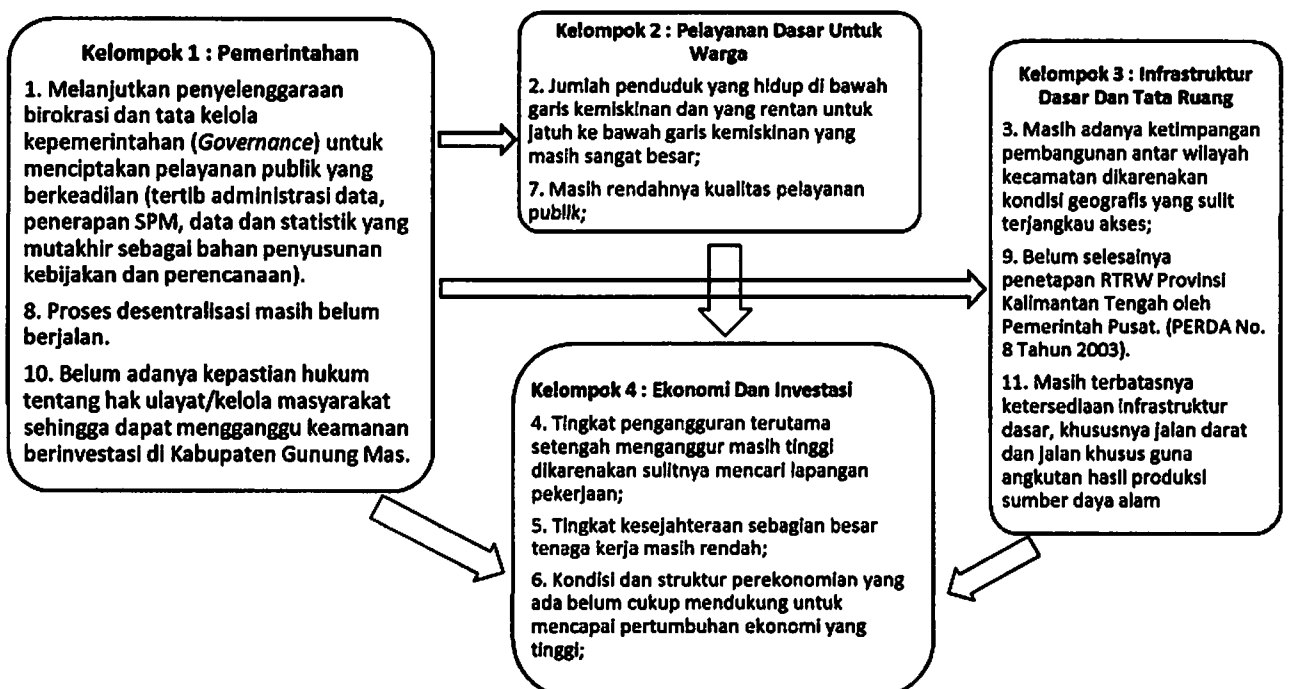
1. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
2. Belum selesainya penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah oleh Pemerintah Pusat. (PERDA No. 8 Tahun 2003);
3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya alam.

Kelompok 4 : Ekonomi Dan Investasi

1. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
2. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
3. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Secara garis besar, pengelompokan masalah strategis dapat dikelompokkan sebagai berikut :

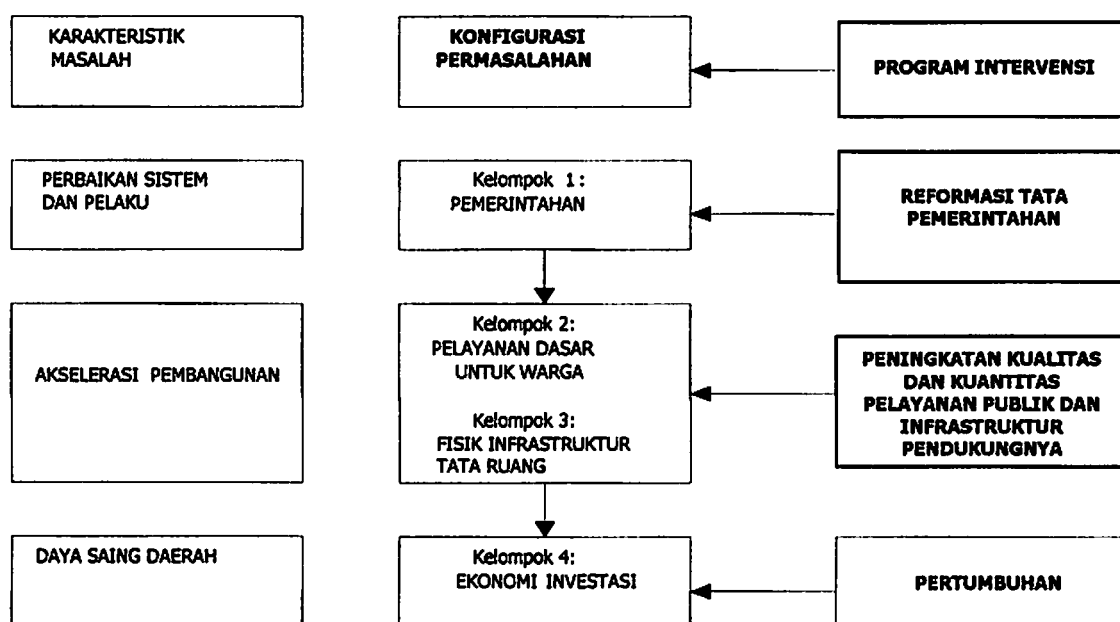
Gambar 4.1. Pengelompokan Isu Strategis



Langkah 2. Membuat Kerangka Relasi Antara Konfigurasi Permasalahan Dengan Program Intervensi

Kerangka program diinterpretasikan bahwa kapasitas pemerintahan yang baik akan berdampak pada kemampuannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan dasar maupun penunjang, yang akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat berupa ketahanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Gunung Mas .

Gambar 4.2. Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2019



Tiga Jenis Percepatan Pembangunan dalam RKPD 2019 hubungannya dengan Misi RPJMD 2014-2019 :

- **Perbaikan Tata Pemerintahan yang mencakup:**
 - Misi 4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan. (sistem dan pelaku).
- **Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan infrastruktur pendukungnya:**
 - Misi 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.
 - Misi 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.

- Misi 5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.
- Misi 7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.

● **Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial**

- Misi 6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah.
- Misi 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.

Langkah 3. Menentukan Prioritas Pelaksanaan Misi

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, intervensi pembangunan dalam RKPD 2019 dikelompokkan ke dalam tiga kelompok intervensi yaitu :

1. Kelompok Intervensi Perbaikan sistem dan pelaku (pemerintah);
2. Kelompok Intervensi Akselerasi pembangunan;
3. Kelompok Intervensi Faktor daya saing daerah.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2019 ada 10 agenda yaitu ;

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
2. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penuaan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;
6. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan

9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.

10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capain prioritas pembangunan dapat tercapai.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
1	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Misi Pertama :Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan	1.Meningkatnya penyelenggaraan dan layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau. 2.Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat	Misi kedua : Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat	1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. 2.Meningkatnya pendapatan masyarakat
3	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi	Misi keenam : Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha,melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah	1.Meningkatnya investasi. 2.Meningkatnya Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani. 3.Meningkatnya tenaga kerja bergelar S-2 dan S-
4	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan	Misi kedua : Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat	1.Meningkatnya daya saing daerah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM. 2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan dan UMKM. 3.Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan. 4.Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. 5.meningkatnya pendapatan masyarakat. 6.meningkatnya sektor industri. 7.meningkatnya sector perdagangan
5	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang	Misi ketiga :Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional	1.Meningkatnya kapasitas dan infrastruktur 2.Meningkatnya konektivitas

6	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Misi Pertama :Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan	1.Meningkatnya penyelenggaraan dan layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau. 2.Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
7	Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya	Misi keenam : Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha,melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah	1.Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. 2.Meningkatnya prestasi olah raga
8	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi	Misi keempat : Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan	1.Meningkatnya pelaksanaan RB. 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja. 3.Opini BPK terhadap laporan keuangan. 4.Meningkatnya kapabilitas APIP. 5.Meningkatnya maturitas SPIP. 6.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
9	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah	Misi keempat : Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan	1.Meningkatnya pengusulan penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah tepat waktu. 2.Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin. 3.Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah
10	Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Misi kelima : Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat	1Menurunnya pencemaran lingkungan. 2.Terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah dan udara

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) pelayanan kesehatan balita;
- e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran
- f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional.
- a) Tenaga Kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- 1) pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
 - 2) akreditasi lembaga pelatihan;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
 - 4) pengembangan infrastruktur yang kompeten;
 - 5) fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
 - 6) pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
 - 7) peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
 - 9) peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
 - 10) pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan
 - 11) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
 - 2) meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - 3) meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - 4) peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
 - 5) meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - 6) peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
 - 7) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- c) Pangan
- 1) pertanian;
 - 2) penataan ruang;
 - 3) kehutanan;

- 4) lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 5) besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B
- d) Pertanahan
- 1) menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;
 - 2) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;
 - 3) menyusun GTRA Daerah;
 - 4) berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
 - 5) menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;
 - 6) menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
 - 7) memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
 - 8) menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat
- e) Lingkungan Hidup
- 1) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
 - 2) masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
 - 3) perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
 - 4) perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
 - 5) perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
 - 6) perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
 - 7) metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;

- 8) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
- 9) upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;
- 10) penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 11) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
- 12) perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- 13) indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
- 14) potensi daerah;
- 15) daya dukung dan daya tampung daerah;
- 16) kemampuan daerah;
- 17) data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
- 18) pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek
 - a) pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - b) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
 - c) pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;
- 19) rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek
 - a) restorasi kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup;

dan

c) rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;

20) Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek

a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b) penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan

c) pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kempaan

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)

3) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:

a) peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;

b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan

c) peningkatan kualitas pelayanan adminduk.

4) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;

2) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

3) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;

- 4) pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;
- 5) pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- 6) pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;
- 7) pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;
- 8) pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan
- 9) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2019

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 tahun 2007 dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
 - e. Program Pendidikan Non Formal;
 - f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
2. Kesehatan, meliputi :
 - a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - g. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
 - k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
 - m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
 - n. Program Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
 - q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa. dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - h. Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan;
 - j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - k. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
 - l. Program Pembangunan Prasarana Sanitasi;
 - m. Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - n. Program Perencanaan Tata Ruang;
 - o. Program Pemanfaatan Ruang;
 - p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
- a. Program Pengembangan Perumahan.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
 - c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
 - d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. Program pendidikan politik masyarakat;
 - f. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik;
 - g. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi;
 - h. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
6. Sosial, meliputi :
- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah;
 - d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja, meliputi :
- a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
 - b. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
 - c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
 - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
 - f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - g. Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi;
 - h. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
 - c. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;

- d. Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak;
 - e. Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
3. Pangan, meliputi :
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
 - b. Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan;
 - c. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan.
4. Pertanahan, meliputi :
- a. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
5. Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - d. Program peningkatan pengendalian polusi;
 - e. Program pengendalian kebakaran hutan;
 - f. Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
 - g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana;
 - h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 - b. Program Pencatatan Sipil;
 - c. Program Pendataan Penduduk.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
 - b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
 - c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 - d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
 - f. Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - h. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. Program Keluarga Berencana;
 - b. Program pelayanan kontrasepsi;
 - c. Program Keluarga Sejahtera;
 - d. Program Pengendalian Penduduk;
 - e. Program Penyuluhan dan Pergerakan KB.
9. Perhubungan, meliputi :
- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - b. Program peningkatan pelayanan angkutan;
 - c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
 - d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
10. Komunikasi dan Informatika
- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 - b. Program pengembangan data/informasi;
 - c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - d. Program kerjasama informasi dengan mas media;
 - e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - f. Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi;
 - g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
- a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
 - d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
12. Penanaman Modal, meliputi :
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - b. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi;

- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 13. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
 - a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- 14. Statistik, meliputi :
 - a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 15. Persandian, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah.
- 16. Kebudayaan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- 17. Perpustakaan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
 - b. Program Pelayanan Perpustakaan;
 - c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 18. Kearsipan, meliputi :
 - a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
 - b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Arsip;
 - d. Program Pelayanan Kearsipan.

III. URUSAN PILIHAN

- 1. Kehutanan, meliputi :
 - a. Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA;
 - b. Program Penataan Kawasan TAHURA;
 - c. Program Pengembangan Ekowisata TAHURA;
 - d. Program Pembangunan Sarana Prasarana TAHURA;
 - e. Program Perlindungan dan Pengawasan.
- 2. Kelautan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Program pengembangan budidaya perikanan;
 - b. Program pengembangan perikanan tangkap;
 - c. Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

- d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
 - e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan.
3. Pariwisata, meliputi :
- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
 - b. Program pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. Program Sarana Promosi Parawisata;
 - d. Program Analisis Pasar Pariwisata;
 - e. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
4. Pertanian, meliputi :
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
 - c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
 - d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 - e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
 - f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
 - g. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
 - h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
 - i. Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan;
 - j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
5. Perdagangan, meliputi :
- a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 - b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Perindustrian, meliputi :
- a. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
7. Transmigrasi, meliputi :
- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi;

IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Administrasi Pemerintahan, meliputi :
- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
 - b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan;

- d. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif;
 - e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Program Kerjasama Pembangunan;
 - h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
 - j. Program Pembinaan Nilai Nilai Sejarah Lokal;
 - k. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 - l. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
 - m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - n. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - o. Program Pembinaan Nilai Nilai Budaya;
 - p. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
 - q. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
 - r. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan;
 - s. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - t. Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan;
 - u. Program peningkatan sarana perekonomian;
 - v. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
 - w. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM;
 - x. Program peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - y. Program peningkatan pelayanan staf ahli.
2. Pengawasan, meliputi :
 - a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 - b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
 3. Perencanaan, meliputi :
 - a. Program pengembangan data/informasi;
 - b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - c. Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar;

- d. Program perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
 - f. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
 - g. Program Pengendalian Infrastruktur;
 - h. Program penelitian dan pengembangan IPTEK;
 - i. Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya.
4. Keuangan, meliputi :
- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Kepegawaian, meliputi :
- a. Program peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
 - b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Program Pendidikan Kedinasan;
 - d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - e. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Target capaian pembangunan Tahun 2019 yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2019
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
Pertumbuhan PDRB (%)	7,25
Laju Inflasi (%)	4,5
Kenaikan PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (%)	33,67
Angka Kemiskinan (%)	5,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00%
Indeks Pembangunan Manusia (%)	75,25
Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan	

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Angka melek huruf (%)	99
Angka Partisipasi Kasar	
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	70
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	90
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	-
Angka Pendidikan yang ditamatkan	
Angka Partisipasi Murni	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,75
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	90
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	-
Fokus Layanan Urusan Wajib	
Pendidikan	
Pendidikan dasar	
SD/MI	
Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	7,10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:22
SMP/MTs	
Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	7,67
Angka Partisipasi Sekolah (%)	99
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:27
Pendidikan Menengah	
Rasio siswa terhadap guru	-
Angka Partisipasi Sekolah (%)	-
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	-
Fasilitas Pendidikan	
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	75,00
Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	70,00
Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	-
Angka Putus Sekolah	
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,01
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	-

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	75,00
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,00
Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-
Angka Kelulusan	
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	-
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-
Kesehatan	
Persentase Balita Gizi Buruk	5
Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	102
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10
Rasio Posyandu per satuan balita	150:satuan balita tahun 2019
Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	154084:92
Rasio Dokter per satuan penduduk	94: penduduk Tahun 2019
Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk	530 : penduduk Tahun 2019
Cakupan Puskesmas	1,45
Cakupan Puskesmas Pembantu	0,74
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	97
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	70
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96
Cakupan Ibu Nifas	97
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	86
Cakupan Kunjungan Bayi	96
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	127
Cakupan pelayanan anak balita	97
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa	95

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
SD dan setingkat	
Cakupan peserta KB aktif	67
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2/100
B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100
C. Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	100
D. Penderita DBD yang ditangani	100
E. Penemuan Penderita Diare	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	55
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,1
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	
Cakupan Desa Siaga Aktif	100
Penataan Ruang	
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	272.778,69
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	43,50
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	155,00
Pekerjaan Umum	
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	28,708%
Rasio Jaringan Irigasi	65%
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	60%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	10,50%
Rasio Rumah Layak Huni	28,613%
Pemukiman Layak Huni (Ha)	970
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935
Perumahan	
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	15.190
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	60%
Rumah Layak Huni (Unit)	19.200
Penataan Ruang	
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	25,66%
Perencanaan Pembangunan	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	Ada

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra PD dengan RPJMD	100,00%
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD	100,00%
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) dan turunannya	100,00%
Perhubungan	
Jumlah Bandara (buah)	-
Jumlah Dermaga Sungai (buah)	-
Jumlah penumpang / barang melalui bandara	
- jumlah penumpang (orang)	360
- jumlah barang (kg)	360
Lingkungan Hidup	
Jumlah duta lingkungan (orang)	26 orang
Jumlah Sekolah Adiwiyata (sekolah)	17 Sekolah
Pencemaran status mutu air (%)	100%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	100%
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100%
Kependudukan dan Catatan Sipil	
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	70
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia
Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	80
Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	60
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	75
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	12,16
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	17,796
Rasio KDRT	3%
Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	6%
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	2,4
Rasio Akseptor KB	1500
Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)	26.939
Keluarga Pra Sejahtera I	18

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Sosial	
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	0
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	6,02%
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Orang)	86%
Ketenagakerjaan	
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	76,9%
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,00%
Ketenagakerjaan	
Jumlah lulusan S1/S2/S3	1,363
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,5%
Koperasi dan UMKM	
Presentase Koperasi Aktif	82,53
Jumlah UMKM	2.987
Jumlah Industri	234
Jumlah Pasar Desa/Kec.	12
Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,26
Presentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	2,63
Penanaman Modal	
Jumlah Investor PMDN	125
Jumlah Investor PMA	20
Presentase Jumlah Perijinan dan non Perijinan	100
lamanya Hari Proses Perijinan	10
Indeks Kepuasan Masyarakat	85
Presentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	100
Kebudayaan	
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	1
Jumlah Kunjungan Wisatawan	5000
Jumlah Objek Wisata Daerah	1
Kebudayaan	
Jumlah Grup/Sanggar Kesenian (Buah)	1
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Pemuda dan Olahraga	
Jumlah Klub Olahraga (buah)	1
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	1
Kepemudaan dan Olahraga	
Jumlah Organisasi Pemuda	1
Jumlah Organisasi Olahraga	1
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1
Jumlah Lapangan Olahraga	1
Pariwisata	
Kunjungan Wisata	5000
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	100%
Kegiatan Pembinaan politik daerah	100%
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Rasio jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk	83
Jumlah LINMAS per jumlah 10.000 penduduk (orang)	610
Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	154
Penegakan PERDA	20
Tersedianya Sistim Informasi Kepegawaian Secara Online (%)	80
Ketahanan Pangan	
Regulasi ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	1
Ketersediaan pangan utama	8,2
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	127 desa/kel
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	96 desa/kel
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 kali
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	447 orang
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	3 desa/kel
Kearsipan	

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Pengelolaan arsip secara baku	
a. Umum	125
b. Pemerintahan	120
c. Politik	80
d. Keamanan dan ketertiban	90
e. Kesejahteraan rakyat	90
f. Perekonomian	90
g. Pekerjaan umum	100
h. Pengawasan	90
i. Kepegawaian	100
j. Keuangan	140
Statistik	
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	Ada
Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	Ada
Komunikasi dan Informatika	
Website milik pemerintah daerah (buah)	34
Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	72
Jumlah Radio/TV lokal	1
Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	0,020
Jumlah Kantor Pos (Unit)	6
Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	8
Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	8
Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	7
Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	14
Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	3
Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	624
Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	2
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24
Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	4
Jumlah Badan Publik PPID	15
Pameran/expo	3
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	80,10
Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	0
Media Luar Ruang (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	15
Perpustakaan	
Jumlah perpustakaan	10
a. Jumlah Perpustakaan umum	44
b. Jumlah perpustakaan sekolah	

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
- . SD/MI	174
- . SMP/MTs	64
- . SMA/MA	21
c. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	65
d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0
e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	0
Jumlah anggota	1550
Jumlah pengunjung	3750
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	54320
Fokus Layanan Urusan Pilihan	
Pertanian dan Peternakan	
Pertanian	
Luas Tanam Tanaman Pangan	
Padi sawah (Ha)	1.150
Padi ladang (Ha)	3.994
Jagung (Ha)	28
Luas Panen Tanaman Pangan	
Padi sawah (Ha)	1.100
Padi ladang (Ha)	3.918
Jagung (Ha)	27
Produktivitas Tanaman Pangan	
Padi sawah (Kwintal/Ha)	46,84
Padi ladang (Kwintal/Ha)	25,5
Jagung (Ton/Ha)	26,56
Produksi Tanaman Pangan	
Padi sawah (Ton)	5.152
Padi ladang (Ton)	12.676
Jagung (Ton)	70
Populasi Ternak	
Kerbau (ekor)	180
Babi (ekor)	28.430
Ayam buras (ekor)	72.640
Ayam ras pedaging (ekor)	74.250
Sapi (ekor)	4.560
Produksi Ternak	
Kerbau (Ton)	2,8
Sapi (Ton)	93
Babi (Ton)	200
Ayam buras (Ton)	72
Ayam ras pedaging (Ton)	398,8
Produksi Telur	
Ayam buras (Ton)	29,5

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Pengembangan/ perluasan area perkebunan	
Karet (Ha)	515
Kelapa Sawit (Ha)	1.006
Produksi Komoditi Perkebunan	
Karet (Ton)	48.595
Kelapa Sawit (Tbs) Ton	6.440
Transmigrasi	
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	97,5
Kehutanan	
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	15.400
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	40.065.650.000
Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	75 Km
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	2.000
Pembangunan KPHP (unit)	0
Pembangunan TAHURA	0
Pembangunan Hutan Desa dan HKm (Unit)	0
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	1
Energi dan Sumber Daya Mineral	
Luas wilayah yang ditertibkan (Ha)	422,948 Ha
Kontribusi sektor pertambangan dari PNBPN dan PAD	12.998.184.000 dan 1.551.000.000
Rasio ketersediaan daya listrik	4,974 MW
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	87,34%
Jumlah Desa berlistrik	109 Desa
Kelautan dan Perikanan	
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	4.668
Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	229.50
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	40
Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	330
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	28,94
Perdagangan	
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	13,26%

FOKUS/BIDANG	TARGET TAHUN 2019
Perindustrian	
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,63%
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	43,71%
Pertumbuhan Industri	50
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	468
Kebencanaan	
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	10
Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	2
Meningkatnya tingkat pemulihan paska bencana non manusia (%)	100

5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2019

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2019 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(3)														
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
1.01	Bidang Pendidikan														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi skpd						3.912.173.054,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan jasa surat menyurat										16.500.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										281.818.112,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										34.534.120,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										57.700.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan alat tulis kantor										242.143.200,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										15.850.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										112.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										28.800.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan bahan logistik kantor										28.800.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										480.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										927.327.622,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										625.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kurun *)										124.240.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Tewah *)										110.360.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Sepang *)										77.940.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara *)										85.090.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rungan *)										103.540.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhing *)										92.740.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Mihing Raya *)										67.990.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Damang Batu *)										89.640.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Miri Manasa *)										77.590.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rungan Hulu *)										73.540.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Manuhing Raya *)										77.690.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD Kecamatan Rungan Barat *)										81.540.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						60.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										30.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(3)												(4)			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										30.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									120.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										120.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									249.200.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)										33.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)										18.800.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)										157.800.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *)										39.600.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									1.684.400.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	pembangunan sarana dan Prasarana bermain										380.600.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengadaan pakaian seragam sekolah										1.079.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Peningkatan kegiatan BOP Pendidikan Anak Usia Dini *)										217.800.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengembangan Pendidikan Sanitasi dan Cinta Lingkungan*)										7.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									15.754.589.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah										1.093.600.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penambahan ruang kelas sekolah										650.600.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penambahan ruang guru sekolah										227.460.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pembangunan pepustakaan sekolah										380.300.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary										107.950.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengadaan pakaian seragam sekolah										2.395.230.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah										114.030.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah										385.300.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan										40.500.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Rakor UAS/UAN Tahap I dan II *)										116.420.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Sekolah *)										876.450.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyelenggaraan UAS/UAN SD/MI dan SMP *)										296.955.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) *)										720.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK) *)										1.139.400.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK) *)										2.100.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) *)										245.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(3)																(4)	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK *)											2.247.784.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengadaan pagar sekolah *)											227.460.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus *)											11.750.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Monitoring dan Evaluasi BOS *)											61.500.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Peningkatan kegiatan DAK SD *)											245.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Peningkatan kegiatan DAK SMP *)											178.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP) *)											1.186.600.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Bimbingan Belajar Bahasa Inggris dan Matematika *)											7.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Rehabilitasi Sedang/Berat WC Sekolah *)											100.300.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary (DAK *)											450.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama (DAK *)											150.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Jumlah pelatihan							137.040.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal											137.040.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi PTK							8.586.315.944,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan											28.060.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah *)											59.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pendegogik Melalui Kelompok Kerja/Musyawahar Kerja Guru Jenjang Sekolah Dasar (1 Kelompnk KKG/Gurus) *)											85.110.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan Jasa Tenaga Kependidikan *)											8.414.145.944,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya pelatihan bagi peningkatan mutu pendidik & pendidikan							187.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyusunan dan Penilaian PAK *)											129.460.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan administrasi beasiswa bagi keluarga tidak mampu *)											21.550.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Penyediaan administrasi beasiswa berprestasi *)											35.990.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan										6.424.000.000,00						
	Peningkatan kegiatan BOS SMP Negeri *)											6.424.000.000,00						
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan										12.251.200.000,00						
	Peningkatan kegiatan BOS SD Negeri *)											12.251.200.000,00						
1:02	Bidang Kesehatan																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran							6.460.493.540,00		Dinas Kesehatan				
	Penyediaan jasa surat menyurat											52.260.000,00		Dinas Kesehatan				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											543.200.000,00		Dinas Kesehatan				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor											95.637.290,00		Dinas Kesehatan				
	Penyediaan alat tulis kantor											110.304.250,00		Dinas Kesehatan				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											96.575.000,00		Dinas Kesehatan				

NO	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program				Pagu Indikatif	Prakaraan Maju	Keterangan	Jenis Kegiatan	1/2/3
					Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur					
(1)	(3)												
	Penyediaan komponen instalasi listrik/generangan bangunan kantor							15.368.000,00	Dinas Kesehatan				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							22.740.000,00	Dinas Kesehatan				
	Penyediaan bahan logistik kantor							423.100.000,00	Dinas Kesehatan				
	Penyediaan makanan dan minuman							14.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							432.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Perkantoran							3.864.824.000,00	Dinas Kesehatan				
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah							790.485.000,00	Dinas Kesehatan				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi						4.516.452.453,00	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat			
	Pembangunan rumah dinas							267.168.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pengadaan mebelur							50.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman							785.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	(Gedung/Lapangan/Rumah)												
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							46.892.488,00	Dinas Kesehatan				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							609.600.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							54.010.000,00	Dinas Kesehatan				
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas							716.107.512,00	Dinas Kesehatan				
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor							640.695.453,00	Dinas Kesehatan				
	Pengadaan Bangunan Tambahan Gedung Kantor							442.978.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pengadaan Sarana Penunjang Gudang Farmasi (DAK) *							102.001.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pengadaan Bangunan Garase Kendaraan Dinas *							490.600.000,00	Dinas Kesehatan				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi						709.300.000,00	Dinas Kesehatan	Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi			
	Pendidikan dan pelatihan formal							280.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal							60.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Puskesmas *							369.300.000,00	Dinas Kesehatan				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Pemberantasan korupsi, reformasi						136.168.500,00	Dinas Kesehatan	Teraksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							16.760.000,00	Dinas Kesehatan				
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD *							19.470.000,00	Dinas Kesehatan				
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *							83.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Peningkatan Pengelolaan Aset Puskesmas *							16.938.500,00	Dinas Kesehatan				
	Program Obat dan Pebejalan Kesehatan	Peningkatan SDM aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan						2.299.460.000,00	Dinas Kesehatan	Cakupan obat dan perbekalan kesehatan			
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan							160.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Peningkatan Mutu Pengungan Obat dan Perbekalan Kesehatan							6.860.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pengadaan Obat dan Ferbekalan Kesehatan (DAK) *							1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) *							46.790.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pengendalian dan Pemertkasan di Bidang Obat, Pangan dan Kosmetik *							133.660.000,00	Dinas Kesehatan				
	Rehabilitasi Gudang Farmasi *							410.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Dukungan Manajemen e-Logistik *							44.260.000,00	Dinas Kesehatan				
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan SDM aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan						270.983.500,00	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat			
	Peningkatan kesehatan masyarakat							65.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan *							180.000.000,00	Dinas Kesehatan				
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Puskesmas *							13.800.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Anak Sekolah *							12.183.500,00	Dinas Kesehatan				
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan SDM aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan						69.876.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pelatihan Tenaga Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten (District Food Inspector)/DFI *							69.876.000,00	Dinas Kesehatan				
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan SDM aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan						10.369.662.000,00	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat			
	Saka Bhakti Husada							23.700.000,00	Dinas Kesehatan				
	Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan							18.600.000,00	Dinas Kesehatan				
	Pengendalian Dukungn Administrasi dan Peningkatan Upaya Manajemen Puskesmas (DAK) *							36.063.300,00	Dinas Kesehatan				
	Peningkatan Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK) *							686.202.700,00	Dinas Kesehatan				
	Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (DAK)							666.409.600,00	Dinas Kesehatan				
	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (DAK)							6.487.181.600,00	Dinas Kesehatan				
	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK)							663.400.000,00	Dinas Kesehatan				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pelaksanaan Fungsi Manajemem (DAK)									970.400.000,00			Dinas Kesehatan	
	Nusantara Sehat (DAK)									500.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Dukungan Manajemem Puskesmas (DAK)									477.704.800,00			Dinas Kesehatan	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat									196.210.000,00			Dinas Kesehatan	
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								177.600.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Orientasi Konseling Menyusui dan MP-ASI *)									18.710.000,00			Dinas Kesehatan	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat									281.207.500,00			Dinas Kesehatan	
	Pengendalian kualitas dan pencemaran air *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								79.600.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Penjamah Makanan Bagi Pemilik Tempat Pengelolaan Makanan *)									20.767.500,00			Dinas Kesehatan	
	Orientasi Pengelolaan Air Minum Laik Sehat *)									51.090.000,00			Dinas Kesehatan	
	Penyelenggaraan Studi Resiko Kesehatan Lingkungan *)									129.850.000,00			Dinas Kesehatan	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular									289.318.000,00			Dinas Kesehatan	
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								54.825.000,00			Dinas Kesehatan	
	Sosialisasi Peningkatan KIE Pencegahan Penyakit Tidak Menular *)									10.680.000,00			Dinas Kesehatan	
	Mobile Voluntary Counseling dan Testing (VCT) HIV AIDS *)									68.300.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium TB *)									28.700.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik *)									27.720.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pencegahan dan Penanggulangan KLB/Wabah Penyakit *)									15.300.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Penguatan E-Sismal dan SKDR *)									13.008.500,00			Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Penguatan Tatalaksana Penyakit Menular *)									12.708.500,00			Dinas Kesehatan	
	Tatalaksana Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Melalui Imunisasi *)									58.076.000,00			Dinas Kesehatan	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan									390.124.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								172.700.000,00			Dinas Kesehatan	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									85.600.000,00			Dinas Kesehatan	
	Penyusunan Profil Kesehatan*)									32.053.500,00			Dinas Kesehatan	
	Penyusunan Profil Ketenagaan*)									16.625.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Penyusunan Perencanaan Dana TP dan DAK*)									17.437.000,00			Dinas Kesehatan	
	Penjaringan Medis dan Paramedis Teladan*)									52.800.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Penyusunan KOMDAT dan SPM Tingkat Kabupaten Gunung Mas *)									13.008.500,00			Dinas Kesehatan	
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin									308.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pelayanan operasi katarak	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								224.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pelayanan sunatan masal									84.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas									9.274.130.810,00			Dinas Kesehatan	
	Pembangunan puskesmas	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								112.760.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pembangunan puskesmas pembantu									242.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu									807.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pengadaan puskesmas keliling (DAK) *)									695.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAU) *)									600.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) *)									3.142.690.101,00			Dinas Kesehatan	
	Pembangunan Puskesmas Pembantu *)									-			Dinas Kesehatan	
	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan *)									157.219.900,00			Dinas Kesehatan	
	Pembangunan puskesmas (DAK)									3.617.470.809,00			Dinas Kesehatan	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit									29.678.612.773,00			Dinas Kesehatan	
	Pembangunan rumah sakit	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								19.864.924.590,00			Dinas Kesehatan	
	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (DAK)									882.704.243,00			Dinas Kesehatan	
	Pengadaan ambulance/mobil jenazah (DAK)									4.508.961.940,00			Dinas Kesehatan	
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *)									4.422.022.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit *)									-			Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan									5.651.848.850,00			Dinas Kesehatan	
	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								2.760.000.000,00			Dinas Kesehatan	
	Kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan *)									296.500.000,00			Dinas Kesehatan	
	Deklarasi ODF *)									71.695.000,00			Dinas Kesehatan	
	Jaminan Persalinan-JAMPERSAL (DAK) *)									2.495.903.000,00			Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Mitra Peduli Kesehatan Jiwa *)									12.430.000,00			Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga *)									15.420.850,00			Dinas Kesehatan	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita									32.030.500,00			Dinas Kesehatan	
	Pertemuan Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								19.847.000,00			Dinas Kesehatan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Balita *)									12.183.500,00		Dinas Kesehatan		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								24.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pelayanan pemeliharaan kesehatan									24.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								120.266.850,00		Dinas Kesehatan		
	Penyeliaan Fasilitatif Program Kesehatan Ibu dan Anak *)									35.129.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator dan Pengelola Laporan KIA *)									16.470.850,00		Dinas Kesehatan		
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir *)									16.167.000,00		Dinas Kesehatan		
	Penyediaan Buku Penunjang Pelayanan KIA *)									52.500.000,00		Dinas Kesehatan		
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			terlaksananya kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien rujukan					1.927.290.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Akreditasi *)									1.124.800.000,00		Dinas Kesehatan		
	Survei Akreditasi Puskesmas *)									336.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Workshop Akreditasi Puskesmas *)									289.200.000,00		Dinas Kesehatan		
	Kaji Banding Akreditasi *)									177.290.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								197.090.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Lintas Sektor dalam Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok *)									13.930.000,00		Dinas Kesehatan		
	Sosialisasi Informasi tentang Peraturan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok *)									58.080.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pertemuan Tim Deteksi Dini pada berbagai jenis Pelayanan Kesehatan *)									11.280.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemantauan terhadap Deteksi Dini Penyakit Akibat Asap Rokok *)									43.400.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pengadaan Alat Deteksi Dini Penyakit Akibat Asap Rokok *)									70.400.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								97.767.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi *)									34.000.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Melitus *)									11.483.500,00		Dinas Kesehatan		
	Penanganan dan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa *)									40.800.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pelatihan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa *)									11.483.500,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								264.390.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									264.390.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								140.885.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									140.885.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								195.306.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									195.306.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								345.791.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									345.791.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								148.923.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									148.923.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								174.199.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									174.199.000,00		Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								208.578.000,00		Dinas Kesehatan		
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)									208.578.000,00		Dinas Kesehatan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									137.016.000,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										137.016.000,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									125.530.000,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										125.530.000,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									11.131.000,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										11.131.000,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									228.976.000,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										228.976.000,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									193.106.000,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										193.106.000,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									119.965.500,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										119.965.500,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									23.537.500,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										23.537.500,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									139.906.000,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										139.906.000,00		Dinas Kesehatan	
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									42.760.000,00		Dinas Kesehatan	
	Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP se Kabupaten Gunung Mas *)										42.760.000,00		Dinas Kesehatan	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.751.265.904,00		RSUD	
	Penyediaan jasa surat menyurat										4.900.000,00		RSUD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										619.560.000,00		RSUD	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										200.000,00		RSUD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										18.400.000,00		RSUD	
	Penyediaan alat tulis kantor										82.159.980,00		RSUD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										218.780.000,00		RSUD	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										26.497.516,00		RSUD	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										24.000.000,00		RSUD	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										3.300.000,00		RSUD	
	Penyediaan bahan logistik kantor										418.150.000,00		RSUD	
	Penyediaan makanan dan minuman										356.800.000,00		RSUD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										352.000.000,00		RSUD	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										7.576.518.408,00		RSUD	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										50.000.000,00		RSUD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	1.191.029.792,00		RSUD	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas										212.865.000,00		RSUD	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										215.459.174,00		RSUD	
	Pengadaan peralatan gedung kantor										85.075.618,00		RSUD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									62.822.000,00		RSUD		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									11.560.000,00		RSUD		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									148.460.000,00		RSUD		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									454.788.000,00		RSUD		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						39.046.355,00		RSUD	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									39.046.355,00		RSUD		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						473.400.000,00		RSUD	
	Pendidikan dan pelatihan formal									153.400.000,00		RSUD		
	Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal*)									320.000.000,00		RSUD		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses						69.412.000,00		RSUD	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									48.975.000,00		RSUD		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)									4.125.000,00		RSUD		
	Pemutakhiran data aset, kepegawaian dan keuangan*)									3.550.000,00		RSUD		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.762.000,00		RSUD		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan obat dan perbekalan kesehatan						130.270.900,00		RSUD	
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan									130.270.900,00		RSUD		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat						200.000.000,00		RSUD	
	Peningkatan kesehatan masyarakat									200.000.000,00		RSUD		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat						94.100.000,00		RSUD	
	Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan									94.100.000,00		RSUD		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Persentase pengembangan lingkungan sehat						15.324.000,00		RSUD	
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat									15.324.000,00		RSUD		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			tersedia dokumen standar pelayanan kesehatan; sistem informasi kesehatan pada						261.665.000,00		RSUD	
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan									201.665.000,00		RSUD		
	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan*)									60.000.000,00		RSUD		
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			tersedianya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan tersedia bahan-ba						5.380.019.999,00		RSUD	
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien laundry ruang tunggu dan lain-lain)									150.923.034,00		RSUD		
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *)									3.613.000.000,00		RSUD		
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAU)									1.616.096.965,00		RSUD		
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan rumah sakit; pemelihara						221.246.050,00		RSUD	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit									221.246.050,00		RSUD		
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									109.220.000,00		RSUD	
	Penyusunan Dokumen Akreditasi *)									109.220.000,00		RSUD		
	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									6.700.000.000,00		RSUD	
	Pelayanan dan pendukung pelayanan *)									6.700.000.000,00		RSUD		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat						40.400.000,00		RSUD	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sekolah Sehat (USS)*)									40.400.000,00		RSUD		
1:03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.379.899.420,00		DPU	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan jasa surat menyurat									8.434.000,00		DPU		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									309.400.000,00		DPU		
	Penyediaan alat tulis kantor									200.000.000,00		DPU		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									126.200.000,00		DPU		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									8.535.000,00		DPU		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									10.080.000,00		DPU		
	Penyediaan bahan logistik kantor									81.500.000,00		DPU		
	Penyediaan makanan dan minuman									18.360.000,00		DPU		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									528.000.000,00		DPU		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									1.929.848.280,00		DPU		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									150.000.000,00		DPU		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor *)									9.542.140,00		DPU		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	20.204.000.000,00		DPU		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									41.000.000,00		DPU		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00		DPU		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									261.000.000,00		DPU		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									60.000.000,00		DPU		
	Perluasan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas (Kontrak Tahun Jamak Tahun 2016-2018 dengan total pagu Rp 9.000.000.000,- *)									3.500.000.000,00		DPU		
	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya *)									50.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Balai Kaharingan Kabupaten Gunung Mas Tahap II *)									2.600.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Gereja GKE Induk Tumbang Miri Tahap II *)									1.000.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Gedung Christian Centre Tahap II *)									1.977.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Pagar Kompleks Perumahan Dinas *)									500.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Rumah Dinas *)									1.000.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas *)									3.000.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas *)									2.700.000.000,00		DPU		
	Rehabilitasi Guest House Gunung Mas *)									1.000.000.000,00		DPU		
	Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas *)									2.000.000.000,00		DPU		
	Penataan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas *)									500.000.000,00		DPU		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	199.000.000,00		DPU		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									199.000.000,00		DPU		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	197.100.000,00		DPU		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									15.200.000,00		DPU		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									12.800.000,00		DPU		
	Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah SKPD *)									35.400.000,00		DPU		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA/RKA Perubahan, DPA/DPPA, SPM dan TEPPRA *)									133.700.000,00		DPU		
	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang							Persentase jumlah jalan & jembatan yg fungsional	#####		DPU		
	Peningkatan Jalan Tumbang Jutuh-Parempel-Harang Karamat (kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp 80.000.000.000,- *)									29.495.337.462,00		DPU		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Peningkatan jalan Tewah-Tumbang Miri (kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp.80.000.000.000,-) *)										26.522.817.300,00		DPU	
	Peningkatan jalan Tumbang Miwan-Sepang Simin (kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp.80.000.000.000,-) *)										28.204.926.600,00		DPU	
	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Bina Marga *)										50.000.000,00		DPU	
	Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Jalan (DAK) *)										139.500.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Simpang Dandang Tumbang Miri - Tumbang Sian (DAK) *)										20.950.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Sepang Simin - km 20 (DAK) *)										10.000.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Tjilik Riwut (DAK) *)										10.000.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Brigjend Katamso (DAK) *)										5.000.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman (DAK) *)										5.000.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Batu Tangkui (DAK) *)										10.000.000.000,00		DPU	
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Jumlah paket perencanaan, pembangunan jalan & jembatan						68.822.400.000,00		DPU	
	Pembangunan Jembatan Sei Hamputung Tahap II *)										7.625.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Manyangan di Desa Tumbang Manyangan Tahap II *)										1.750.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Tumbang Samui - Tukau (DAK) *)										15.275.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Tumbang Malahoi - Tumbang Kuayan (DAK) *)										8.150.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Harang Kramat - Bereng Jun (DAK) *)										15.275.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Menuju Oprit Jembatan Sei Kahayan di Kecamatan Sepang **)										2.000.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Simpang Jalan Kuala Kurun Linau - Tumbang Jutuh - Luwuk Kantor - Tumbang Kaluei (DAK) *)										6.747.400.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Tumbang Sian - Tumbang Siruk **)										3.500.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Tumbang Siruk - Tumbang Napoi **)										3.500.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Tumbang Empas-Sepang Simin *)										5.000.000.000,00		DPU	
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Pengurangan titik genangan air dan Terbangunnya saluran drainase/gorong2						750.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Drainase di Kelurahan Jakatan Raya *)										250.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Drainase Jalan Perintis dan Jalan Nyai Balau dalam Kota Tewah (Lanjutan) *)										500.000.000,00		DPU	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Persentase dari rehab/ pemeliharaan jalan dan jembatan yang fungsional						1.500.000.000,00		DPU	
	Pemeliharaan rutin jalan (UPR) swakelola *)										1.000.000.000,00		DPU	
	Pemeliharaan rutin jembatan (UPR) swakelola *)										500.000.000,00		DPU	
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan						10.000.000,00		DPU	
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat										10.000.000,00		DPU	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Peningkatan luasan DI yang terlayani air irigasi						19.502.500.000,00		DPU	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi di Kabupaten Gunung Mas *)										423.000.000,00		DPU	
	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang SDA *)										50.000.000,00		DPU	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sekata Tewah (DAK) *)										4.104.000.000,00		DPU	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gohong Rawai (DAK) *)										8.555.000.000,00		DPU	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sekata Juri (DAK) *)										6.370.500.000,00		DPU	
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									1.250.000.000,00		DPU	
	Normalisasi sungai Nyaharum *)										1.000.000.000,00		DPU	
	Kajian Lingkungan Embung Tumbang Rahuyan *)										250.000.000,00		DPU	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan						8.010.000.000,00		DPU	
	Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tumbang Rahuyan *)										500.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Tamanggung Jayakarti (Kuala Kurun *)										200.000.000,00		DPU	
	Peningkatan jalan lingkungan jalan Brigjend Katamsa XIII Kuala Kurun *)										300.000.000,00		DPU	
	Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tehang *)										200.000.000,00		DPU	
	Peningkatan jalan lingkungan dan Pembangunan Box Culvert di Desa Taniung Riu (Lanjutan) *)										500.000.000,00		DPU	
	Karya Bhakti Membangun Desa (Swakelola) *)										750.000.000,00		DPU	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan RTA Milono di Sepang Simin *)										500.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan menuju Pemakaman Umum Sangaran Kuala Kurun *)										1.000.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Produksi Desa Batu Nyiwuh *)										500.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan dan Pembangunan Box Culvert di Kelurahan Tumbang Marikoi *)										400.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pahlawan di Kelurahan Tumbang Miri *)										400.000.000,00		DPU	
	Pembukaan Jalan Baru Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah *)										500.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Hendrik Timang Kelurahan Jakatan Raya *)										320.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pandih Batu Kelurahan Tumbang Talaken *)										400.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lamiang Kelurahan Kamouri *)										140.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Bogor Kelurahan Kurun *)										100.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Simpang Jalan Provinsi ke Desa Hurung Bunut *)										800.000.000,00		DPU	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Warga Dalam Kelurahan Tewah *)										500.000.000,00		DPU	
	Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum *)				Peningkatan Sarana dan Prasarana PJU						3.275.724.941,00		DPU	
	Pembayaran rekening PJU kota Kuala Kurun *)										450.000.000,00		DPU	
	Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Tiang PJU kota Kuala Kurun (Swakelola) *)										58.720.000,00		DPU	
	Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Kota Tewah dan Kota Kuala Kurun (Swakelola) *)										43.004.941,00		DPU	
	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kebersihan Pertamanan dan PJU *)										24.000.000,00		DPU	
	Penggantian Tiang PJU dengan PJU Tenaga Surya *)										2.700.000.000,00		DPU	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan *)				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan						1.759.900.000,00		DPU	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan pertamanan (swakelola) *)										1.759.900.000,00		DPU	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				Presentase Peningkatan pengelolaan sampah ramah lingkungan						2.182.350.000,00		DPU	
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan *)										2.182.350.000,00		DPU	
	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman				Terbangunnya Sarana dan Prasarana sanitasi permukiman						160.000.000,00		DPU	
	Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas *)										80.000.000,00		DPU	
	Review Rencana Program Investasi Keciptakarya *)										40.000.000,00		DPU	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(3)																(4)	
	Permutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) *)										40.000.000,00		DPU					
	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)	Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi									2.551.852.432,00		DPU					
	Peningkatan kegiatan SLBM *)										366.852.432,00		DPU					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Tumbang Malahoi (DAK) *)										320.000.000,00		DPU					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Batu Nivwuh (DAK) *)										200.000.000,00		DPU					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Sarerangan (DAK) *)										200.000.000,00		DPU					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Tumbang Pajangei (DAK) *)										200.000.000,00		DPU					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Kelurahan Tewah (DAK) *)										240.000.000,00		DPU					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Kuala Kurun (DAK) *)										320.000.000,00		DPU					
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media Bakteri di Desa Tewang Pajangan (DAK) *)										200.000.000,00		DPU					
	Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Desa Tumbang Malahoi *)										240.000.000,00		DPU					
	Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Kelurahan Tewah *)										165.000.000,00		DPU					
	Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Kuala Kurun*)										100.000.000,00		DPU					
	Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi									11.120.900.000,00		DPU					
	Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional Program PAMSIMAS III *)										86.900.000,00		DPU					
	Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Tewah (DAK) *)										4.909.500.000,00		DPU					
	Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Kurun (DAK) *)										4.619.500.000,00		DPU					
	Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Air Minum (DAK) *)										6.000.000,00		DPU					
	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk (DAK) *)										1.009.000.000,00		DPU					
	Pembangunan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) *)										490.000.000,00		DPU					
	Program peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan rawa	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									9.457.500.319,00		DPU					
	Peningkatan jaringan irigasi D.I Sekata Juri (DAK) *)										1.365.800.000,00		DPU					
	Peningkatan jaringan irigasi D.I Sekata Tewah (DAK) *)										4.078.000.000,00		DPU					
	Peningkatan jaringan irigasi D.I Gohong Rawai (DAK) *)										1.940.000.000,00		DPU					
	Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Sumber Daya Air (DAK) *)										103.200.319,00		DPU					
	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Juri (DAK) *)										725.500.000,00		DPU					
	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Sekata Tewah (DAK) *)										622.500.000,00		DPU					
	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I Gohong Rawai (DAK) *)										622.500.000,00		DPU					
	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									285.000.000,00		DPU					
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang										70.000.000,00		DPU					
	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang										50.000.000,00		DPU					
	Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah RDTRK dan Peta Citra Kota Kuala Kurun *)										75.000.000,00		DPU					
	Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas *)										90.000.000,00		DPU					
	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									220.000.000,00		DPU					
	Penyusunan DED Kawasan Strategis Perkotaan *)										220.000.000,00		DPU					
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									154.250.000,00		DPU					
	Penqawasan pemanfaatan ruang										70.000.000,00		DPU					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di kecamatan *)									84.250.000,00		DPU		
	Program tanggap darurat jalan dan jembatan									222.222.556,00		DPU		
	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat									51.722.556,00		DPU		
	Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Pasaca Bencana *)									155.500.000,00		DPU		
	Penilaian Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana *)									15.000.000,00		DPU		
1.04	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
	Program Pengembangan Perumahan									478.235.500,00		DPU		
	Penyusunan Raperda Perumahan/Permukiman *)									99.970.400,00		DPU		
	Penyusunan Database Perumahan (Lanjutan-Pokjanis) *)									145.675.100,00		DPU		
	Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman *)									182.590.000,00		DPU		
	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan dan Pemukiman *)									50.000.000,00		DPU		
	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPS)									48.230.000,00		DPU		
	Kegiatan Sanitasi dan Pengendalian Pembangunan Penataan Permukiman *)									48.230.000,00		DPU		
1.05	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1.155.678.540,00		Kesbangpol		
	Penyediaan jasa surat menyurat									16.500.000,00		Kesbangpol		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									54.868.000,00		Kesbangpol		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									203.940,00		Kesbangpol		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									19.897.500,00		Kesbangpol		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									21.800.000,00		Kesbangpol		
	Penyediaan alat tulis kantor									99.750.300,00		Kesbangpol		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									94.035.400,00		Kesbangpol		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									8.565.000,00		Kesbangpol		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									11.400.000,00		Kesbangpol		
	Penyediaan bahan logistik kantor									63.470.000,00		Kesbangpol		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									292.000.000,00		Kesbangpol		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									333.188.400,00		Kesbangpol		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									140.000.000,00		Kesbangpol		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									83.825.000,00		Kesbangpol		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									8.000.000,00		Kesbangpol		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									25.825.000,00		Kesbangpol		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		Kesbangpol		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									25.000.000,00		Kesbangpol		
	Program peningkatan disiplin aparatur									21.800.000,00		Kesbangpol		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									21.600.000,00		Kesbangpol		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									64.000.000,00		Kesbangpol		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									64.000.000,00		Kesbangpol		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD									6.000.000,00		Kesbangpol		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									6.000.000,00		Kesbangpol		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							227.437.300,00		Kesbangpol		
	Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing *)									39.800.000,00		Kesbangpol		
	Penanganan Konflik di Daerah *)									39.100.000,00		Kesbangpol		
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan *)									15.760.000,00		Kesbangpol		
	Forum Kawaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) *)									73.877.100,00		Kesbangpol		
	Peningkatan Kawaspadaan Dini Masyarakat di Daerah *)									58.900.200,00		Kesbangpol		
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak		Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							161.301.800,00		Kesbangpol		
	Komoditas Intelejen Daerah *)									41.880.000,00		Kesbangpol		
	Rencana Aksi Daerah *)									119.421.800,00		Kesbangpol		
	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							133.492.000,00		Kesbangpol		
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) *)									54.377.000,00		Kesbangpol		
	Forum Bela Negara (FBN) *)									53.615.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental *)									25.500.000,00		Kesbangpol		
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							339.492.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa *)									53.710.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara *)									55.210.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda *)									53.530.000,00		Kesbangpol		
	Sarasehan Pembauran Kebangsaan Untuk Memperkokoh Persatuan Bagi Tomas, Toga dan Tokoh Adat *)									63.295.000,00		Kesbangpol		
	Ikrar Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalteng *)									123.747.000,00		Kesbangpol		
	Program pendidikan politik masyarakat		Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							302.851.500,00		Kesbangpol		
	Penyusunan data base partai politik									25.701.500,00		Kesbangpol		
	Peningkatan Demokratisasi *)									53.025.000,00		Kesbangpol		
	Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik *)									121.600.000,00		Kesbangpol		
	Pelatihan Teknis dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Ormas dan Parpol *)									51.125.000,00		Kesbangpol		
	Desk Pilkada Kabupaten Gunung Mas *)									51.500.000,00		Kesbangpol		
	Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik *)		Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							119.999.900,00		Kesbangpol		
	Peningkatan kerjasama Pemerintah dalam rangka ketahanan Sosial Budaya *)									51.500.000,00		Kesbangpol		
	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan ketahanan ekonomi dan sosial budaya se Kabupaten Gunung Mas *)									16.999.900,00		Kesbangpol		
	Sarasehan peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan umat Beragama *)									51.500.000,00		Kesbangpol		
	Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi *		Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah							51.500.000,00		Kesbangpol		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketahanan Sosial Budaya *)									51.500.000,00		Kesbangpol		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							4.078.392.766,00		SatpolIPP		
	Penyediaan jasa surat menyurat									7.920.000,00		SatpolIPP		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									73.500.000,00		SatpolIPP		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									17.350.520,00		SatpolIPP		
	Penyediaan alat tulis kantor									37.269.090,00		SatpolIPP		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									20.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									11.775.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									68.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									16.200.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan bahan logistik kantor									74.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan makanan dan minuman									5.295.000,00		SatpolPP		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									224.000.000,00		SatpolPP		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									3.463.083.156,00		SatpolPP		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									60.000.000,00		SatpolPP		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					167.142.536,00		SatpolPP		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									22.142.536,00		SatpolPP		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									100.000.000,00		SatpolPP		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									45.000.000,00		SatpolPP		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					4.892.000,00		SatpolPP		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									108.000.000,00		SatpolPP		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					108.000.000,00		SatpolPP		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									18.850.000,00		SatpolPP		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					14.200.000,00		SatpolPP		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									4.650.000,00		SatpolPP		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									510.040.000,00		SatpolPP		
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah			Meningkatnya kemampuan SD aparat satpol pp dalam operasi penegakan PERDA					59.840.000,00		SatpolPP		
	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat									50.000.000,00		SatpolPP		
	Pendataan anggota Linmas *)									400.200.000,00		SatpolPP		
	Pengadaan Pakaian Hansip Petugas Pengamanan TPS *)									410.500.000,00		SatpolPP		
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak pidana	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah			Terpeliharanya dan terciptanya kantrantibmas & pencegahan tindak kriminal					235.500.000,00		SatpolPP		
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pengawasan *)									175.000.000,00		SatpolPP		
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penegakan Perda dan Peraturan lainnya *)									222.000.000,00		SatpolPP		
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah			Terkendalinya keamanan n kenyamanan pd rumah jabatan					222.000.000,00		SatpolPP		
	Pembentukan Satuan Keamanan Rumah Jabatan *)													
1.06	Bidang Sosial													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.287.255.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa surat menyurat									3.177.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									97.500.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									13.285.000,00		Dinsos		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									38.700.000,00		Dinsos		
	Penyediaan alat tulis kantor									84.975.000,00		Dinsos		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									10.600.000,00		Dinsos		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									13.000.000,00		Dinsos		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									18.000.000,00		Dinsos		
	Penyediaan bahan logistik kantor									52.000.000,00		Dinsos		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									240.000.000,00		Dinsos		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									531.018.000,00		Dinsos		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									185.000.000,00		Dinsos		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					176.025.000,00		Dinsos		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									33.725.000,00		Dinsos		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									76.700.000,00		Dinsos		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00		Dinsos		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		Dinsos		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									25.600.000,00		Dinsos		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					56.700.000,00		Dinsos		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									56.700.000,00		Dinsos		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					59.500.000,00		Dinsos		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									59.500.000,00		Dinsos		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					43.600.000,00		Dinsos		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									7.800.000,00		Dinsos		
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									2.320.000,00		Dinsos		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									1.880.000,00		Dinsos		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)									8.000.000,00		Dinsos		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									12.100.000,00		Dinsos		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									10.500.000,00		Dinsos		
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SOPD *)									1.000.000,00		Dinsos		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									2.250.000,00		Dinsos		
	Penyusunan Analisis Jabatan dan SOP dan Standart Operasional Prosedur (SOP) SOPD *)									2.250.000,00		Dinsos		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial			adanya lokasi KAT, adanya persiapan dalam pembangunan sarana dan prasarana					330.400.000,00		Dinsos		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin									175.100.000,00		Dinsos		
	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) *)									155.300.000,00		Dinsos		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial			terlaksananya penanganan masalah strategis untuk kesejahteraan masyarakat					67.000.000,00		Dinsos		
	Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dalam Keluarga *)									67.000.000,00		Dinsos		
	Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial								123.000.000,00		Dinsos		
	Pengembangan dan Pemberdayaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah *)									123.000.000,00		Dinsos		
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial			Terlaksananya pemberdayaan berupa pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat					256.050.000,00		Dinsos		
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma									66.000.000,00		Dinsos		
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma									190.050.000,00		Dinsos		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial								999.400.000,00		Dinsos		
	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial *)									42.300.000,00		Dinsos		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan *)									167.600.000,00		Dinsos		
	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan *)									601.200.000,00		Dinsos		
	KOMDA Lansia *)									68.000.000,00		Dinsos		
	Pemberdayaan Karang Taruna *)									40.300.000,00		Dinsos		
	Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi *)									80.000.000,00		Dinsos		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Penanggulangan kemiskinan dan kesenian sosial						249.500.000,00		Dinsos		
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa									191.100.000,00		Dinsos		
	Peningkatan dan pelayanan program Keluarga Harapan (PKH *)									58.400.000,00		Dinsos		
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks nara)			Penanggulangan kemiskinan dan kesenian sosial						25.000.000,00		Dinsos		
	Sosialisasi Pencegahan penanggulangan penyakit HIV AIDS *)									12.000.000,00		Dinsos		
	Sosialisasi penanggulangan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya *)									13.000.000,00		Dinsos		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2:01	Bidang Tenaga Kerja													
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat					terlaksananya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausaha	268.850.000,00		Distransnakerkop & UMK		
	Penyiapan tenaga kerja siap pakai									268.850.000,00		Distransnakerkop & UMK		
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga			Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat					adanya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan daerah	167.340.000,00		Distransnakerkop & UMK		
	Penyusunan dan Penetapan UMK Tahun 2019 *)									49.440.000,00		Distransnakerkop & UMK		
	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial *)									43.230.000,00		Distransnakerkop & UMK		
	Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja *)									74.670.000,00		Distransnakerkop & UMK		
	Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi *)			Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat						37.813.300,00		Distransnakerkop & UMK		
	Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja *)									37.813.300,00		Distransnakerkop & UMK		
2:02	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	991.622.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan jasa surat menyurat									5.100.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									117.600.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									5.750.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									11.573.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan alat tulis kantor									65.119.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									23.650.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									6.330.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									3.600.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan bahan logistik kantor									26.400.000,00		Dinas P3A		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									152.000.000,00		Dinas P3A		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									454.500.000,00		Dinas P3A		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)													(4)			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										120.000.000,00				Dinas P3A		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					326.325.000,00				Dinas P3A		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										131.725.000,00				Dinas P3A		
	Pengadaan peralatan gedung kantor										97.400.000,00				Dinas P3A		
	Pengadaan mebeleur										77.500.000,00				Dinas P3A		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										19.700.000,00				Dinas P3A		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					26.460.000,00				Dinas P3A		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya										26.460.000,00				Dinas P3A		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					48.000.000,00				Dinas P3A		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										48.000.000,00				Dinas P3A		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi				Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					21.340.000,00				Dinas P3A		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										8.590.000,00				Dinas P3A		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)										12.750.000,00				Dinas P3A		
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kesenian Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan kesenian sosial									334.075.000,00				Dinas P3A		
	Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) *)										91.800.000,00				Dinas P3A		
	Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bagi Focal Point SOPD *)										61.300.000,00				Dinas P3A		
	Pelatihan bagi Pekerja perempuan *)										47.050.000,00				Dinas P3A		
	Sosialisasi bagi perempuan dalam Jabatan Publik *)										47.350.000,00				Dinas P3A		
	Pusat Pembelajaran Keluarga *)										86.575.000,00				Dinas P3A		
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam kesenian sosial	Penanggulangan kemiskinan dan kesenian sosial									127.000.000,00				Dinas P3A		
	Pembinaan dan Pengembangan P2TP2A *)										63.000.000,00				Dinas P3A		
	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) *)										64.000.000,00				Dinas P3A		
	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak *)	Penanggulangan kemiskinan dan kesenian sosial									224.000.000,00				Dinas P3A		
	Penyuluhan Pola Asuh Anak Berdasarkan Hak Anak *)										137.340.000,00				Dinas P3A		
	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak *)										39.570.000,00				Dinas P3A		
	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perkawinan Usia Anak *)										47.090.000,00				Dinas P3A		
	Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak *)	Penanggulangan kemiskinan dan kesenian sosial									199.978.000,00				Dinas P3A		
	Penyediaan Informasi P2TP2A *)										37.500.000,00				Dinas P3A		
	Pemutakhiran Data Terpisah Perempuan dan Anak *)										162.478.000,00				Dinas P3A		
	Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penanggulangan kemiskinan dan kesenian sosial									71.200.000,00				Dinas P3A		
	Penyuluhan Pencegahan KDRT terhadap Perempuan dan Anak *)										71.200.000,00				Dinas P3A		
2.04	Bidang Pertanahan																
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah									28.000.000,00				Dishuthan		
	Kerjasama Penyelesaian Tata Batas Antar Daerah *)										28.000.000,00				Dishuthan		
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pertanahan	Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah				tersedianya tanah pemda, sertifikat tanah pemda dan sertifikasi secara gratis kpd					162.000.000,00				Dishuthan		
	Penegasan Tapal Batas antar Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas *)										162.000.000,00				Dishuthan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan						
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3			
(1)	(3)																(4)		
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)											33.500.000,00			Dishuthan				
	Penyelesaian Tata Batas Antar Daerah *)											33.500.000,00			Dishuthan				
2:05	Bidang Lingkungan Hidup																		
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										213.108.000,00			DLH				
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya bencana *)											135.108.000,00			DLH				
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran *)											78.000.000,00			DLH				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										1.472.547.000,00			DLH				
	Penyediaan jasa surat menyurat											9.990.000,00			DLH				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											79.800.000,00			DLH				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor											10.000.000,00			DLH				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja											26.424.112,00			DLH				
	Penyediaan alat tulis kantor											81.549.000,00			DLH				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											27.450.000,00			DLH				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor											8.600.000,00			DLH				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan											6.318.000,00			DLH				
	Penyediaan bahan logistik kantor											52.000.000,00			DLH				
	Penyediaan makanan dan minuman											7.575.000,00			DLH				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah											448.000.000,00			DLH				
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran											564.840.888,00			DLH				
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)											150.000.000,00			DLH				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										238.045.000,00			DLH				
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor											28.625.000,00			DLH				
	Pengadaan peralatan gedung kantor											100.500.000,00			DLH				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor											21.000.000,00			DLH				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											87.920.000,00			DLH				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										24.570.000,00			DLH				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya											24.570.000,00			DLH				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										296.500.000,00			DLH				
	Pendidikan dan pelatihan formal											296.500.000,00			DLH				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										18.600.000,00			DLH				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											18.600.000,00			DLH				
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										1.459.074.000,00			DLH				
	Pemantauan Kualitas Lingkungan											616.788.000,00			DLH				
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup											93.200.000,00			DLH				
	Sosialisasi Pengaduan Kasus Lingkungan *)											94.400.000,00			DLH				
	Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3 *)											161.750.000,00			DLH				
	Sosialisasi pengolahan Emas Ramah Lingkungan *)											104.350.000,00			DLH				
	Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 *)											83.500.000,00			DLH				
	Pelatihan Bank Sampah *)											259.436.000,00			DLH				
	Sosialisasi Penilaian Kota Sehat/Adipura *)											45.650.000,00			DLH				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				Terjaganya kelestarian sumber daya alam						149.750.000,00		DLH	
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim										68.300.000,00		DLH	
	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air										81.450.000,00		DLH	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Da				dokumen KLHS						558.500.000,00		DLH	
	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang										92.050.000,00		DLH	
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan										72.500.000,00		DLH	
	Penyusunan Laporan SLHD *)										300.000.000,00		DLH	
	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *)										38.450.000,00		DLH	
	Inventarisasi MHA, Kearifan Lokal Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan *)										55.500.000,00		DLH	
	Pembelajaran Sekolah Adiwiyata dan Adiwiyata Mandiri *)										63.050.000,00		DLH	
	Program peningkatan pengendalian polusi				Terkendalinya polusi melalui tersedianya data polusi udara, air, tanah dan limbah						63.050.000,00		DLH	
	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair										63.050.000,00		DLH	
	Program pengendalian kebakaran hutan				Menurunnya frekuensi kebakaran hutan melalui kegiatan sosialisasi						107.300.000,00		DLH	
	Pengendalian kebakaran hutan *)										107.300.000,00		DLH	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.207.865.866,00		BPBD	
	Penyediaan jasa surat menyurat										5.750.000,00		BPBD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										74.640.000,00		BPBD	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										200.000,00		BPBD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										8.330.812,00		BPBD	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										28.931.874,00		BPBD	
	Penyediaan alat tulis kantor										45.027.600,00		BPBD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										19.000.000,00		BPBD	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										7.097.500,00		BPBD	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										10.800.000,00		BPBD	
	Penyediaan bahan logistik kantor										58.180.000,00		BPBD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										240.000.000,00		BPBD	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										606.198.080,00		BPBD	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										157.500.000,00		BPBD	
	Penyediaan jasa ekspedisi *)										47.210.000,00		BPBD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						570.440.000,00		BPBD	
	Pembangunan gedung kantor										30.000.000,00		BPBD	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										33.350.000,00		BPBD	
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah **)										320.000.000,00		BPBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										25.000.000,00		BPBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										25.000.000,00		BPBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										137.090.000,00		BPBD	
	Program peningkatan disiplin aparatur				Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						25.000.000,00		BPBD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya										25.000.000,00		BPBD	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						40.000.000,00		BPBD	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										40.000.000,00		BPBD	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD				Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						30.720.000,00		BPBD	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										9.570.000,00		BPBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membanun, updating dan pemeliharaan)										174.100.000,00		Disdukcapi	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan										173.700.000,00		Disdukcapi	
	Pengolahan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan *)										32.879.000,00		Disdukcapi	
	Pelaksanaan kebijakan kependudukan *)										120.600.000,00		Disdukcapi	
	Pelayanan Administrasi Kependudukan *)										900.201.000,00		Disdukcapi	
	Program Pencatatan Sipil *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									248.150.000,00		Disdukcapi	
	Pendataan dan Pelayanan Pencatatan Sipil Perkawinan dan Perceraian *)										48.000.000,00		Disdukcapi	
	Pendataan dan Pelayanan Akta Kelahiran *)										157.350.000,00		Disdukcapi	
	Pelayanan Bidang Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian *)										42.800.000,00		Disdukcapi	
	Program Pendataan Penduduk *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									38.000.000,00		Disdukcapi	
	Pendataan Pelayanan Penduduk *)										38.000.000,00		Disdukcapi	
2.07	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.842.334.600,00		DPMD	
	Penyediaan jasa surat menyurat										9.998.000,00		DPMD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										283.200.000,00		DPMD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										8.496.000,00		DPMD	
	Penyediaan alat tulis kantor										119.222.098,00		DPMD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										56.360.000,00		DPMD	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										2.000.000,00		DPMD	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										71.000.190,00		DPMD	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										9.000.000,00		DPMD	
	Penyediaan bahan logistik kantor										43.100.000,00		DPMD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										300.000.000,00		DPMD	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										699.959.312,00		DPMD	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										240.000.000,00		DPMD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									78.400.000,00		DPMD	
	Pengadaan peralatan gedung kantor										8.000.000,00		DPMD	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										6.000.000,00		DPMD	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										25.000.000,00		DPMD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										30.000.000,00		DPMD	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										9.400.000,00		DPMD	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									64.260.000,00		DPMD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya										32.130.000,00		DPMD	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu										32.130.000,00		DPMD	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									15.200.000,00		DPMD	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										1.460.000,00		DPMD	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)										13.740.000,00		DPMD	
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat									1.100.000.000,00		DPMD	
	Pembangunan Kantor Kelurahan Rabambang *)										600.000.000,00		DPMD	
	Pembangunan Pagar dan Siring Kantor Kelurahan Tumbang Rahuyan *)										500.000.000,00		DPMD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)																(4)
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat										342.755.000,00		DPMD			
	rapat Koordinasi Satker P3MD *)											166.960.000,00		DPMD			
	Advokasi Pokjanal Posyandu*)											69.465.000,00		DPMD			
	Lomba Pokjanal Posyandu *)											106.330.000,00		DPMD			
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat										172.402.000,00		DPMD			
	Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *)											62.382.000,00		DPMD			
	Pembinaan Pelaporan Keuangan BUMDesa *)											55.170.000,00		DPMD			
	Sosialisasi Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) *)											54.850.000,00		DPMD			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat										478.110.000,00		DPMD			
	Lomba Desa*											196.250.000,00		DPMD			
	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat*											160.000.000,00		DPMD			
	Pembinaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa *)											121.860.000,00		DPMD			
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										2.541.612.100,00		DPMD			
	Pelantikan Kepala Desa dan Lain-lain *)											203.270.000,00		DPMD			
	Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kepala Desa *)											154.500.000,00		DPMD			
	Pemilihan Kepala Desa *)											1.512.205.100,00		DPMD			
	Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Keuangan Desa *)											61.400.000,00		DPMD			
	Peningkatan Kualitas Updating Profil Desa *)											110.000.000,00		DPMD			
	Pengamanan PILKADES Serentak *)											290.000.000,00		DPMD			
	Workshop Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *)											210.237.000,00		DPMD			
	Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan tekn	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										183.915.000,00		DPMD			
	Pendampingan dan Pembinaan Desa Program Pamsimas *)											35.500.000,00		DPMD			
	Pembinaan dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna *)											72.000.000,00		DPMD			
	Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pengembangan POSYANTEK/WARTEK/WARTEKDES *)											76.415.000,00		DPMD			
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										85.350.000,00		DPMD			
	Tim Verifikasi Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa *)											85.350.000,00		DPMD			
	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										148.410.000,00		DPMD			
	Pembinaan Administrasi Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) *)											148.410.000,00		DPMD			
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										24.600.000,00		DPMD			
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)											24.600.000,00		DPMD			
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										24.060.000,00		DPMD			
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)											24.060.000,00		DPMD			
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										24.000.000,00		DPMD			
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)											24.000.000,00		DPMD			
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										24.120.000,00		DPMD			
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)											24.120.000,00		DPMD			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								9.500.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									9.500.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								49.500.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									49.500.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.000.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.000.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								21.150.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									21.150.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								24.000.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									24.000.000,00		DPMD		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								14.000.000,00		DPMD		
	Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)									14.000.000,00		DPMD		
2.08	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.014.737.180,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan jasa surat menyurat									6.000.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									96.000.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									6.601.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan alat tulis kantor									54.518.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									17.315.300,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									3.220.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									5.400.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan bahan logistik kantor									75.600.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan makanan dan minuman									1.866.880,00		Didaldu & KB		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									116.000.000,00		Didaldu & KB		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									507.216.000,00		Didaldu & KB		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									125.000.000,00		Didaldu & KB		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					263.436.070,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									36.500.000,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									96.500.000,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan Pagur dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah **)									10.000.000,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.572.620,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									71.663.450,00		Didaldu & KB		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									8.200.000,00		Didaldu & KB		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					26.810.000,00		Didaldu & KB		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									26.810.000,00		Didaldu & KB		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					62.500.000,00		Didaldu & KB		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									62.500.000,00		Didaldu & KB		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(3)														(4)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								16.694.500,00		Didalduk & KB			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan akhir tahun									1.544.500,00		Didalduk & KB			
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *									1.900.000,00		Didalduk & KB			
	Program Keluarga Berencana	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								13.250.000,00		Didalduk & KB			
	Pelayanan TKBK *)									103.080.000,00		Didalduk & KB			
	Penjaringan Peserta Lomba Program KB Tingkat Kabupaten Gunung Mas *)									73.580.000,00		Didalduk & KB			
	Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								29.500.000,00		Didalduk & KB			
	Pelayanan Bhakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Kecamatan *)									187.085.000,00		Didalduk & KB			
	Pelayanan KB-Kes-PKK Tingkat Kabupaten *)									51.690.000,00		Didalduk & KB			
	Pelayanan KB Perusahaan *)									49.730.000,00		Didalduk & KB			
	Pelayanan Bulan Bakti KB Kes Bhayangkara Tingkat Kecamatan *)									35.115.000,00		Didalduk & KB			
	Program Keluarga Sejahtera *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								51.550.000,00		Didalduk & KB			
	Pelatihan Pendidik Sebaya *)									285.000.000,00		Didalduk & KB			
	Advokasi dan KIE tentang Generasi Berencana *)									57.187.000,00		Didalduk & KB			
	Pembinaan dan Pembentukan Kelompok UPPKS *)									62.979.000,00		Didalduk & KB			
	Pembinaan Kelompok BKB									65.834.000,00		Didalduk & KB			
	Program Pengendalian Penduduk *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								99.000.000,00		Didalduk & KB			
	Lomba Karya Tulis dan Pidato Kependudukan *)									258.327.250,00		Didalduk & KB			
	Penyusunan Aplikasi Pendataan Kependudukan *)									56.400.000,00		Didalduk & KB			
	Advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan *)									101.950.000,00		Didalduk & KB			
	Pembinaan Petugas Pengelola Laporan Data Statistik Rutin Klinik KB *)									43.020.000,00		Didalduk & KB			
	Sosialisasi Hasil Pemutahiran Data Keluarga *)									33.011.150,00		Didalduk & KB			
	Program Penyuluhan dan Pergerakan KB *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								23.946.100,00		Didalduk & KB			
	Sosialisasi Program KKBPB bagi petugas Pernikahan se-Kabupaten Gunung Mas *)									282.330.000,00		Didalduk & KB			
	Advokasi dan KIE tentang Program KKBPB *)									31.800.000,00		Didalduk & KB			
	Pelayanan, Penyelenggaraan dan Rapat Pembinaan Penyuluh KKBPB *)									44.660.000,00		Didalduk & KB			
	Pembinaan dan Penilaian Kader KKBPB *)									50.170.000,00		Didalduk & KB			
	Program Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Penyuluhan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								155.700.000,00		Didalduk & KB			
	Pengadaan Sarana Pendataan *)									807.247.000,00		Didalduk & KB			
	Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB *)									42.500.000,00		Didalduk & KB			
	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB *)									602.831.000,00		Didalduk & KB			
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								161.916.000,00		Didalduk & KB			
	Pembinaan Program KKBPB Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD *)									2.584.140.000,00		Didalduk & KB			
	Operasional Balai Penyuluh KB *)									762.000.000,00		Didalduk & KB			
	Operasional Distribusi Alokasi *)									450.000.000,00		Didalduk & KB			
	Operasional Penggerakan di Kampung KB *)									19.500.000,00		Didalduk & KB			
	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB *)									1.080.000.000,00		Didalduk & KB			
										272.640.000,00		Didalduk & KB			
2:09	Bidang Perhubungan														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								1.365.269.750,00		Dishub			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan jasa surat menyurat									10.200.000,00			Dishub	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									163.600.000,00			Dishub	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									14.257.900,00			Dishub	
	Penyediaan alat tulis kantor									55.678.000,00			Dishub	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									30.235.000,00			Dishub	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									8.195.000,00			Dishub	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									8.000.000,00			Dishub	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									16.200.000,00			Dishub	
	Penyediaan bahan logistik kantor									81.600.000,00			Dishub	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									224.000.000,00			Dishub	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									478.190.400,00			Dishub	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									212.500.000,00			Dishub	
	Penyediaan bahan logistik pengujian kendaraan bermotor *)									62.713.450,00			Dishub	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						241.511.550,00		Dishub	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									9.720.000,00			Dishub	
	Pengadaan peralatan gedung kantor									48.500.000,00			Dishub	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									9.001.550,00			Dishub	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									122.660.000,00			Dishub	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									26.630.000,00			Dishub	
	Peningkatan kualitas gedung kantor *)									25.000.000,00			Dishub	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						50.400.000,00		Dishub	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									50.400.000,00			Dishub	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						112.000.000,00		Dishub	
	Pendidikan dan pelatihan formal									112.000.000,00			Dishub	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						53.500.000,00		Dishub	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									23.800.000,00			Dishub	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									2.050.000,00			Dishub	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									2.500.000,00			Dishub	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)									12.250.000,00			Dishub	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.900.000,00			Dishub	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			peningkatan kelancaran arus transportasi						11.000.000,00		Dishub	
	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Dermaga Sungai *)									11.000.000,00			Dishub	
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Peningkatan sarana prasarana angkutan						239.466.000,00		Dishub	
	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan									82.269.000,00			Dishub	
	Pengawasan dan pengendalian rutin arus lalu lintas jalan darat *)									51.600.000,00			Dishub	
	Pelatihan Petugas Parkir *)									12.295.000,00			Dishub	
	Sosialisasi dan Penertiban Simpatik Transportasi Sungai *)									43.302.000,00			Dishub	
	Pengawasan dan Pengendalian Rutin LLASDP *)									50.000.000,00			Dishub	
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Jumlah Fasilitas Peningkatan keselamatan lalulintas						437.687.000,00		Dishub	
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas									127.500.000,00			Dishub	
	Pengadaan Marka Jalan (DAU) *)									200.000.000,00			Dishub	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Perawatan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi darat *) Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan *)									45.000.000,00		Dishub		
	Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								141.815.700,00		Dishub		
	Pengadaan Material dan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor *)									35.460.000,00		Dishub		
	Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor *)									57.765.700,00		Dishub		
	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor *)									8.600.000,00		Dishub		
	Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor *)									40.000.000,00		Dishub		
2:10	Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.045.078.340,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Penyediaan jasa surat menyurat									4.500.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									87.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									11.796.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									25.294.340,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan alat tulis kantor									56.577.112,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									5.550.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									7.350.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									59.820.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									26.400.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan bahan logistik kantor									57.150.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									120.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									548.640.888,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									35.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						350.265.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Pembangunan gedung kantor									300.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									7.765.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									42.500.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						23.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									23.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						84.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Pendidikan dan pelatihan formal									84.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						47.845.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(3)																(4)	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran										2.200.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun										2.200.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)										22.845.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)										20.600.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									238.275.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh*)										30.000.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio Rekaman *)										165.075.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pendataan desa yang tidak bersignal *)										43.200.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program kerjasama informasi dengan mas media	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									35.000.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat dan Peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi										35.000.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									3.922.855.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah *)										3.424.500.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pembinaan dan pengelolaan radio *)										460.500.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruangan *)										37.855.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									156.890.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pemenuhan SDM Sandi Daerah melalui Keikutsertaan dalam Diklat Teknis Persandian, Diklat Pembentukan Sandiman dan Diklat Fungsional Sandiman*)										86.000.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengamanan informasi strategis *)										22.890.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Penyelenggaraan Persandian Daerah *)										48.000.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									410.062.400,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *)										278.712.400,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengendalian Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *)										112.900.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE *)										18.450.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									34.500.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengkajian dan Pengembangan TataKelola E- Government *)										34.500.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									31.109.260,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)										31.109.260,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Program Aplikasi dan Informatika *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									179.250.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat *)										70.000.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)										109.250.000,00							Diskominfo Statistik & Persandian

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemda & informasi yg bersifat penyuluhan						126.845.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum *)									84.595.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Pengadaan Cetak Informasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)									42.250.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Program kerjasama informasi dengan mas media	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang									270.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Penyebarluasan informasi Program dan Kegiatan SKPD *)										270.000.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Terpeliharanya peralatan komunikasi kecamatan						1.490.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
	Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan rutin alat/material teknologi komunikasi dan informatika *)										1.490.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian	
2:11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.198.753.104,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan jasa surat menyurat										3.300.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										127.900.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										160.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										8.125.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan alat tulis kantor										81.750.500,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										30.825.140,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										85.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										11.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan bahan logistik kantor										30.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										316.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										404.692.464,00		Distransnakerkop & UKM	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										100.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						238.955.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										76.500.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pengadaan peralatan gedung kantor										67.800.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										16.655.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										25.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										30.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										23.000.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						68.500.000,00		Distransnakerkop & UKM	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu										68.500.000,00		Distransnakerkop & UKM	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(3)															(4)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						113.500.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										113.500.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						27.675.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran										2.900.000,00		Distransakerkop & UKM			
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun										2.090.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)										6.585.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) *)										2.350.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *)										13.750.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			pemberdayaan koperasi dan UMKM						436.750.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penertiban koperasi simpan pinjam dan pembubaran koperasi tidak aktif *)										54.400.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penilaian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi *)										46.000.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Bombing Peningkatan Nilai tambah Produk Usaha kecil Menengah *)										35.400.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi *)										85.000.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Rapatb Teknis Operator dan Penerbit Ijin Usaha Mikro Kecil dan Menengah *)										42.850.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Pembinaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Plasma antar Koperasi Dengan Perusahaan Besar Kelapa sawit *)										79.700.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Pemanfaatan Pasar Rakyat *)										19.400.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Pembangunan Pasar Rakyat Tugas Pembantuan *)										74.000.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			menyediakan sistem pendukung bagi UKM						117.895.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Monitoring Dana Bergulir *)										38.000.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penyelenggaraan Lomba Tangkas Terampil Tingkat SLTA*)										32.895.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Pendataan UMKM *)										47.000.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			jumlah pedagang kaki lima yang terbina						74.875.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Penyediaan tenda Bazar Ramadhan dan Bazar Natal *)										36.000.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Bimbingan Peningkatan Nilai Tambah Produk Usaha Kecil Menengah dan Penyediaan Alat Kemasan Makanan *)										38.875.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan ttg UKM						54.550.000,00		Distransakerkop & UKM			
	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah										54.550.000,00		Distransakerkop & UKM			
2:12	Bidang Penanaman Modal															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.000.766.322,00		DPMPTSP			
	Penyediaan jasa surat menyurat										3.450.000,00		DPMPTSP			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										102.000.000,00		DPMPTSP			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										15.045.000,00		DPMPTSP			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										7.018.748,00		DPMPTSP			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Toлак Ukur	Target	Toлак Ukur	Target	Toлак Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan alat tulis kantor									88.810.110,00		DPMPTSP		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									75.100.000,00		DPMPTSP		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.300.000,00		DPMPTSP		
	Penyediaan bahan logistik kantor									26.400.000,00		DPMPTSP		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									184.000.000,00		DPMPTSP		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									400.642.464,00		DPMPTSP		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									90.000.000,00		DPMPTSP		
	Penataan Administrasi Kepegawaian *)									2.000.000,00		DPMPTSP		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						237.543.678,00		DPMPTSP	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									32.000.000,00		DPMPTSP		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									127.000.000,00		DPMPTSP		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00		DPMPTSP		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		DPMPTSP		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									20.000.000,00		DPMPTSP		
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah **)									23.543.678,00		DPMPTSP		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						15.000.000,00		DPMPTSP	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									15.000.000,00		DPMPTSP		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						72.000.000,00		DPMPTSP	
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)									72.000.000,00		DPMPTSP		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						29.850.000,00		DPMPTSP	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									1.650.000,00		DPMPTSP		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									1.150.000,00		DPMPTSP		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)									2.550.000,00		DPMPTSP		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									3.100.000,00		DPMPTSP		
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)									1.100.000,00		DPMPTSP		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									18.900.000,00		DPMPTSP		
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD *)									1.400.000,00		DPMPTSP		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			Tersedianya data investor dan investasinya						592.500.000,00		DPMPTSP	
	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal									373.000.000,00		DPMPTSP		
	Pengumpulan dan Updating Data Investasi Penanaman Modal *)									72.500.000,00		DPMPTSP		
	Potensi dan peluang investasi *)									147.000.000,00		DPMPTSP		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									309.140.000,00		DPMPTSP	
	Pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal *)									182.540.000,00		DPMPTSP		
	Pengumpulan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Penanaman Modal *)									126.600.000,00		DPMPTSP		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									369.975.000,00		DPMPTSP	
	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di DPMPTSP *)									18.900.000,00		DPMPTSP		
	Sosialisasi pelayanan perijinan *)									11.850.000,00		DPMPTSP		
	Pelayanan Terpadu di Kecamatan *)									107.200.000,00		DPMPTSP		
	Penatausahaan Pelayanan Perizinan Online Aplikasi Sicantik *)									84.900.000,00		DPMPTSP		
	Bimbingan Teknis Aplikasi Sicantik *)									45.825.000,00		DPMPTSP		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Gunung Mas *)									38.000.000,00		DPMPSTP		
	Pendataan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan *)									61.000.000,00		DPMPSTP		
	Pelayanan Perijinan IMB *)									2.300.000,00		DPMPSTP		
2:13	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga													
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			pembinaan dan pengembangan olah raga					21.982.522,00		Disparpora		
	Pembinaan dan pengembangan olah raga melalui Bakti PU *)									21.982.522,00		Disparpora		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.525.768.580,00		Disparpora		
	Penyediaan jasa surat menyurat									12.900.000,00		Disparpora		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									64.200.000,00		Disparpora		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									7.365.000,00		Disparpora		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									36.060.000,00		Disparpora		
	Penyediaan alat tulis kantor									72.458.480,00		Disparpora		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									38.375.000,00		Disparpora		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									6.500.000,00		Disparpora		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									93.000.000,00		Disparpora		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.420.000,00		Disparpora		
	Penyediaan bahan logistik kantor									42.480.000,00		Disparpora		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									312.000.000,00		Disparpora		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									634.010.100,00		Disparpora		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									200.000.000,00		Disparpora		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					95.000.000,00		Disparpora		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00		Disparpora		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									80.000.000,00		Disparpora		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					84.000.000,00		Disparpora		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									84.000.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					44.900.000,00		Disparpora		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									20.100.000,00		Disparpora		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									20.100.000,00		Disparpora		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									4.700.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Jumlah kegiatan kepemudaan					1.242.056.000,00		Disparpora		
	Pembinaan organisasi kepemudaan									28.355.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Drum Band *)									207.900.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									830.185.000,00		Disparpora		
	Seleksi Paskibra Tingkat Provinsi/Kabupaten *)									175.616.000,00		Disparpora		
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Berkembangnya olahraga unggulan untuk meraih prestasi					466.925.000,00		Disparpora		
	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga									435.565.000,00		Disparpora		
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi									31.360.000,00		Disparpora		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang			Tersedianya alat olah raga di desa PM2L					12.900.000,00		Disparpora		
	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga									12.900.000,00		Disparpora		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Program Sarana Promosi Parawisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								325.720.000,00		Disparpora		
	Pemilihan Putra dan Putri Parawisata *)									127.120.000,00		Disparpora		
	Festival Budaya *)									99.300.000,00		Disparpora		
	Festival Masakan Tradisional *)									99.300.000,00		Disparpora		
	Program Analisis Pasar Parawisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								73.310.000,00		Disparpora		
	Penyusunan Buku Profil dan Potensi Wisata Kabupaten Gunung Mas *)									73.310.000,00		Disparpora		
	Program Pengembangan Pasar Parawisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								50.000.000,00		Disparpora		
	Bahan Promosi Parawisata *)									50.000.000,00		Disparpora		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Standarisasi Kepariwisata *)	Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang								170.600.000,00		Disparpora		
	Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat di Destinasi Parawisata *)									170.600.000,00		Disparpora		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Tersedianya pakaian khusus hari tertentu dan peralatan olah raga					43.900.000,00		Disparpora		
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi									43.900.000,00		Disparpora		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								103.040.000,00		Disparpora		
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga									85.860.000,00		Disparpora		
	Penyelenggaraan Camat Cup Kelurahan Tampang*)									8.880.000,00		Disparpora		
	Penyelenggaraan Camat Cup Kelurahan Kurun*)									8.300.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								24.000.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									24.000.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								50.325.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									50.325.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								79.925.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									79.925.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								29.655.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									29.655.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								16.905.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									16.905.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								25.735.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									25.735.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								30.943.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									28.793.000,00		Disparpora		
	Pembinaan kepada kegiatan Karang Taruna Kelurahan *)									2.150.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								34.232.000,00		Disparpora		
	Pembinaan Paskibra *)									34.232.000,00		Disparpora		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								17.750.000,00		Disparpora		
	Paskibra Tingkat Kecamatan *)									17.750.000,00		Disparpora		
2:14	Bidang Statistik													
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			Tersedianya data dan informasi statistik daerah					427.767.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah									166.900.000,00		Diskominfo Statistik & Persandian		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyusunan profil Kabupaten *)									31.300.000,00			Diskominfo Statistik & Persandian	
	Penyusunan dan pengumpulan data Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas *) Sosialisasi Statistik Sektoral *)									97.200.000,00			Diskominfo Statistik & Persandian	
	Penyusunan dan Pengumpulan Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik *)									42.260.000,00			Diskominfo Statistik & Persandian	
	Program pengembangan data/informasi *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								90.107.000,00			Diskominfo Statistik & Persandian	
	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas *)									67.600.000,00			Diskominfo Statistik & Persandian	
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			Tersedianya data dan informasi statistik daerah					36.900.000,00			Diskominfo Statistik & Persandian	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan *)									36.900.000,00			Diskominfo Statistik & Persandian	
2:16	Bidang Kebudayaan													
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								7.000.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Pendidikan Karakter Budaya Anti Bullying *)									7.000.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			terawat dan terjaganya potensi objek kekayaan budaya kab. Gunung mas					336.820.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala									130.000.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya *)									206.820.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			terlaksananya kegiatan penyelenggaraan festival budaya mihing maanasa se-kab. G					615.387.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									615.387.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								800.221.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*)									800.221.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Budaya*)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah					199.275.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Festival/Malam Budaya/Kesenian Akhir Tahun*)									199.275.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah					19.925.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *)									19.925.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi			Terlaksana festival budaya daerah					160.750.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *)									160.750.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								72.085.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									72.085.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								81.275.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									81.275.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								105.000.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									80.000.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Daerah *)									25.000.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								85.850.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									85.850.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								76.115.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									76.115.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								48.640.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									48.640.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								50.290.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									50.290.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								98.345.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									98.345.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								55.340.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									55.340.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								79.095.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									79.095.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								50.725.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival budaya daerah									50.725.000,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								65.860.960,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)									65.860.960,00		Dinas Pendidikan & Kebudayaan		
2:17	Bidang Perpustakaan													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								1.329.547.484,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan jasa surat menyurat									8.100.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									44.540.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									50.571.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan alat tulis kantor									86.217.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									11.570.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									25.905.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									168.500.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.960.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
	Penyediaan bahan logistik kantor									29.870.000,00		Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									296.000.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									508.814.484,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									92.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					332.352.516,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									18.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									46.413.275,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									42.000.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									13.821.781,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									211.617.460,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					22.050.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									22.050.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					132.000.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									132.000.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					21.225.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									8.400.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.825.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								39.075.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan *)									39.075.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program Pelayanan Perpustakaan *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								7.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Lomba Perpustakaan Desa *)									7.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya layanan perpustakaan, lomba bercerita, pelatihan pengelola perpustakaan					142.700.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar									25.000.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pengembangan minat dan budaya baca									37.700.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat									42.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									37.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
2:18	Bidang Kearsipan													
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan			Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan					10.000.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah									10.000.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	Program Pengembangan Sumber Daya Arsip *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								94.950.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Workshop Pengelolaan Kearsipan *)									94.950.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsin dan Dokumentasi	
	Program Pelayanan Kearsipan *)	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan								43.600.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsin dan Dokumentasi	
	Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif SOPD *)									16.100.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsin dan Dokumentasi	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data *)									27.500.000,00			Dinas Perpustakaan, Arsin dan Dokumentasi	
3	Urusan Pilihan													
3:02	Bidang Kehutanan													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								1.270.151.250,00			Dishuthan	
	Penyediaan jasa surat menyurat									1.350.000,00			Dishuthan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									69.600.000,00			Dishuthan	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									5.391.500,00			Dishuthan	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									55.100.000,00			Dishuthan	
	Penyediaan alat tulis kantor									87.518.000,00			Dishuthan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									36.000.000,00			Dishuthan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									7.973.670,00			Dishuthan	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									14.820.000,00			Dishuthan	
	Penyediaan bahan logistik kantor									86.400.000,00			Dishuthan	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									280.000.000,00			Dishuthan	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									515.998.080,00			Dishuthan	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									110.000.000,00			Dishuthan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								143.207.750,00			Dishuthan	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									2.600.000,00			Dishuthan	
	Pengadaan peralatan gedung kantor									8.000.000,00			Dishuthan	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									12.607.750,00			Dishuthan	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00			Dishuthan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									95.000.000,00			Dishuthan	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								37.050.000,00			Dishuthan	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									37.050.000,00			Dishuthan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								158.800.000,00			Dishuthan	
	Pendidikan dan pelatihan formal									158.800.000,00			Dishuthan	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								26.860.000,00			Dishuthan	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									2.135.000,00			Dishuthan	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									2.225.000,00			Dishuthan	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)									4.690.000,00			Dishuthan	
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									5.000.000,00			Dishuthan	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									12.810.000,00			Dishuthan	
	Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								132.120.000,00			Dishuthan	
	Pemeliharaan dan Pembersihan Kawasan TAHURA *)									132.120.000,00			Dishuthan	
	Program Penataan Kawasan TAHURA *)	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								1.320.541.000,00			Dishuthan	
	Penataan dan Pembagian Blok Kawasan TAHURA *)									297.268.000,00			Dishuthan	
	Rencana Pengelolaan Kawasan TAHURA *)									291.343.000,00			Dishuthan	
	Pengembangan Sistem Informasi dan Data Base *)									137.705.000,00			Dishuthan	
	Rencana Pengelolaan dan Pembangunan Blok Koleksi Tumbuhan dan Satwa *)									336.885.000,00			Dishuthan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Toiak Ukur	Target	Toiak Ukur	Target	Toiak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA *)									49.440.000,00		Dishuthan		
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TAHURA *)									157.100.000,00		Dishuthan		
	Pertemuan dan Diskusi Publik Penyusunan Pembagian Blok dan Rencana Pengelolaan TAHURA *)									50.800.000,00		Dishuthan		
	Program Pengembangan Ekowisata Tahura *)									742.720.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Ruang Terbuka Anak *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Sarana Outbond *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Rumah Pohon *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pelatihan Petugas Outbound *)									70.720.000,00		Dishuthan		
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Tahura *)									957.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan Pagar dan Pintu Masuk Tahura *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Perbaikan Jalan dan Jembatan Tahura Lapak Jaru *)									220.000.000,00		Dishuthan		
	Pembangunan/Pengadaan Solarsel *)									120.000.000,00		Dishuthan		
	Rehab dan Perbaikan Dam Air Terjun Bawin Kameloh *)									224.000.000,00		Dishuthan		
	Pengadaan Papan Nama Kawasan dan Papan Larangan *)									119.000.000,00		Dishuthan		
	Perbaikan Gazebo *)									50.000.000,00		Dishuthan		
	Program Perlindungan dan Pengawasan *)									166.550.000,00		Dishuthan		
	Patroli, Pemantauan dan Pengamanan Kawasan *)									166.550.000,00		Dishuthan		
	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Per									972.000.000,00		Dishuthan		
	Mendata dan Mengusulkan Permohonan Sertifikat Tanah Milik Pemda *)									113.550.000,00		Dishuthan		
	Mengelola dan Memverifikasi Usulan Permohonan Sertifikat Oleh Masyarakat Miskin *)									98.400.000,00		Dishuthan		
	Melakukan Ferifikasi dan Falidasi Administrasi Tanah yang akan di Bebaskan *)									102.000.000,00		Dishuthan		
	Memberikan Fasilitas Kepada Tim Dalam Negosiasi Harga Tanah *)									177.750.000,00		Dishuthan		
	Memberikan Pelayanan Administrasi Ganti Rugi *)									480.300.000,00		Dishuthan		
3:03	Bidang Kelautan dan Perikanan													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran													
											1.452.135.900,00		Diskan	
	Penyediaan jasa surat menyurat										7.300.000,00		Diskan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										134.400.000,00		Diskan	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										600.000,00		Diskan	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										8.089.600,00		Diskan	
	Penyediaan alat tulis kantor										34.409.660,00		Diskan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										29.400.000,00		Diskan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										7.109.040,00		Diskan	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										9.600.000,00		Diskan	
	Penyediaan bahan logistik kantor										73.900.000,00		Diskan	
	Penyediaan makanan dan minuman										8.250.000,00		Diskan	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										280.000.000,00		Diskan	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										709.077.600,00		Diskan	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										150.000.000,00		Diskan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat													
											228.140.696,00		Diskan	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										36.260.000,00		Diskan	
	Pengadaan peralatan gedung kantor										48.950.000,00		Diskan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										91.080.000,00		Diskan	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor										11.597.100,00		Diskan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)																(4)
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										19.263.596,00		Diskan				
	Peningkatan kualitas gedung kantor *)										21.000.000,00		Diskan				
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									43.360.000,00		Diskan				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu										43.360.000,00		Diskan				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									128.000.000,00		Diskan				
	Pendidikan dan pelatihan formal										56.000.000,00		Diskan				
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										72.000.000,00		Diskan				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									13.200.000,00		Diskan				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										13.200.000,00		Diskan				
	Program pengembangan budidaya perikanan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan									1.573.855.000,00		Diskan				
	Peningkatan Pelayanan pada kelompok pembudidaya ikan *)										171.825.000,00		Diskan				
	Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan Rakyat *)										548.800.000,00		Diskan				
	Pelatihan Usaha Perikanan *)										84.780.000,00		Diskan				
	Peningkatan Pengelolaan BBI *)										405.210.000,00		Diskan				
	Peningkatan sarana dan prasarana BBI *)										39.000.000,00		Diskan				
	Pembinaan kelembagaan dan perizinan usaha *)										60.240.000,00		Diskan				
	Penyusunan bahan publikasi/penyuluhan *)										15.000.000,00		Diskan				
	Pemeliharaan sarana dan prasarana BBI *)										249.000.000,00		Diskan				
	Program pengembangan perikanan tangkap	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan									139.060.000,00		Diskan				
	Sosialisasi Perlindungan/suaka perikanan *)										63.420.000,00		Diskan				
	Peningkatan pelayanan pada kelompok nelayan *)										75.640.000,00		Diskan				
	Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan									238.972.000,00		Diskan				
	Lomba masak serba ikan *)										108.885.000,00		Diskan				
	Gerakan memasyarakatkan makan ikan *)										25.000.000,00		Diskan				
	Peningkatan Pelayanan pada POKLAHSAR *)										24.000.000,00		Diskan				
	Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan *)										81.087.000,00		Diskan				
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan									112.000.000,00		Diskan				
	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar										100.000.000,00		Diskan				
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar *)										12.000.000,00		Diskan				
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan									19.100.000,00		Diskan				
	Penyusunan Program Penyuluh Perikanan *)										19.100.000,00		Diskan				
3:04	Bidang Pariwisata																
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									179.364.066,00		Disparpora				
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri										68.524.066,00		Disparpora				
	Pengelolaan Desa Wisata *)										110.840.000,00		Disparpora				
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									1.653.342.400,00		Disparpora				
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata										193.392.000,00		Disparpora				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pengembangan Statistik Kepariwisata/Pengumpulan dan Penolahan Data Kepariwisata *)									80.000.000,00		Disparpora		
	Masterplan Kawasan Wisata Sekata Juri dan Batu Suli *)									380.000.000,00		Disparpora		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata DAM Sekata Juri *)									999.950.400,00		Disparpora		
3:05	Bidang Pertanian													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						2.054.708.004,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyediaan jasa surat menyurat									10.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									140.400.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									300.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									13.575.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja									27.951.104,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan alat tulis kantor									103.380.910,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									63.469.200,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.120.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan bahan logistik kantor									51.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									624.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									984.011.790,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									30.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						583.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pembangunan gedung kantor									322.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									161.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									100.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						184.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pendidikan dan pelatihan formal									160.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									24.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses						84.440.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									8.540.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset *)									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									15.900.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengukuran	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								212.875.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA *)									8.200.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)													
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah *)									146.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan Pengukuran Kinerja OPD *)									8.675.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *)									50.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Penilaian terbaik tenaga fungsional petani, pelatihan petani dan petugas, penghar						497.992.900,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Perlindungan tanaman padi dan palawija *)									112.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan *)									84.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pembinaan dan Pengawasan Corporate Social Responsibility (CSR)*)									98.800.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemutahiran Data Kelembagaan Petani *)									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pelatihan Lapangan Petani Jahe Merah *)									68.722.900,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Sosialisasi Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan*)									74.470.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Meningkatnya ketahanan pangan dan perkebunan melalui penyiapan dan penetap						2.171.870.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Penanganan daerah rawan pangan									16.400.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan									18.550.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan									40.600.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija									1.271.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan perbenihan/perbibitan									340.380.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan									42.395.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi *)									56.760.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pameran dan Lomba dalam rangka kegiatan rangka HPS Tingkat Provinsi *)									68.475.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten *)									86.490.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) *)									55.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan Sistem Informasi Pasar (PIP) *)									66.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pengembangan kawasan mandiri pangan *)									49.320.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			meningkatnya SDM dalam hal penerapan teknologi pertanian/perkebunan						87.990.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									8.700.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									79.290.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Meningkatnya produktivitas, kualitas dan kuantitas hasil pertanian daerah						3.334.660.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(3)																(4)	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan											100.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan *)											500.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pendampingan kegiatan APBN dan kegiatan APBD *)											245.280.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Refreshing Pengolahan data statistik dan informasi pertanian/perkebunan											82.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pembinaan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha											96.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pembinaan kawasan produksi perkebunan *)											74.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pembangunan Batang Bawah Karet *)											95.260.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) komoditas perkebunan *)											45.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun *)											182.620.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pemeliharaan Kebun Entries Karet *)											51.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Produksi Bibit Karet Unggul Siap Salur *)											126.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengembangan Bibit Unggul Kopi *)											944.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengembangan Jahe Merah *)											429.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengadaan Prasarana Kebun Entries Karet *)											166.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengembangan Padi Organik *)											196.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										1.212.799.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan											128.120.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pertemuan teknis penyuluh pertanian dan perkebunan *)											87.635.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Peningkatan Pelayanan Balai Penyuluh Pertanian *)											116.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Latihan dan Kunjungan (LAKU) Penyuluh Pertanian Lapangan *)											137.700.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan *)											26.720.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan (DAU) *)											196.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan (DAK) *)											520.124.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										449.672.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak											136.490.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada hewan/ternak *)											83.372.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pelatihan Penanganan Daging yang ASUH *)											79.310.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Pencegahan Penyakit Menular pada Hewan/Ternak (Vaksinisasi Rabies) *)											150.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)																
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Jumlah ternak per tahun						(4)	3.588.922.500,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak											455.300.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat											2.953.322.500,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat											66.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penyusunan Statistik Peternakan *)											56.550.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Sosialisasi Potensi Peternakan *)											57.750.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Jumlah pemasaran ternak per tahun							113.285.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan											64.285.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat											49.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										145.636.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH-U *)											145.636.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Berkembangnya agribisnis produk pangan lokal							66.410.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pemberdayaan pengembangan kelompok produk pangan lokal/industri pangan lokal *)											36.760.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Sosialisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan/Gemar Makan Pangan Lokal *)											29.650.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			Dokumen pemantauan dan peta rawan pangan dan jumlah desa mandiri pangan							16.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) *)											16.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan			jumlah terapan teknologi peternakan							107.795.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna *)											107.795.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan										3.437.375.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pengembangan Ekstensifikasi Lahan Pertanian *)											60.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi *)											69.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pengadaan dan Pendistribusian Alat dan Mesin Pertanian *)											484.875.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pemanfaatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi *)											93.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAK) *)											630.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAU) *)											30.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAK) *)											1.980.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAU) *)									69.500.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Inventarisasi dan Pendataan Kios Saprodi dan Pengecer Pupuk *)									20.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								19.980.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan									10.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan kelurahan kurun*)									6.180.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan kelurahan lampang*)									3.800.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan								10.050.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan									6.050.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan kelurahan *)									4.000.000,00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3:06	Bidang Perdagangan													
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								45.214.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									45.214.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi								25.000.000,00		Disperindag		
	Pameran Pembangunan *)									25.000.000,00		Disperindag		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(3)															(4)		
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										250.000.000,00						Disperindag
	Kerjasama pelaksanaan sidang tera dan tera ulang UTTP dan Pendataan UTTP *)											38.000.000,00						Disperindag
	Peningkatan Pengawasan Alat UTTP di Wilayah Kabupaten Gunung Mas *)											40.000.000,00						Disperindag
	Peningkatan Monitoring Produk Ber-SNI dan Pengendalian Mutu Barang *)											40.000.000,00						Disperindag
	Monitoring Peredaran Barang Kadaluarasa *)											30.000.000,00						Disperindag
	Legalitas Pelayanan Unit Metrologi Legal di Wilayah Kabupaten Gunung Mas *)											61.700.000,00						Disperindag
	Sosialisasi Tentang Produk Berstandar Nasional Indonesia dan Pengendalian Mutu Barang *)											40.300.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										6.331.480.000,00						Disperindag
	Pameran Dalam Daerah *)											25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Luar Daerah *)											96.600.000,00						Disperindag
	Pasar Murah *)											173.580.000,00						Disperindag
	Monitoring/Pemantauan Harga Pokok Sembako *)											30.000.000,00						Disperindag
	Pendataan Pedagang *)											34.000.000,00						Disperindag
	Pembuatan Nomor Blok *)											22.300.000,00						Disperindag
	Pembangunan Pasar Rakyat Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun (DAK)											602.600.000,00						Disperindag
	Pembangunan Pasar Rakyat Desa Hurung Buntut Kecamatan Kurun (DAK)											602.600.000,00						Disperindag
	Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu (DAK)											1.581.600.000,00						Disperindag
	Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu (DAK)											1.581.600.000,00						Disperindag
	Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara (DAK)											1.581.600.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										100.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											100.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi										25.000.000,00						Disperindag
	Pameran Pembangunan *)											25.000.000,00						Disperindag

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(3)													(4)		
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									23.300.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										23.300.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									24.593.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										24.593.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.175.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.175.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									15.175.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										15.175.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									15.510.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										15.510.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Penaataan dan peningkatan iklim Investasi									25.000.000,00		Disperindag			
	Pameran Pembangunan *)										25.000.000,00		Disperindag			
3.07	Bidang Perindustrian															
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan									1.012.251.300,00		Disperindag			
	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif										54.855.000,00		Disperindag			
	Pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*										957.396.300,00		Disperindag			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.190.492.500,00		Disperindag			
	Penyediaan jasa surat menyurat										3.600.000,00		Disperindag			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										77.700.212,00		Disperindag			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										6.150.000,00		Disperindag			
	Penyediaan alat tulis kantor										54.612.500,00		Disperindag			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										44.358.900,00		Disperindag			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										11.400.000,00		Disperindag			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										9.480.000,00		Disperindag			
	Penyediaan bahan logistik kantor										53.000.000,00		Disperindag			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										260.000.000,00		Disperindag			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(3)									(4)					
	Penyediaan alat tulis kantor									257.764.000,00		Setda			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									143.000.000,00		Setda			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									49.500.000,00		Setda			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									131.000.000,00		Setda			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									171.300.000,00		Setda			
	Penyediaan bahan logistik kantor									1.013.000.000,00		Setda			
	Penyediaan makanan dan minuman									200.000.000,00		Setda			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									1.384.000.000,00		Setda			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									2.949.006.000,00		Setda			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									250.000.000,00		Setda			
	Penyediaan makanan dan minuman rumah tangga KDH dan WKDH *)									598.000.000,00		Setda			
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)									48.275.000,00		Setda			
	Mengikuti kunjungan kerja pemerintah daerah ke dalam daerah dan luar daerah*)									291.000.000,00		Setda			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	2.096.077.400,00		Setda		
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas										493.542.400,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan										325.000.000,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										228.435.000,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										949.100.000,00		Setda		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										100.000.000,00		Setda		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	196.160.000,00		Setda	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya										196.160.000,00		Setda		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	909.859.900,00		Setda	
	Pendidikan dan pelatihan formal										46.000.000,00		Setda		
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan										50.000.000,00		Setda		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										200.000.000,00		Setda		
	Bimbingan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah *)										64.500.000,00		Setda		
	Peningkatan Sumber Daya Anggota POKJA *)										325.000.000,00		Setda		
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Gunung Mas *)										84.020.000,00		Setda		
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Desa *)										70.519.900,00		Setda		
	Sosialisasi Aplikasi e-LHKPN *)										69.820.000,00		Setda		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	814.914.100,00		Setda	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran										31.800.000,00		Setda		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun										31.800.000,00		Setda		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)										44.684.100,00		Setda		
	Penyusunan LKPJ Bupati Gunung Mas *)										60.810.000,00		Setda		
	Penyusunan LPPD Kabupaten Gunung Mas *)										38.800.000,00		Setda		
	Penyusunan EKPPD Kabupaten Gunung Mas *)										45.400.000,00		Setda		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)										119.300.000,00		Setda		
	Penyusunan Laporan SPM Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										20.000.000,00		Setda		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan Kinerja Pemda) *)										399.650.000,00		Setda		
	Penyusunan laporan LAKIP Sekretariat Daerah *)										22.770.000,00		Setda		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Terkunjunginya kecamatan tujuan kegiatan keagamaan di Kab Gummas dan tersus	1.327.220.000,00		Setda	
	Pembinaan Umat beragama*)										49.400.000,00		Setda		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)																
	Penyusunan Laporan Data Lembaga Keagamaan Penerima Bantuan/Subsidi Pemerintah *)										2.400.000,00		Setda				
	Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Hibah Lembaga Keagamaan, Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan *)										43.200.000,00		Setda				
	Penyelenggaraan Safari Keagamaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										1.185.320.000,00		Setda				
	Pembinaan pemberangkatan dan pemulangan Haji Kabupaten Gunung Mas *)										46.900.000,00		Setda				
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.272.025.000,00		Setda				
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri										242.025.000,00		Setda				
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah										200.000.000,00		Setda				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*)										300.000.000,00		Setda				
	Keprotokolanan dan pengamanan KDH dan WKDH *)										130.000.000,00		Setda				
	Rapat Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya*)										400.000.000,00		Setda				
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									75.700.000,00		Setda				
	Inventarisasi dan penataan aset SKPD *)										75.700.000,00		Setda				
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									50.635.000,00		Setda				
	Penanganan laporan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dan investasi lainnya *)										50.635.000,00		Setda				
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									73.800.000,00		Setda				
	Rapat Kerjasama Antar Daerah *)										42.750.000,00		Setda				
	Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Daerah dan Regional *)										31.050.000,00		Setda				
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									370.100.000,00		Setda				
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan										46.900.000,00		Setda				
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan										18.840.000,00		Setda				
	Penyusunan Produk Hukum Daerah *)										75.750.000,00		Setda				
	Evaluasi dan Verifikasi Penyusunan Produk Hukum Desa *)										35.750.000,00		Setda				
	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Gunung Mas dan SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *)										37.460.000,00		Setda				
	Keerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan *)										155.400.000,00		Setda				
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									667.375.000,00		Setda				
	Penyusunan Laporan Kepegawaian SKPD *)										55.985.000,00		Setda				
	Penyusunan Analisis Jabatan *)										30.600.000,00		Setda				
	Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan *)										140.290.000,00		Setda				
	Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Umum *)										28.510.000,00		Setda				
	Sosialisasi dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										77.000.000,00		Setda				
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										73.700.000,00		Setda				
	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										261.290.000,00		Setda				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Tersusunnya desain organisasi perangkat daerah kabupaten										135.690.000,00		Setda	
	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas *)										135.690.000,00		Setda	
	Program peningkatan sarana perekonomian *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Terkoordinir dan terfasilitasinya penyaluran raskin										446.683.000,00		Setda	
	Penyaluran Rastra *)										446.683.000,00		Setda	
	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Terselesaikannya permasalahan sengketa tanah adat										212.000.000,00		Setda	
	Orientasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah *)										89.570.000,00		Setda	
	Orientasi penyusunan produk Hukum Kedamaian (Hukum Adat) *)										66.525.000,00		Setda	
	Penyuluhan Hukum *)										55.905.000,00		Setda	
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Terlaksananya penyuluhan peningkatan kesadaran hukum & HAM										166.210.000,00		Setda	
	Pemasyarakatan, Harmonisasi Produk Hukum Bernuansa HAM dan Evaluasi Pelaksanaan HAM *)										73.370.000,00		Setda	
	Lomba Kesadaran Hukum *)										92.840.000,00		Setda	
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	monev dari pelayanan perijinan										144.490.000,00		Setda	
	Orientasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)										40.000.000,00		Setda	
	Bimbingan Teknis Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)										92.790.000,00		Setda	
	Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) *)										11.700.000,00		Setda	
	Program peningkatan pelayanan staf ahli *)													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	peningkatan keahlian sesuai bidangnya										195.000.000,00		Setda	
	Peningkatan keahlian bidang politik, hukum dan pemerintahan *)										65.000.000,00		Setda	
	Peningkatan keahlian bidang kemasyarakatan dan SDM *)										65.000.000,00		Setda	
	Peningkatan keahlian bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan *)										65.000.000,00		Setda	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran										4.935.420.948,00		Setwan	
	Penyediaan jasa surat menyurat										11.700.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										158.304.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										360.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										55.890.000,00		Setwan	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										52.500.000,00		Setwan	
	Penyediaan alat tulis kantor										73.590.000,00		Setwan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										110.250.000,00		Setwan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										14.610.000,00		Setwan	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										25.250.000,00		Setwan	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										2.100.000.000,00		Setwan	
	Penyediaan bahan logistik kantor										235.320.000,00		Setwan	
	Penyediaan makanan dan minuman										345.930.000,00		Setwan	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										400.000.000,00		Setwan	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										1.089.216.948,00		Setwan	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										262.500.000,00		Setwan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi													
	Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat										1.446.960.542,00		Setwan	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										447.250.000,00		Setwan	
	Pengadaan peralatan gedung kantor										794.850.000,00		Setwan	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										27.360.542,00		Setwan	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										115.000.000,00		Setwan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Tampang*)									10.000.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tampang*)									2.198.550,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kurun*)									1.350.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kurun *)									6.800.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Kurun*)									1.320.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kurun *)									10.336.620,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kurun*)									1.642.300,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kurun*)									3.300.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kurun*)									2.000.000,00		Kec. Kurun		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Kurun*)									4.000.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan Kurun*)									-		Kec. Kurun		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Kurun*)									12.500.000,00		Kec. Kurun		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kurun*)									2.643.080,00		Kec. Kurun		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					283.438.592,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas									67.000.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									74.800.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan mebeleur									-		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.445.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									66.480.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									13.350.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan Tampang*)									2.000.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tampang*)									17.000.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Tampang*)									1.740.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tampang*)									1.000.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kurun*)									23.600.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan mebeleur kelurahan Kurun *)									5.200.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan Kurun*)									2.000.000,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kurun*)									1.903.592,00		Kec. Kurun		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kurun*)									1.920.000,00		Kec. Kurun		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					33.330.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									28.290.000,00		Kec. Kurun		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kelurahan Kurun*)									5.040.000,00		Kec. Kurun		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					32.000.000,00		Kec. Kurun		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									32.000.000,00		Kec. Kurun		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					23.720.000,00		Kec. Kurun		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									3.150.000,00		Kec. Kurun		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									2.670.000,00		Kec. Kurun		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									3.200.000,00		Kec. Kurun		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									4.950.000,00		Kec. Kurun		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)																
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)												9.750.000,00				Kec. Kurun
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)																
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										17.910.000,00				Kec. Kurun
	Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat Kelurahan Kurun*)												3.300.000,00				Kec. Kurun
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)												27.000.000,00				Kec. Kurun
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan Kurun *)												63.000.000,00				Kec. Kurun
	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Kecamatan *)												21.385.000,00				Kec. Kurun
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										219.223.900,00				Kec. Kurun
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)												35.529.900,00				Kec. Kurun
	Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak *)												51.160.000,00				Kec. Kurun
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)												51.870.000,00				Kec. Kurun
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandak Intan Kaharingan *)												-				Kec. Kurun
	Pembinaan kepada kegiatan STQ *)												50.660.000,00				Kec. Kurun
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan Kelurahan Tampano*)												10.656.000,00				Kec. Kurun
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan Kelurahan Kurun*)												19.348.000,00				Kec. Kurun
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										8.000.000,00				Kec. Kurun
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)												8.000.000,00				Kec. Kurun
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										484.566.600,00				Kec. Tewah
	Penyediaan jasa surat menyurat												2.550.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												22.938.412,00				Kec. Tewah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan												80.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan jasa kebersihan kantor												5.279.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan alat tulis kantor												22.966.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan												2.400.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												3.510.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												8.000.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan peralatan rumah tangga												2.715.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan bahan logistik kantor												6.255.000,00				Kec. Tewah
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah												24.000.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran												199.306.188,00				Kec. Tewah
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)												117.500.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)												1.005.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)												2.400.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)												931.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)												8.108.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)												1.921.200,00				Kec. Tewah
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)												1.050.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)												8.000.000,00				Kec. Tewah
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)												1.800.000,00				Kec. Tewah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(3)																	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)										4.000.000,00		Kec. Tewah					
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										12.500.000,00		Kec. Tewah					
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)										25.351.800,00		Kec. Tewah					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						142.380.000,00		Kec. Tewah					
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										7.950.000,00		Kec. Tewah					
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas										8.700.000,00		Kec. Tewah					
	Pengadaan peralatan gedung kantor										8.850.000,00		Kec. Tewah					
	Pengadaan mebeleur										6.000.000,00		Kec. Tewah					
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan										3.000.000,00		Kec. Tewah					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										8.130.000,00		Kec. Tewah					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										52.500.000,00		Kec. Tewah					
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										4.750.000,00		Kec. Tewah					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *)										5.000.000,00		Kec. Tewah					
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)										1.000.000,00		Kec. Tewah					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)										2.500.000,00		Kec. Tewah					
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah Kelurahan**)										34.000.000,00		Kec. Tewah					
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS						22.050.000,00		Kec. Tewah					
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu										15.750.000,00		Kec. Tewah					
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kelurahan*)										6.300.000,00		Kec. Tewah					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						8.000.000,00		Kec. Tewah					
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										8.000.000,00		Kec. Tewah					
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						20.280.000,00		Kec. Tewah					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										17.520.000,00		Kec. Tewah					
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran										210.000,00		Kec. Tewah					
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun										450.000,00		Kec. Tewah					
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)										2.100.000,00		Kec. Tewah					
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya						80.388.000,00		Kec. Tewah					
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)										18.280.000,00		Kec. Tewah					
	Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *)										2.108.000,00		Kec. Tewah					
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)										60.000.000,00		Kec. Tewah					
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasayarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			terselenggaranya kegiatan PKK, terselenggaranya kegiatan keanggotaan bagi masyarakat						64.610.000,00		Kec. Tewah					
	Pembinaan kepada kegiatan keagamaan *)										31.400.000,00		Kec. Tewah					
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasayarakatan *)										18.650.000,00		Kec. Tewah					
	Penyelenggaraan kegiatan kemasayarakatan *)										8.400.000,00		Kec. Tewah					
	Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *)										6.160.000,00		Kec. Tewah					
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									2.770.900,00		Kec. Tewah					
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)										2.770.900,00		Kec. Tewah					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						534.310.000,00		Kec. Kahut					
	Penyediaan jasa surat menyurat										1.650.000,00		Kec. Kahut					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										7.500.000,00		Kec. Kahut					
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										53.288,00		Kec. Kahut					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									5.150.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan alat tulis kantor									35.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									6.360.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									4.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									36.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan bahan logistik kantor									19.800.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan makanan dan minuman									10.000.000,00		Kec. Kahut		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									24.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									50.072.808,00		Kec. Kahut		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									230.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									840.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									2.363.596,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									1.000.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									8.877.500,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									4.200.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									2.000.000,00		Kec. Kahut		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									37.500.000,00		Kec. Kahut		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)									47.942.808,00		Kec. Kahut		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					131.400.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									10.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									20.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									27.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									8.400.000,00		Kec. Kahut		
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan Umum *)									50.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan *)									3.500.000,00		Kec. Kahut		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)									2.500.000,00		Kec. Kahut		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					32.000.000,00		Kec. Kahut		
	Kursus singkat non formal *)									32.000.000,00		Kec. Kahut		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses					4.500.000,00		Kec. Kahut		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									4.500.000,00		Kec. Kahut		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan					33.280.000,00		Kec. Kahut		
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									6.280.000,00		Kec. Kahut		
	Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									27.000.000,00		Kec. Kahut		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			terselenggaranya kegiatan PKK dan Darma Wanita Persatuan, kegiatan keagama					71.740.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									25.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)									27.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)									6.000.000,00		Kec. Kahut		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									13.740.000,00		Kec. Kahut		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					558.300.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa surat menyurat									2.805.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									9.300.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									79.268,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan alat tulis kantor									27.699.500,00		Kec. Sepang		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									8.735.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									4.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									68.100.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan logistik kantor									21.600.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan makanan dan minuman									14.250.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									48.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									154.568.424,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									90.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)									4.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									450.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									2.400.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									7.105.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									2.730.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)									1.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)									18.750.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									2.400.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)									4.000.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									15.000.000,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)									50.327.808,00		Kec. Sepang		
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor Kelurahan *)									1.000.000,00		Kec. Sepang		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					80.495.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									7.000.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									20.000.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									30.000.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									16.870.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)									4.125.000,00		Kec. Sepang		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan *)									2.500.000,00		Kec. Sepang		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					32.000.000,00		Kec. Sepang		
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)									32.000.000,00		Kec. Sepang		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					7.580.000,00		Kec. Sepang		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									3.270.000,00		Kec. Sepang		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									4.310.000,00		Kec. Sepang		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya					30.750.000,00		Kec. Sepang		
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									6.750.000,00		Kec. Sepang		
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									24.000.000,00		Kec. Sepang		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			terselenggaranya kegiatan festival tandak tingkat kecamatan sepang dalam rangka					63.030.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									21.200.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)									33.630.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)									3.440.000,00		Kec. Sepang		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									4.760.000,00		Kec. Sepang		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	452.798.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa surat menyurat										2.880.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										9.088.860,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan										128.120,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										8.014.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan alat tulis kantor										32.998.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										7.200.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan bahan logistik kantor										41.400.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan makanan dan minuman										13.500.000,00		Kec. Manuhing	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										27.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										101.435.616,00		Kec. Manuhing	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										102.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)										1.080.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)										517.396,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)										2.765.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)										10.048.200,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)										2.700.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)										2.500.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)										5.040.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *)										9.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)										5.400.000,00		Kec. Manuhing	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										20.400.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)										47.702.808,00		Kec. Manuhing	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	197.700.000,00		Kec. Manuhing	
	Pembangunan rumah jabatan										60.600.000,00		Kec. Manuhing	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan										10.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										10.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										17.800.000,00		Kec. Manuhing	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										31.300.000,00		Kec. Manuhing	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										11.600.000,00		Kec. Manuhing	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)										4.500.000,00		Kec. Manuhing	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)										1.900.000,00		Kec. Manuhing	
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah Kelurahan**)										50.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	16.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										16.000.000,00		Kec. Manuhing	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	5.700.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										5.400.000,00		Kec. Manuhing	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kelurahan*)										300.000,00		Kec. Manuhing	
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)		Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya	45.800.000,00		Kec. Manuhing	
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)										12.800.000,00		Kec. Manuhing	
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)										33.000.000,00		Kec. Manuhing	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(3)									(4)					
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								terselenggaranya kegiatan PKK dan Darma Wanita Persatuan, kegiatan keagamaan	127.582.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)										23.650.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak *)										38.450.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)										40.800.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)										4.685.000,00		Kec. Manuhing		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)										19.997.000,00		Kec. Manuhing		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	605.863.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa surat menyurat										4.845.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										4.800.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										5.761.500,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										8.372.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan alat tulis kantor										31.840.714,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										10.965.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										5.945.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										57.500.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan bahan logistik kantor										35.808.000,00		Kec. Rungan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										32.000.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										221.507.136,00		Kec. Rungan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										127.500.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)										2.844.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)										1.200.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)										1.210.250,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)										9.662.200,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)										952.200,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)										2.000.000,00		Kec. Rungan		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)										6.150.000,00		Kec. Rungan		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										35.000.000,00		Kec. Rungan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	63.250.000,00		Kec. Rungan	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan											7.000.000,00		Kec. Rungan	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor											6.000.000,00		Kec. Rungan	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan											16.020.000,00		Kec. Rungan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											23.500.000,00		Kec. Rungan	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor											8.730.000,00		Kec. Rungan	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)											2.000.000,00		Kec. Rungan	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	15.120.000,00		Kec. Rungan	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu											15.120.000,00		Kec. Rungan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	36.000.000,00		Kec. Rungan	
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)											36.000.000,00		Kec. Rungan	
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan	89.700.000,00		Kec. Rungan	
	Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan lomba desa) *)											-		Kec. Rungan	
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)											53.700.000,00		Kec. Rungan	
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)											36.000.000,00		Kec. Rungan	
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									terselenggaranya kegiatan PKK , terselenggaranya kegiatan keagamaan bagi mas	127.760.000,00		Kec. Rungan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									46.740.000,00		Kec. Rungan		
	Penyelenggaraan Safari Ramadhan dan Safari Natal *)									11.520.000,00		Kec. Rungan		
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)									46.100.000,00		Kec. Rungan		
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)									23.400.000,00		Kec. Rungan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						519.615.100,00		Kec. Mihing Raya	
	Penyediaan jasa surat menyurat									2.400.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									4.320.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									2.135.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan alat tulis kantor									14.688.464,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									3.037.500,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									3.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									8.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan bahan logistik kantor									12.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									16.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									177.894.828,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									177.500.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									1.200.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan *)									1.500.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									3.151.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									11.045.500,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									1.620.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)									7.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									2.280.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)									8.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									12.500.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)									50.342.808,00		Kec. Mihing Raya		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						237.455.000,00		Kec. Mihing Raya	
	Pembangunan rumah dinas									200.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									14.380.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									13.400.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									4.900.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)									2.050.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)									2.725.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						24.000.000,00		Kec. Mihing Raya	
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)									24.000.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						9.800.000,00		Kec. Mihing Raya	
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									9.800.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya						33.403.000,00		Kec. Mihing Raya	
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)									6.610.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *)									2.703.000,00		Kec. Mihing Raya		
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									24.090.000,00		Kec. Mihing Raya		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(3)																	(4)
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									38.887.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)										18.290.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan *)										5.530.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)										3.967.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)										5.310.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *)										5.790.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									2.100.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)										2.100.000,00			Kec. Mihing Raya				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									604.827.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan jasa surat menyurat										4.500.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										36.660.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										2.775.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan alat tulis kantor										25.114.500,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										6.500.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										1.970.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan bahan logistik kantor										13.200.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan makanan dan minuman										15.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										40.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										147.398.424,00			Kec. Rungan Hulu				
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										185.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)										600.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)										1.420.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)										6.530.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)										1.800.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)										13.659.864,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)										4.800.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *)										1.350.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)										8.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										15.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)										73.549.212,00			Kec. Rungan Hulu				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									45.580.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										5.580.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										15.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD *)										25.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									44.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)										44.000.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									12.510.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										10.070.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran										670.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun										470.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)										1.300.000,00			Kec. Rungan Hulu				
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									40.930.000,00			Kec. Rungan Hulu				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(3)															
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)										8.900.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Rapat kerja Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan *)										2.030.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Peningkatan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)										30.000.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			terselenggaranya kegiatan PKK, terselenggaranya kegiatan keanggotaan bagi m						45.550.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)										20.360.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Tandak Intan Kaharingan *)										12.550.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)										2.820.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Pembinaan kepada kegiatan Posyandu Kelurahan *)										6.540.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *)										3.280.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									1.600.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)										1.600.000,00		Kec. Rungan Hulu			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						679.755.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan jasa surat menyurat										3.300.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										2.010.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										4.200.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan alat tulis kantor										28.610.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										4.350.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan bahan logistik kantor										59.700.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan makanan dan minuman										16.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										12.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										151.598.424,00		Kec. Damang Batu			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										235.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)										750.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)										1.200.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan *)										1.705.960,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)										6.715.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)										1.350.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)										15.800.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)										6.400.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan *)										3.850.000,00		Kec. Damang Batu			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)										4.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										20.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)										101.315.616,00		Kec. Damang Batu			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						83.030.000,00		Kec. Damang Batu			
	Pengadaan peralatan gedung kantor										9.100.000,00		Kec. Damang Batu			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										6.490.000,00		Kec. Damang Batu			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										20.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										12.500.000,00		Kec. Damang Batu			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										9.940.000,00		Kec. Damang Batu			
	Pembuatan Sumur Gali dan Pompa *)										25.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						36.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										36.000.000,00		Kec. Damang Batu			
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan						29.225.000,00		Kec. Damang Batu			
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)										4.900.000,00		Kec. Damang Batu			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)																
	Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat Kelurahan *)										1.430.000,00			Kec. Damang Batu			
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)										22.895.000,00			Kec. Damang Batu			
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan peningkatan peran serta wanita						57.000.000,00			Kec. Damang Batu			
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)										23.520.000,00			Kec. Damang Batu			
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)										18.650.000,00			Kec. Damang Batu			
	Pembinaan kepada kegiatan PKK Kelurahan *)										14.830.000,00			Kec. Damang Batu			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						557.413.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan jasa surat menyurat										2.952.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan alat tulis kantor										24.961.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										5.625.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										41.500.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan bahan logistik kantor										36.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan makanan dan minuman										5.400.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										28.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										99.320.616,00			Kec. Manuhing Raya			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										185.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)										1.989.384,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)										936.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)										9.948.692,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)										1.462.500,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *)										14.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)										9.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan *)										4.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)										37.500.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)										49.817.808,00			Kec. Manuhing Raya			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat						128.340.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan										11.776.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas										8.980.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										12.784.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										20.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										35.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor										7.700.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pengadaan Bangunan Tambahan Gedung Kantor *)										25.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)										2.100.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)										5.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi						24.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										24.000.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai						3.950.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										3.950.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksananya						31.505.000,00			Kec. Manuhing Raya			
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)										4.505.000,00			Kec. Manuhing Raya			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)								(4)					
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)									27.000.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Terkunjungnya kecamatan tujuan kegiatan keagamaan di Kab Gumus dan tersus	34.255.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)									13.350.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak *)									19.140.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Penyelenggaraan kegiatan gotong royong Kelurahan *)									1.765.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							monev dari pelayanan perijinan	13.000.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)									13.000.000,00		Kec. Manuhing Raya		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	542.231.636,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan jasa surat menyurat									1.740.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									100.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									3.370.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan alat tulis kantor									12.035.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									6.400.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									11.795.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan bahan logistik kantor									58.216.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									20.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									150.338.424,00		Kec. Miri Manasa		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									152.400.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)									900.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)									668.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)									3.410.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)									830.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)									14.500.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)									30.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan *)									75.529.212,00		Kec. Miri Manasa		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	236.963.364,00		Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									12.500.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah **)									24.220.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									19.999.353,00		Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									26.550.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									10.236.223,00		Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan Umum *)									15.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Umum *)									105.125.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan*)									5.832.788,00		Kec. Miri Manasa		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan*)									5.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pembuatan Sumur Gali dan Pompa *)									5.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan Body Klotok Dinas Kecil *)									7.500.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	13.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									9.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kelurahan*)									4.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	36.000.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Magang studi banding/kursus singkat non formal *)									36.000.000,00		Kec. Miri Manasa		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan										
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan									
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3							
(1)	(3)															(4)							
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi															pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan	33.300.000,00		Kec. Miri Manasa			
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)																	7.300.000,00		Kec. Miri Manasa			
	Pemilihan perangkat desa *)																	14.000.000,00		Kec. Miri Manasa			
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)																	12.000.000,00		Kec. Miri Manasa			
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																	22.600.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)																		22.600.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																	23.725.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pembinaan Paskibraka *)																		23.725.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																	1.200.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) *)																		1.200.000,00		Kec. Miri Manasa		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																	644.203.948,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan jasa surat menyurat																		4.500.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan																		360.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan alat tulis kantor																		28.630.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan																		10.750.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																		3.785.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																		55.000.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan bahan logistik kantor																		23.640.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																		32.000.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran																		249.314.040,00		Kec. Rungan Barat		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)																		125.000.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *)																		6.750.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan *)																		1.200.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan *)																		3.764.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan *)																		11.289.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan *)																		2.447.100,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan *)																		1.410.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan *)																		9.720.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan *)																		30.000.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kelurahan*)																		45.644.808,00		Kec. Rungan Barat		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																	71.200.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas																		4.800.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor																		27.200.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor																		7.500.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan																		20.000.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																		9.700.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																		2.000.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																	36.000.000,00		Kec. Rungan Barat		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan																			36.000.000,00		Kec. Rungan Barat	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi																		1.800.000,00		Kec. Rungan Barat	
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)																			1.800.000,00		Kec. Rungan Barat	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(3)														(4)		
	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									27.750.000,00						Kec. Rungan Barat
	Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *)										6.000.000,00						Kec. Rungan Barat
	Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan *)										21.750.000,00						Kec. Rungan Barat
	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									87.550.000,00						Kec. Rungan Barat
	Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *)										16.450.000,00						Kec. Rungan Barat
	Penyelenggaraan Safari Ramadhan dan Safari Natal *)										32.550.000,00						Kec. Rungan Barat
	Pembinaan kepada kegiatan MTQ *)										38.550.000,00						Kec. Rungan Barat
4:02	Bidang Pengawasan																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									905.473.494,00						Inspektorat
	Penyediaan jasa surat menyurat										2.400.000,00						Inspektorat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										45.000.000,00						Inspektorat
	Penyediaan jasa kebersihan kantor										11.506.150,00						Inspektorat
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja										33.851.800,00						Inspektorat
	Penyediaan alat tulis kantor										50.184.000,00						Inspektorat
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										60.000.000,00						Inspektorat
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										7.931.100,00						Inspektorat
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										9.600.000,00						Inspektorat
	Penyediaan bahan logistik kantor										58.000.000,00						Inspektorat
	Penyediaan makanan dan minuman										19.600.000,00						Inspektorat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										264.000.000,00						Inspektorat
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran										278.400.444,00						Inspektorat
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)										65.000.000,00						Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									257.563.250,00						Inspektorat
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor										12.600.000,00						Inspektorat
	Pengadaan peralatan gedung kantor										131.000.000,00						Inspektorat
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										40.000.000,00						Inspektorat
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan										20.000.000,00						Inspektorat
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										53.963.250,00						Inspektorat
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									38.305.000,00						Inspektorat
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya										38.305.000,00						Inspektorat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									270.000.000,00						Inspektorat
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										270.000.000,00						Inspektorat
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									54.920.000,00						Inspektorat
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran										2.000.000,00						Inspektorat
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun										920.000,00						Inspektorat
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)										12.000.000,00						Inspektorat
	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *)										40.000.000,00						Inspektorat
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									2.046.390.000,00						Inspektorat
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala										877.500.000,00						Inspektorat
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah										135.000.000,00						Inspektorat
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan										200.450.000,00						Inspektorat
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan										120.000.000,00						Inspektorat

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Evaluasi LAKIP *)									55.790.000,00		Inspektorat		
	Reviu RKA-SKPD *)									56.400.000,00		Inspektorat		
	Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)*)									97.800.000,00		Inspektorat		
	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)*)									45.850.000,00		Inspektorat		
	Pengawasan Dana Desa *)									400.000.000,00		Inspektorat		
	Penyelenggaraan Rencana Aksi Pencegahan korupsi *)									57.600.000,00		Inspektorat		
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terkelolanya aparatur secara tertib dan sesuai dengan aturan						20.000.000,00		Inspektorat	
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi *)									20.000.000,00		Inspektorat		
4:03	Bidang Perencanaan													
	Program Kerjasama Pembangunan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen hasil kerjasama pembangunan						328.688.000,00		BP3D/Bappeda	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									68.090.000,00		BP3D/Bappeda		
	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *)									216.120.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemanfaatan Sistem Database Dukung Kebijakan Nasional (SDDKN) *)									44.478.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya data informasi promosi daerah & investasi, buku profil ekonomi						276.495.000,00		BP3D/Bappeda	
	Rapat Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi*)									68.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengembangan promosi daerah dan investasi *)									69.100.000,00		BP3D/Bappeda		
	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah *)									56.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Monitoring ke perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas *)									32.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Gunung Mas *)									36.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BUMD di Kabupaten Gunung Mas *)									13.695.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								25.400.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									20.400.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan Tampang*)									2.650.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan Kurun*)									2.350.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								20.619.500,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									17.144.500,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									3.475.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								11.955.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									10.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									1.955.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								12.950.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									9.930.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									3.020.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								15.850.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									12.250.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									3.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								22.669.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									22.669.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								9.714.900,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									6.220.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									3.494.900,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								9.490.000,00		BP3D/Bappeda		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									7.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									2.490.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								13.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									13.500.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								11.210.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									8.740.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									2.470.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								11.080.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									7.750.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									3.330.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								12.375.092,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									9.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan *)									2.775.092,00		BP3D/Bappeda		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.656.664.600,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan jasa surat menyurat									4.817.100,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									152.300.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									14.126.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan alat tulis kantor									98.414.500,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									78.450.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									25.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									20.250.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan bahan logistik kantor									97.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan makanan dan minuman									30.025.000,00		BP3D/Bappeda		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									380.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									670.782.000,00		BP3D/Bappeda		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									85.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	365.100.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									91.295.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									18.805.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									90.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									120.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									45.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	86.040.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									86.040.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi	160.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									160.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	37.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									25.600.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									4.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									8.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program pengembangan data/informasi	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi							Tersedianya data dan informasi pembangunan	501.195.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan									136.155.000,00		BP3D/Bappeda		
	Monitoring dan evaluasi pembangunan *)									46.550.000,00		BP3D/Bappeda		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) *)										173.960.000,00		BP3D/Bappeda	
	Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah *)										80.000.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyediaan Data Informasi Pembangunan Berbasis WEB *)										45.200.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data SIPD *)										19.330.000,00		BP3D/Bappeda	
	Program perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan C	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan wilayah	319.809.200,00		BP3D/Bappeda	
	Pengendalian rencana tata ruang daerah *)										82.739.200,00		BP3D/Bappeda	
	Pembangunan pelaksanaan program percepatan sanitasi permukiman *)										78.750.000,00		BP3D/Bappeda	
	Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat *)										158.320.000,00		BP3D/Bappeda	
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									79.940.000,00		BP3D/Bappeda	
	Perencanaan penanganan perumahan *)										79.940.000,00		BP3D/Bappeda	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah	871.529.200,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan rancangan RPJMD										103.309.400,00		BP3D/Bappeda	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPd										273.100.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penetapan RKPd										44.800.000,00		BP3D/Bappeda	
	Pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan desa *)										59.919.800,00		BP3D/Bappeda	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah *)										48.400.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyelenggaraan Penyusunan Renja SKPD *)										31.900.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan RAPBD oleh TAPD *)										146.400.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran APBN/DAK/Tugas Pembantuan *)										51.900.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan dan Revisi dan Perubahan DPA-SKPD *)										13.400.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyelenggaraan Penyusunan Pra-RKA SKPD *)										20.900.000,00		BP3D/Bappeda	
	Pengembangan, operasi dan implementasi Simda Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas *)										77.500.000,00		BP3D/Bappeda	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang ekonomi	264.046.900,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi *)										89.636.900,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan Indikator Makro Daerah melalui KONREG PDRB *)										24.750.000,00		BP3D/Bappeda	
	Penyusunan masterplan UMKM *)										86.260.000,00		BP3D/Bappeda	
	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan *)										63.400.000,00		BP3D/Bappeda	
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang prasarana & SDA	66.100.000,00		BP3D/Bappeda	
	Pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup *)										66.100.000,00		BP3D/Bappeda	
	Program Pengendalian Infrastruktur *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Tersedianya data pengendalian infrastruktur	173.190.000,00		BP3D/Bappeda	
	Pengendalian pembangunan infrastruktur *)										173.190.000,00		BP3D/Bappeda	
	Program penelitian dan pengembangan IPTEK *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								Dokumen hasil penelitian dan pengembangan IPTEK	579.425.000,00		BP3D/Bappeda	
	Peningkatan peran dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan *)										40.000.000,00		BP3D/Bappeda	
	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan *)										189.300.000,00		BP3D/Bappeda	
	Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Gunung Mas *)										97.400.000,00		BP3D/Bappeda	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Pengembangan dan penguatan kelitbangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan *)									51.625.000,00		BP3D/Bappeda		
	Pengembangan dan penguatan kelitbangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi *)									61.100.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan *)									140.000.000,00		BP3D/Bappeda		
	Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang sosbud					230.950.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya *)									118.650.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan kegiatan Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *)									16.800.000,00		BP3D/Bappeda		
	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunung Mas *)									38.150.000,00		BP3D/Bappeda		
	Penyelenggaraan Forum Koordinasi CSR *)									57.350.000,00		BP3D/Bappeda		
4:04	Bidang Keuangan													
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			tersedianya data inventarisasi dan data penataan aset kantor					13.050.000,00		BPPRD		
	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *)									13.050.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								5.370.000,00		BPPRD		
	Penyusunan RKBU dan RKPBU *)									5.370.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								2.350.000,00		BPPRD		
	Penataan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD *)									2.350.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								4.300.000,00		BPPRD		
	Inventarisasi dan penataan aset SKPD *)									4.300.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								20.000.000,00		BPPRD		
	Inventarisasi dan penataan aset/barang daerah *)									20.000.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								83.850.000,00		BPPRD		
	Sosialisasi Pertanggungjawaban Dana Desa *)									83.850.000,00		BPPRD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi								48.410.100,00		BPPRD		
	Inventarisasi dan penataan aset SKPD *)									48.410.100,00		BPPRD		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.864.808.338,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa surat menyurat									10.200.000,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									158.960.400,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan									650.000,00		BPPRD		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor									24.613.300,00		BPPRD		
	Penyediaan alat tulis kantor									142.436.450,00		BPPRD		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									159.000.000,00		BPPRD		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									27.550.500,00		BPPRD		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									6.930.000,00		BPPRD		
	Penyediaan bahan logistik kantor									132.000.000,00		BPPRD		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									256.000.000,00		BPPRD		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									821.467.688,00		BPPRD		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									125.000.000,00		BPPRD		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					270.963.000,00		BPPRD		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									28.132.000,00		BPPRD		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									53.000.000,00		BPPRD		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.431.000,00		BPPRD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2/3
(1)	(3)												(4)		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan												25.000.000,00	BPPRD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional												84.600.000,00	BPPRD	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												64.900.000,00	BPPRD	
	Program peningkatan disiplin aparatur												44.100.000,00	BPPRD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											44.100.000,00	BPPRD	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												112.000.000,00	BPPRD	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											112.000.000,00	BPPRD	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja												43.020.000,00	BPPRD	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											22.200.000,00	BPPRD	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran												3.720.000,00	BPPRD	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												17.100.000,00	BPPRD	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah												2.419.083.000,00	BPPRD	
	Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak dan Retribusi Daerah *)	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											122.500.000,00	BPPRD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas *)												154.825.000,00	BPPRD	
	Operasi Sisir Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan *)												102.500.000,00	BPPRD	
	Penyampaian SPPT PBB *)												184.800.000,00	BPPRD	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAD *)												109.299.800,00	BPPRD	
	Penyusunan RKB dan RKPBU *)												10.283.400,00	BPPRD	
	Rekonsiliasi Pendapatan Daerah *)												114.500.000,00	BPPRD	
	Pemuktahiran Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan PBB *)												152.500.000,00	BPPRD	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah *)												94.500.000,00	BPPRD	
	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *)												55.000.000,00	BPPRD	
	Pemuktahiran dan Verifikasi Data BPHTB *)												60.000.000,00	BPPRD	
	Rapat-rapat Koordinasi regional PBB *)												36.000.000,00	BPPRD	
	Penyusunan Laporan Semesteran Pendapatan Daerah *)												9.249.900,00	BPPRD	
	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah Akhir Tahun *)												9.249.900,00	BPPRD	
	Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Informasi PBB *)												816.875.000,00	BPPRD	
	Intensifikasi dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah *)												157.500.000,00	BPPRD	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan PPh OPDN/PPH Pasal 21 *)												115.000.000,00	BPPRD	
	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah *)												69.500.000,00	BPPRD	
	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi *)												45.000.000,00	BPPRD	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												2.208.479.890,00	BPKAD	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi											26.280.000,00	BPKAD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												398.520.000,00	BPKAD	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan												750.000,00	BPKAD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor												24.512.330,00	BPKAD	
	Penyediaan alat tulis kantor												142.593.500,00	BPKAD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan												66.420.000,00	BPKAD	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												12.785.000,00	BPKAD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									18.000.000,00		BPKAD		
	Penyediaan bahan logistik kantor									126.000.000,00		BPKAD		
	Penyediaan makanan dan minuman									16.736.000,00		BPKAD		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									568.000.000,00		BPKAD		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									595.038.060,00		BPKAD		
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)									45.000.000,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa kebersihan gedung pertemuan umum *)									56.845.000,00		BPKAD		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik GPU *)									96.000.000,00		BPKAD		
	Penataan Administrasi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah *)									15.000.000,00		BPKAD		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat					2.970.391.000,00		BPKAD		
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional **)									1.584.443.000,00		BPKAD		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									38.000.000,00		BPKAD		
	Pengadaan peralatan gedung kantor									74.500.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas									20.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									15.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									25.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									154.600.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									56.400.000,00		BPKAD		
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional									466.000.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD *)									202.950.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum *)									176.498.000,00		BPKAD		
	Pemeliharaan perlengkapan gedung pertemuan umum *)									77.000.000,00		BPKAD		
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan Gedung Pertemuan Umum *)									80.000.000,00		BPKAD		
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS					87.600.000,00		BPKAD		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									87.600.000,00		BPKAD		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi					200.000.000,00		BPKAD		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									200.000.000,00		BPKAD		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai					208.060.000,00		BPKAD		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									10.040.000,00		BPKAD		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									9.760.000,00		BPKAD		
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									9.680.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)									10.100.000,00		BPKAD		
	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - SKPD *)									23.500.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Triwulanan Kabupaten Gunung Mas *)									89.000.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Gunung Mas *)									25.620.000,00		BPKAD		
	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)									12.960.000,00		BPKAD		
	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *)									17.400.000,00		BPKAD		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui perda pajak daerah dan retribusi daerah					4.629.673.894,00		BPKAD		
	Penyusunan standar satuan harga									89.400.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD									126.520.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD									66.520.000,00		BPKAD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)									(4)				
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD									114.520.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD									66.520.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD									173.200.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD									59.000.000,00		BPKAD		
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah									210.527.000,00		BPKAD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi manajemen penggajian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas *)									57.260.000,00		BPKAD		
	Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah *)									172.800.000,00		BPKAD		
	Penyusunan RKB dan RKPBU *)									14.400.000,00		BPKAD		
	Penyusunan laporan semester aset/barang daerah *)									73.600.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah *)									52.800.000,00		BPKAD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas *)									96.000.000,00		BPKAD		
	Pelayanan Penerbitan SP2D Pelaksanaan APBD *)									30.200.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kasda Kabupaten Gunung Mas *)									57.800.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS *)									23.800.000,00		BPKAD		
	Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan PPAS Perubahan *)									23.800.000,00		BPKAD		
	Pelayanan Verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung Mas Pelaksanaan APBD *)									50.500.000,00		BPKAD		
	Pengelolaan Kas Daerah *)									194.000.000,00		BPKAD		
	Pengelolaan Gaji PNS *)									114.500.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD *)									65.500.000,00		BPKAD		
	Peningkatan operasional, pemeliharaan jaringan dan perangkat Simda Kabupaten Gunung Mas *)									85.092.000,00		BPKAD		
	Peningkatan kualitas perangkat/pengadaan Server dan Jaringan Aplikasi Simda Kabupaten Gunung Mas *)									363.300.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi realisasi pembayaran gaji PNS *)									37.000.000,00		BPKAD		
	Peningkatan pelayanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) *)									95.550.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) *)									161.300.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi Realisasi Setoran PFK serta Penyusunan Rekapitulasi Rincian dan Komposisi PNS untuk pengalokasian DAU *)									58.710.000,00		BPKAD		
	Penyusunan Laporan Bulanan dan Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga atas Realisasi Pembayaran Gaji PNS se Kabupaten Gunung Mas *)									54.200.000,00		BPKAD		
	Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan Simda Keuangan *)									200.500.000,00		BPKAD		
	Penghapusan Barang Milik Daerah*)									124.600.000,00		BPKAD		
	Penilaian Barang Milik Daerah*)									150.500.000,00		BPKAD		
	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah*)									137.770.000,00		BPKAD		
	Peningkatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Persediaan Kabupaten Gunung Mas *)									130.400.000,00		BPKAD		
	Peningkatan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Penyelenggaraan SIKD *)									81.200.000,00		BPKAD		
	Penyelenggaraan Pelaksanaan Tim Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)									71.100.000,00		BPKAD		
	Intensifikasi Penatausahaan BMD *)									61.000.000,00		BPKAD		
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan *)									136.600.000,00		BPKAD		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(3)													
	Rekonsiliasi Laporan Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas *)										(4)	23.500.000,00	BPKAD	
	Rekonsiliasi Laporan Investasi Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas *)											24.400.000,00	BPKAD	
	Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan *)											35.000.000,00	BPKAD	
	Penyusunan Laporan Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh Badan Pengelola Keuangan dan Aset *)											38.900.000,00	BPKAD	
	Rekonsiliasi Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten *)											21.500.000,00	BPKAD	
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Se-Kab. Gunung Mas*)											21.500.000,00	BPKAD	
	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) *)											166.200.000,00	BPKAD	
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat SIMDA BMD dan SIPDA *)											110.000.000,00	BPKAD	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas *)											101.000.000,00	BPKAD	
	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan BMD Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD *)											117.000.000,00	BPKAD	
	Pembuatan Website Aplikasi Simda Kabupaten Gunung Mas *)											31.084.894,00	BPKAD	
	Penataan, Perencanaan Penyusunan dan Administrasi APBD Kabupaten Gunung Mas *)											57.600.000,00	BPKAD	
4:05	Bidang Kepegawaian													
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										25.730.000,00	BKPPD	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan											25.730.000,00	BKPPD	
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi										31.000.000,00	BKPPD	
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Camat *)											31.000.000,00	BKPPD	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.702.517.886,00	BKPPD	
	Penyediaan jasa surat menyurat											7.800.000,00	BKPPD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											224.400.000,00	BKPPD	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional											77.300.000,00	BKPPD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor											9.975.000,00	BKPPD	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja											33.000.000,00	BKPPD	
	Penyediaan alat tulis kantor											95.436.990,00	BKPPD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											58.762.200,00	BKPPD	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor											7.290.000,00	BKPPD	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor											8.000.000,00	BKPPD	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan											8.880.000,00	BKPPD	
	Penyediaan bahan logistik kantor											81.950.000,00	BKPPD	
	Penyediaan makanan dan minuman											27.500.000,00	BKPPD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah											320.000.000,00	BKPPD	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran											617.223.696,00	BKPPD	
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)											125.000.000,00	BKPPD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	84.265.206,00	BKPPD	
	Pengadaan peralatan gedung kantor											59.000.206,00	BKPPD	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor											25.265.000,00	BKPPD	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	68.040.000,00	BKPPD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya											68.040.000,00	BKPPD	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi									Tertaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai	50.962.200,00	BKPPD	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2019.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019**

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
Pertumbuhan PDRB (%)	6,9	7	7,15	7,2	6,41	6,96	7,00	
Laju Inflasi (%)	7,8	6,9	6,4	5,1				
Kenaikan PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (%)	19,26	26,78	27,98	29,12	6,41	6,96	7,00	
Angka Kemiskinan (%)	6,45	6,2	5,93	5,67	6,70	6,17	5,85	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,00%	7,00%	5,00%	4,00%	1,20%	2,70%		
Indeks Pembangunan Manusia (%)	74,42	74,89	74,99	75,03	68,13	69,24	69,73	
Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun				5.238.760	9.965	10.044	10.155	
Jumlah PDRB Perkapita/Tahun				1 buku (Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas	3.378.383,3	3.776.970,5	4.231.787,5	
Angka Pengangguran				58	68,13	69,24	69,73	
Fokus Layanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
Angka melek huruf (%)	99,79	99,89	99,99	99,99	99,73	99,53	99,95	
Angka Partisipasi Kasar								
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	43	50	57	60				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	115	115	100	100	120,48	120,19	116,41	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	90	90	90	90	90,8	89,17	100,99	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	55	65	70		49,33	67,29	61,15	
Angka Pendidikan yang ditamatkan								
Angka Partisipasi Murni								
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,65	99,75	99,75	99,75	99,34	103,3	95,84	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	75	80	85	90	63,35	66,64	65,64	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	40	60	75		47,26	47,69	36,49	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Fokus Layanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
Pendidikan dasar								
SD/MI								
Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	11,16	10,20	9,12	8,16	1 : 13	1 : 10	1 : 11	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	100	100	100	100	99,63	110,59	110,41	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:22	1:22	1:22	1:22		14:09	0:00	
SMP/MTs								
Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	9,27	8,67	7,67	7,67	1 : 15	1 : 10	1 : 12	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	98	98	98	98		96,44	97,41	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:27	1:27	1:27	1:27		2:52	0:00	
Pendidikan Menengah								
Rasio siswa terhadap guru	12,25	12,12	12		1 : 11	1 : 13	1 : 16	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	82	83	83			55,07	41,44	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:36	1:36	1:36			3:21	0:00	
Fasilitas Pendidikan								
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	45,00	50,00	60,00	70,00		22,87	23,61	
Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	35,00	45,00	50,00	60,00		15,06	17,58	
Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	98,00	99,00	100,00			24,32	30,4	
Angka Harapan Lama Sekolah								
Angka Harapan Lama Sekolah				12 Thn	10,82	11,44	11,74	
Rata-rata Lama Sekolah				9 Thn	8,74	8,93	8,94	
Angka Putus Sekolah								
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	21,00%	69,00%	89,00%	
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	0,30%	0,30%			337,00%	47,00%	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,00	40,00	50,00	60,00		66,42	77,23	
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,00	85,00	87,00	90,00		76,08	82,98	
Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,00	90,00	92,00			76,82	98,62	
Angka Kelulusan								
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100		97,32	97,69	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100		96,63	97,79	
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100			99,54	97,95	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100		93,16	95,43	
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99	99	99			85,69	84,35	
Kesehatan								
Angka Kelangsungan hidup Bayi	90	91	92	93	90	86,86	92	93,79
Angka Usia Harapan Hidup	70,1	70,1	71	71	72	72	72	72
Angka Gizi Buruk (%)	8	7	6	8	4	3	3	3
Angka kematian ibu	119	106	102	241/100.000 KLH	247	159	223	103/100.000 KLH
Angka Kematian Bayi	15	15	13	8/1.000 KLH	9	10	7	8/100 KLH
Angka Kesakitan				43.980				
Rasio Posyandu per satuan balita	140 : 11.590	140 : satuan balita tahun 2015	145 : satuan balita tahun 2016	145 : satuan balita tahun 2017	141 : 9.140	141 : 9.188	142 : 10.619	140 : 9.975
Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	85: 130.305	87: penduduk Tahun 2015	89: penduduk Tahun 2016	90: penduduk Tahun 2017	96 : 154.084	96 : 107.500	96 : 109.949	89 : 112.484
Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	1: 130.305	1: penduduk Tahun 2015	1: penduduk Tahun 2016	1 : penduduk Tahun 2017	1: 154.084	1: 107.500	30 : 109.949	35: 112.484
Rasio Dokter per satuan penduduk	26: 130.305	27: penduduk Tahun 2015	28 : penduduk Tahun 2016	29 : penduduk Tahun 2017	25: 154.084	28: 107.500	30 : 109.949	35: 112.484
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	492 : 130.305	497: penduduk Tahun 2015	507 : penduduk Tahun 2016	517 : penduduk Tahun 2017	435: 154.084	508: 107.500	864 : 109.949	592 : 112.484
Cakupan Puskesmas	1,41	1,41	1,45	1,45	100	100	100	100
Cakupan Pembantu Puskesmas	0,67	0,69	0,70	0,71	100	100	100	0,69
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	95	95	96	96	91,09	89,11	90,57	90
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	60	65	65	66	45,82	36,94	33,16	60,95

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92	93	94	95	87,67	86,86	86,86	86,73
Cakupan Ibu Nifas	92	95	95	96	87,87	87,56	88,8	90,03
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	80	82	82	39,88	31,02	16,88	52,23
Cakupan Kunjungan Bayi	92	95	95	96		91,3	92	
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	127	127	127	127		97	127	80,31
Cakupan pelayanan anak balita	92	95	95	96				80,26
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	95	95	95	100				
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	90	92	93	94	86,33	78,85	83,59	99,4
Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	60	62	62	64	106,49	54,28	49,5	101,95
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2/100	2/100	2/100	2/100	0	0	0	0
Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	100	100	100				0,21
Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	100	100	100	100				
Penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	0	0	1,82	140,46
Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100		3216	1564	1152
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	30	35	40	45				
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,1	0,1	0,1	0,1				
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100				0
Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	3 Spesialis & 2 Residence	5 Dokter spesialis	7 Dokter spesialis	8 Dokter spesialis	3 Spesialis & 2 Residence	5 Dokter spesialis + 1 Dokter Residence	5 Dokter spesialis + 1 Dokter Residence	8 Dokter spesialis
Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	50%	65%	75%	80%	50%	65%	61%	61%
Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	60%	65%	75%	80%	60%	65%	138%	98%
Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D
Cakupan Desa Siaga Aktif	72	74	76	78				

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Penataan Ruang								
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	122.921,34	272.778,69	272.778,69	272.778,69	0,122	0,146	0,176	0,565
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	87,00	78,00	60,50	60,50	87	21,5	300	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	40,00	89,00	113,00	127,00	7,412	7,114	7,436	7,450
Pekerjaan Umum								
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	15,294%	18,008%	20,940%	23,537%	15,375%	14,768%	20,096%	24,510%
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	45%	48%	54%	59%	45,50%	48%	56,60%	78%
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	28%	34%	40%	45%	29%	39%	39%	39%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	4,31%	5,80%	7,51%	9%	9,98%	10,10%	19,76%	10,63%
Persentase penanganan sampah (%)	71%	78%	86%	90%	5,04%	4,51%	12,21%	12,21%
Rasio Rumah Layak Huni	15,300%	18,700%	21,100%	23,425%	18,037%	17,345%	25,855%	23,328%
Pemukiman Layak Huni (Ha)	917,00	926,00	938,00	947,00	4,906	6,856	6,856	6,909
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik				23,54%	-	-	-	24,510%
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik				5%	-	-	-	4,4%
Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan				3 Desa	-	-	-	3 Desa
% Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih				3 Desa	-	-	-	3 Desa
% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik				15%	-	-	-	12,42%
Perumahan								
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	11.404	12.190	12.940	13.690	3,149	3,397	3,721	14,844
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	28%	34%	40%	45%	29%	39%	39%	39%
Rumah Layak Huni (unit)	18.400	18.620	18.810	18.900	23,504	23,659	35,267	26,241
% Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni				23,43%	-	-	-	23,328%
Penataan Ruang								
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	0,72%	5,75%	10,80%	16,10%	0,29%	0,46%	0,59%	0,81%
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	17,35%	19,35%	20,44%	26,15%	0,04%	0,98%	0,98%	0,98%
% Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik				15%	-	-	-	15%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Perencanaan Pembangunan								
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase kesesuaian antara muatan RKPd dengan muatan RPJMD	90%	90%	100%	100%				
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya	90%	90%	100%	100%				
Jumlah Dokumen Perencanaan				100%				
Perhubungan								
Jumlah Bandara (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dermaga Sungai (buah)	2	1	1	-	2	1	-	-
Jumlah penumpang / barang melalui bandara								
- jumlah penumpang (orang)	157	360	360	360	455	276	-	93
- jumlah barang (kg)	221	360	360	360	821	906	-	459
Persentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas				10	-	-	-	33
Lingkungan Hidup								
Jumlah duta lingkungan (orang)	-	2 Orang	10 Orang	12 Orang		2 orang	2 orang	
Jumlah adiwiyata (sekolah)	2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah		4 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah
Pencemaran status mutu air	-	-	33,3%	66,7%	44%	38%	52%	35%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	40,1%	51,9%	63,0%	88,9%	37%	48%	58%	79%
Penegakan Hukum Lingkungan	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah				30%				73,3%
% Standar Baku Mutu Udara				30%				73,3%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	45	50	55	60				
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia				
Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	45	50	60	65				
Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	35	40	45	50				
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	55	60	65	70				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	11,26	11,48	11,70	11,93				
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	16,804	17,052	17,300	17,458				
Rasio KDRT	0,5%	0,5%	0,5%	1%	2 kasus	1 kasus	2 kasus	
Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	0	1%	1%	2%				
Indek Pemberdayaan Gender (IGD)				77,92				
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar				100				
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar				100				
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga (%)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,8	2,8	2,729	
Rasio Akseptor KB (orang)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)	16.727	18.400	20.240	22.264	19.151	15.625	14.594	
Jumlah PLKB Aktif (orang)	9	9	20	30	9	12	13	
Terpadunya program Kerja KB (program)	2	2	2	2	2	2	2	
tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	54	54	60	65	54	54	60	
Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	3	4	6	8	3	4	6	
Keluarga Pra Sejahtera I	18	18	18	18	-	-	16,5	
Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	26	35	45	55	-	-	135	
Jumlah kelompok tribina (kelompok)	33	38	45	55	-	-	36	
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	2079	2379	2679	2979	2079	2143	-	
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	1025	1225	1475	1703	724	-	-	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Jumlah KDRT (orang)	2	2	2	2	2	1	2	
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	2	7	5	5	-	-	-	
Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	11	7	7	7	-	3	9	
Jumlah balita ikut posyandu (anak)	9605	9715	9806	9923	-	-	-	
Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	18	18	25	30	-	18	68	
Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	0	0	1	1	-	-	-	
Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	0	0	2	3	-	-	-	
Sosial								
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	-	-	-	1				
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%				
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Orang)	,86%	,86%	,86%	,86%				
Ketenagakerjaan								
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	76,9%	76,9%	76,9%	76,9%		77,44%		
Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,00%	7,00%	5,00%	4,00%	1,20%	2,70%		
Ketenagakerjaan								
Jumlah lulusan S1/S2/S3	1,363	1,363	1,363	1,363	1,373	1,380	1,372	1,393
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,70%	98,13%	98,7%	98,92%
Jumlah Tenaga Kerja S2, S3				0				
Koperasi dan UKM								
Koperasi Aktif (%)	77,92	78,6	79,91	81,22	40%	45%	50%	52%
Jumlah UMKM	2.943	2.955	2.967	2.982	2,9	2,922	2,93	2,943
Jumlah Industri	219	224	229	234				
Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	4	6	8	10				4
% Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	4%	7%	9%	12%	20%	21%	25%	27%
% UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat				61,18%				40,90%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Penanaman Modal								
Jumlah Investor PMDN dan PMA	116	118	120	132	116	118	120	42
Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	75%	75%	75%	80%	75%	75%	75%	80%
Lamanya hari proses perizinan	10	10	10	10	10	10	10	10
Indeks Kepuasan Masyarakat	72	75	77	79	72	72	70,25	79,06
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Investasi Daerah								
Kebudayaan								
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	1	1	1	0	0	1	
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	1	1	1	1	1	9	12	
Kesenian								
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	1	1	1	1	26	26	26	
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1	1	0	0	1	
Kepemudaan dan Olahraga								
Jumlah Klub Olahraga (buah)	1	1	1	1	0	0	0	
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	1	1	1	1	0	0	0	
Jumlah Organisasi Pemuda	1	1	1	1				
Jumlah Organisasi Olahraga	1	1	1	1				
Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1				
Jumlah Lapangan Olahraga	1	1	1	1				
Jumlah Pemuda Berprestasi				70%				
Jumlah Mendali				15 Buah				
Pariwisata								
Kunjungan Wisata	4.000	4.300	4.500	4.700	1100	1250	1600	9457
Jumlah objek wisata daerah	1	1	1	1				1
PDRB Sektor Pariwisata				70%				70%

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	100%	100%	100%	100%	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	
Kegiatan Pembinaan politik daerah	100%	100%	100%	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
Administrasi Pemerintahan								
Rasio jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk	46	55	62	69				
Jumlah LINMAS per jumlah 10.000 penduduk (orang)	564	570	580	590				
Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	132	137	142	147				
Penegakan PERDA	7	10	12	14				
Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian secara Online (%)	10	20	30	40				
Nilai Reformasi Birokrasi				65				
Nilai Sakip				B				
Opini BPK				WTP				
Level Kapabilitas				Level 2				Level 2
Level Maturitas				Level 2				Level 2
IKM				10				
Angka Kriminal				20				
Jumlah Konflik yang Diselesaikan				30				
Tingkat Pelanggaran Terhadap Perda				40				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	45 desa/kel	87 desa/kel	127 desa/kel	127 desa/kel	43	0	0	114
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat	0 desa/kel	24 desa/kel	48 desa/kel	72 desa/kel	0	24	48	72
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1	1	1	1
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	191 orang	247 orang	325 orang	383 orang	191	247	325	373
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	0	0	1 desa/kel	2 desa/kel	1	4	8	4
Kearsipan								
Pengelolaan arsip secara baku :								
a. Umum	85	115	120	115				
b. Pemerintahan	75	90	110	115				
c. Politik	35	50	70	75				

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Produktivitas Komoditi Perkebunan								
Karet (kg/ha)	1.180	1.200	1.250	1.250	6,66	2,57	1,72	
Kelapa Sawit	-	435	450	500	0,61			
Ketahanan Pangan								
Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	1	2	1	1	1	1	1	
Ketersediaan Pangan Utama (%)	5,8	6,3	6,9	33,6	34,2	42,9	31,94	
Transmigrasi								
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	82,4	86,8	91,2	95,6	76,41	81,56	86,71	93,22
Kehutanan								
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	26.477	24.570	20.000	18.270				
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	37.514.161.455	40.065.650.000	40.065.650.000	40.065.650.000				
Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	0	75 Km	75 Km	75 Km				
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	1.000	1.000	1.000	1.000				
Pembangunan KPHP (unit)	1	0	2	0				
Pembangunan TAHURA	0	1	0	0				
Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	0	5	0	0				
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	0	6	1	1				
Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun				20				9
Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu				10				0
% Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu				30				57,14%
Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya				4119 Ha				12 Ha
Energi dan Sumber Daya Mineral								
Luas wilayah yang ditertibkan (Ha)	485,26 Ha	422,948 Ha	422,948 Ha	422,948 Ha				
Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	2.200.000.000 dan 2.051.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000				
Rasio ketersediaan daya listrik	4,870 MW	4,896 MW	4,922 MW	4,948 MW				
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	56,36%	65,08%	72,35%	79,62%				

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Jumlah Desa berlistrik	74 Desa	83 Desa	92 Desa	101 Desa				
Kelautan dan Perikanan								
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	1.430,00	1.975,00	3.358,00	5.036,00	1.430,00	1.978,00	3.363,06	3.701,82
Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	216,24	218,40	222,77	227,23	200,2	535,1	351,4	260,60
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	33	34	36	38	27	36	37	39
Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	140	200	240	270	89,2	118	240	207,88
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	23,7	25	26,25	27,56	7,7	6,27	103,97	27,84
% PDRB Sub Sektor Perikanan				6,5				
Perdagangan								
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,3	13,25	13,26	13,26	9,10	9,10	8,81	9,41
Perindustrian								
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	2,07%	2,33%	2,43%	2,53%	9,49%	9,50%	8,97%	8,86%
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)	40,63%	41,40%	42,17%	42,94%				
Pertumbuhan Industri (jumlah)	50	50	50	50	1	4	46	35
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	268	318	368	418	219	223	269	304
Penanggulangan Bencana								
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	1	5	6	8				
Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	5	6	4	3				
Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	100	100	100	100				

BAB VI

P E N U T U P

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2019, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan serta telah dibahas dalam forum MUSRENBANG Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 sehingga dengan demikian RKPD Tahun 2019 adalah komitmen seluruh Stakeholder di daerah yang berisi rincian program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Mengingat RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 merupakan Komitmen Stakeholder di daerah, maka dokumen RKPD dimaksud harus menjadi acuan masing-masing Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Unit Satuan Kerja serta acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam proses pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas, terlebih dahulu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2019 merupakan rencana program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2. RKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Unit Satuan Kerja dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
3. RKPD Tahun 2019 juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2019.
4. RKPD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas dengan memperhatikan saran-saran dan masukan-masukan dari seluruh Stakeholder termasuk DPRD Kabupaten Gunung Mas pada saat Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Bupati Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pengendalian, monitoring serta melakukan evaluasi kinerja Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Unit Satuan Kerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya yang terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari APBD dan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
6. Untuk itu bagi setiap pelaksanaan program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Gunung Mas Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) dan menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang RKPD sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk itu agar semua PD dari Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana kerja hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas ini tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku pembangunan serta stakeholder

yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Perlu kesungguhan/konsistensi dari semua pihak terutama harus adanya satu kesatuan langkah dalam menyikapi tujuan serta arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2019 sehingga sasaran yang menjadi target pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I, II, III	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI GUNUNG MAS,
[Signature]
ARTON S. DOHONG